

GRAND DESIGN PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR NASIONAL *)

Oleh:

DR. Ir. Endrawati Fatimah, Dipl. Plan, MPSt

Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, FALTL, Universitas Trisakti

I. PENDAHULUAN

Air merupakan sumber kehidupan makhluk hidup yang sangat vital. Kebutuhan air bagi kehidupan manusia sehari-hari mencakup air bersih (*fresh water*) dan air minum (*potable water*). Air bersih sangat diperlukan di dalam kegiatan rumah tangga dan kegiatan usaha ekonomi yang mencakup kegiatan budidaya pertanian, industri dan kegiatan instansional lainnya. Dengan makin bertambahnya jumlah penduduk dan diiringi dengan makin intensifnya kegiatan ekonomi, kebutuhan air akan makin meningkat. Sementara, ketersediaan air bersih (*fresh water*) di bumi sangat terbatas. Meskipun bagian terbesar bumi adalah air dengan total sekitar 1,3 – 1,4 milyar km³ air, sebagian besar (97%) berupa air laut dan hanya sekitar 2,53% merupakan air bersih. Sebanyak dua pertiga dari air bersih itu berupa sungai es (glaser) dan salju permanen yang sulit untuk dimanfaatkan. Menurut Sosrodarsono (1993), hanya 0,73% air bersih yang terdapat di daratan berupa air sungai, air danau, air tanah dan sebagainya yang merupakan sumber air utama bagi kehidupan manusia.

Pemanfaatan sumberdaya air untuk memenuhi kebutuhan hidup dan aktifitas manusia seringkali berdampak negatif terhadap keberlangsungan ketersediaan sumberdaya air. Berbagai masalah yang bersumber dari pemanfaatan sumberdaya air yang tidak terkontrol antara lain terjadinya pencemaran sungai, kekeringan, penurunan muka air tanah, banjir, dan lain sebagainya. Hal ini sangat berkaitan dengan paradigma yang telah membudaya yang menganggap bahwa sumberdaya air termasuk kategori sumberdaya air terbaharukan (*renewable resources*).

Seperti dinyatakan di beberapa pustaka, sumberdaya alam dapat dibedakan menjadi sumberdaya terbaharui (*renewable resource*) seperti air, hutan, makanan, dan sebagainya dan sumberdaya tidak terbaharui (*nonrenewable resource*) seperti mineral deposit dan bahan bakar fosil (Marten, 2001). Pengelompokan sumberdaya alam ini membawa konsekuensi pada makin menipisnya dan rusaknya sumberdaya terbaharui, karena menganggap sumberdaya ini akan selalu tersedia bagi kepentingan manusia (Fatimah, 2009).

*) Disampaikan pada acara FGD Lembaga Ketahanan Nasional guna Penyusunan Kajian Aktual Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mendukung Pembangunan Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional, Jakarta 4 September 2012

Paradigma tersebut perlu diubah karena pada kenyataannya sumberdaya air adalah terbatas, meskipun dapat diperbaharui. Pengelompokan sumberdaya alam yang paling tepat berkaitan dengan sumberdaya air adalah yang dikemukakan oleh Miller, 1990 (Fatimah, 2009). Miller menyebutkan bahwa sumberdaya alam dikelompokkan menjadi 1) *perpetual*; 2) potensial terbaharui (*potentially renewable resources*), dan 3) sumberdaya tidak terbaharui (*nonrenewable resources*). Sumberdaya *perpetual* adalah sumberdaya yang terus menerus ada selama kehidupan ada seperti cahaya matahari, angin, ombak. Sumberdaya potensial terbaharui adalah sumberdaya alam yang dalam kondisi normal dapat tergantikan melalui proses alam seperti air bersih, udara bersih, lahan subur dan tanaman serta hewan. Sumberdaya ini dapat habis apabila penggunaannya melebihi kemampuan alam melakukan proses memperbaharui atau dapat terdegradasi apabila tercemar melebihi kemampuan alam melakukan proses asimilasi. Sementara, sumberdaya alam tidak terbaharui adalah sumberdaya yang ada dalam jumlah yang dianggap tetap karena tidak dapat tergantikan oleh proses alam atau proses memperbaharui jauh lebih lambat dibandingkan proses penggunaannya (Miller, 1990 dalam Fatimah, 2009). Pengelompokan ini lebih memandang sumberdaya alam bukan tidak terbatas sehingga bukan untuk dieksploitasi secara tak terkendali namun untuk dimanfaatkan melalui upaya pengelolaan (*natural resource management*) agar ketersediaannya dapat berkelanjutan.

Berdasarkan Undang Undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Penyelenggaraan konservasi sumber daya air diartikan sebagai upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. Sementara penyelenggaraan pengendalian daya rusak air mencakup upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air atau daya air yang dapat merugikan kehidupan.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, gagasan tentang grand design pengelolaan sumberdaya air ini disusun dalam rangka menghadapi kecenderungan terjadinya ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air

yang semakin meningkat guna mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan.

II. SUMBERDAYA AIR

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, sumberdaya air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung didalamnya. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk didalamnya adalah air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah. Sementara, daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.

Sumber daya air merupakan bagian dari sumber daya yang mempunyai sifat yang sangat berbeda dengan sumber daya alam lainnya. Sumberdaya air, seperti telah disebutkan sebelumnya termasuk kategori sumberdaya potensial terbarui. Hal ini mengandung arti bahwa sumberdaya air dapat dikategorikan sebagai sumberdaya yang terbarui, namun apabila tidak dikelola dengan tepat dan baik dapat menjadi sumberdaya yang tidak terbarui.

Konsep pemikiran sumberdaya air merupakan sumberdaya yang terbarui didasarkan pada pemikiran bahwa keberadaannya akan selalu ada mengikuti siklus hidrologi yang secara alamiah berlangsung terus menerus. Sementara sumberdaya air sebagai sumberdaya yang tidak terbarui adalah bahwa kerusakan secara kuantitas maupun kualitasnya memerlukan waktu yang lama, biaya yang tinggi dan teknologi yang rumit bahwa kadang sulit kembali pada kondisi awalnya. Sebagai contoh, pengisian kembali air tanah (*replenishment period*) membutuhkan waktu 100 sampai 1000 tahun. Periode ini sangat panjang dibandingkan dengan periode aktivitas manusia dalam pengambilan air tanah. Contoh lain adalah, kerusakan kualitas air sungai atau kualitas air tanah karena pencemaran yang terus menerus membutuhkan biaya dan teknologi yang tinggi.

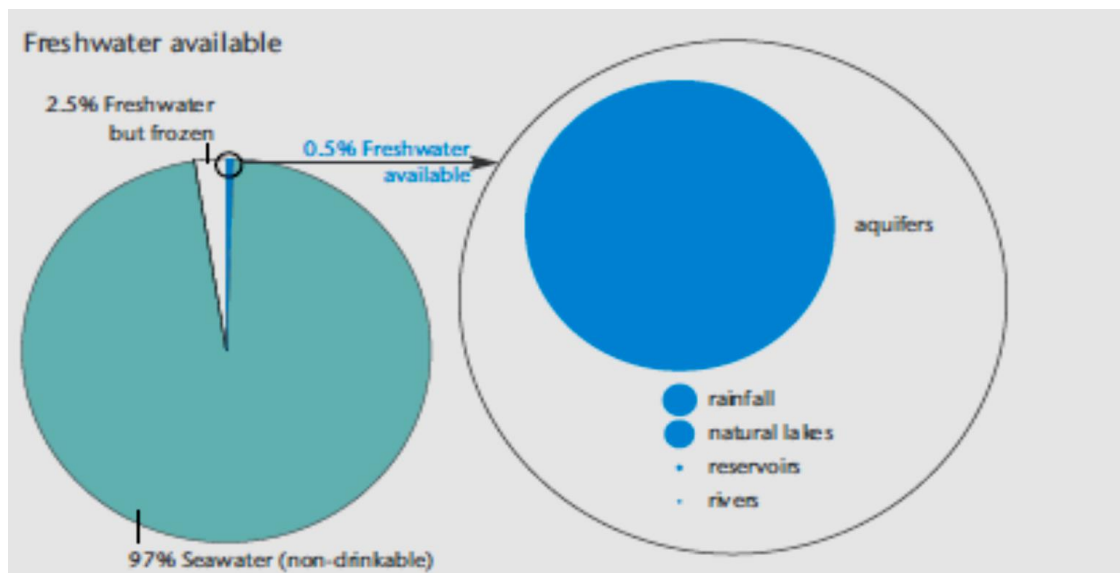
Dilain pihak, kebutuhan pemanfaatan sumberdaya air akan selalu meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk maupun aktivitas ekonomi yang juga meningkat. Kecepatan peningkatan kebutuhan akan sumberdaya ini lebih cepat dibandingkan kemampuan sumberdaya air untuk memperbaharui. Berbagai permasalahan lingkungan berkaitan dengan sumberdaya air menunjukkan bahwa daya dukung sumberdaya air telah terlampaui.

Secara lebih rinci, komponen dalam sumberdaya air yaitu air, sumber air dan daya air yang terkandung didalamnya akan diuraikan dalam sub bab berikut ini:

2.1. Air

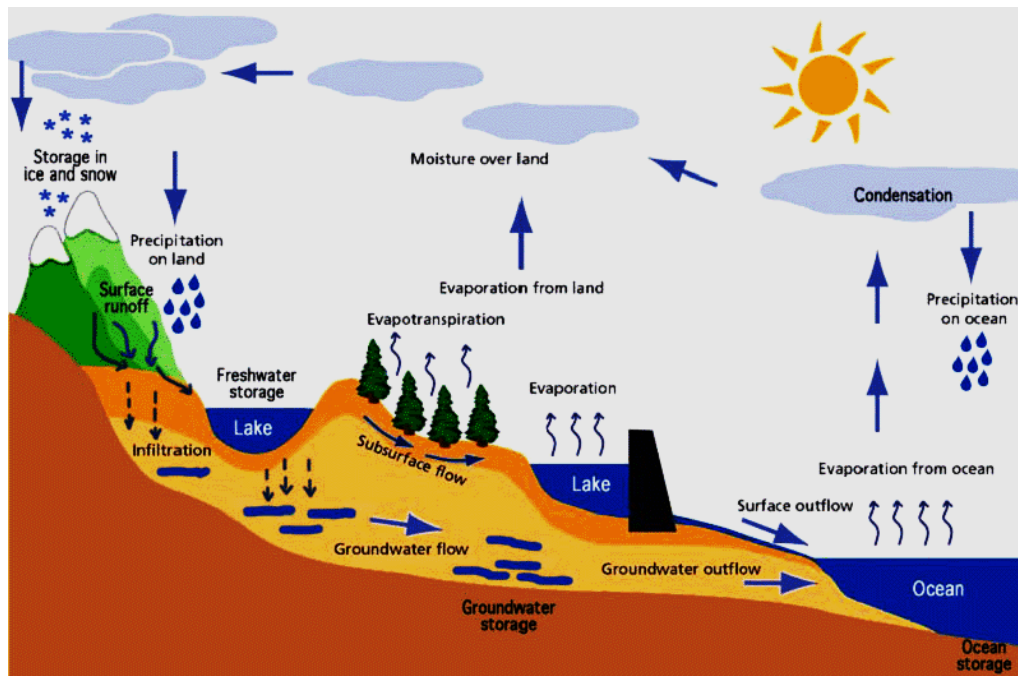
Air adalah sumber daya yang bersifat dinamis, mengikuti siklus hydrologi, secara alamiah berpindah-pindah serta mengalami perubahan bentuk dan sifat tergantung dari waktu dan lokasinya. Air dapat berupa zat padat sebagai es dan salju, dapat berupa zat air yang mengalir dan dapat berupa uap air yang didefinisikan sebagai air udara. Air dapat berada di permukaan tanah sebagai air permukaan, berada dalam tanah sebagai air tanah, berada di udara sebagai air hujan, dan berada di laut sebagai air laut. Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 menyebutkan bahwa air sebagai objek yang harus dikelola mencakup semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Dimana, air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah dan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Ketersediaan air tawar di bumi hanya berkisar 3% dari total air bumi, sebagian besar 97% berupa air laut. Dari 3% tersebut hanya 0,5% yang dapat diakses untuk pemenuhan kebutuhan manusia, karena 2,5% berupa es (gambar 1).



Gambar 1. Komposisi Ketersediaan Air Dunia
Sumber: World Business Council for Sustainable Development, 2009

Daur atau siklus hidrologi menunjukkan gerakan air yang berpindah-pindah dari permukaan laut ke atmosfer kemudian ke permukaan tanah dan kembali lagi ke laut. Proses ini berlangsung terus menerus secara alamiah. Skema daur hidrologi dapat ditunjukkan pada gambar 2.



Gambar 2. Daur Hidrologi

Gambar 2 menunjukkan konsep dasar keseimbangan air secara global di bumi atau sering disebut dengan *closed system of the global hydrological cycle* dimana air tanah (baik dalam *confined* maupun *unconfined aquifers*) dan aliran permukaan (di sungai, danau, dll) merupakan bagian dari beberapa aspek yang menjadikan siklus hidrologi menjadi seimbang. Sementara dalam lokasi tertentu, aliran air permukaan dapat merupakan satu atau lebih sub sistem dan tidak lagi tertutup. Pada siklus terbuka, aliran permukaan dapat memperoleh masukan dari sub sistem lainnya dan sebaliknya dapat mengalirkan aliran ke sub sistem lainnya. Hal ini dapat terjadi pula pada sub sistem air tanah.

Berdasarkan pengertian dari air seperti telah disebut sebelumnya, pengelolaan sumberdaya air dapat diartikan sebagai upaya menjamin terselenggaranya proses daur hidrologi secara berkelanjutan. Hal ini berarti seluruh unsur yang mendukung proses daur hidrologi (yang sifatnya alamiah) harus terjaga keberadaannya.

Dapat dilihat pada Gambar 2. bahwa unsur-unsur penting dalam siklus hidrologi adalah:

1. Matahari

Sinar matahari merupakan komponen penting dalam siklus hidrologi yaitu sebagai sumber energi bagi evaporasi dan evapotranspirasi yang kemudian melalui proses kondensasi akan menghasilkan air hujan. Pada wilayah dengan sinar matahari sepanjang tahun dan didukung keberadaan tumbuhan, tanah dan lautan yang luas akan cenderung memiliki frekuensi dan intensitas curah hujan tinggi.

2. Tanah

Komponen tanah juga merupakan komponen penting dalam siklus hidrologi karena tanah berfungsi sebagai media penerima air hujan yang kemudian didistribusikan menjadi aliran permukaan (*run off*) ke danau, dan sungai, menjadi uap air melalui evaporasi tanah serta menjadi air tanah melalui infiltrasi dan perkolasi. Pada wilayah –wilayah yang terbangun yang biasanya dilengkapi dengan system drainase buatan, komponen tanah ini akan menjadi berkurang. Kondisi ini menyebabkan, air hujan yang jatuh sebagian besar akan menjadi aliran permukaan dan dialirkan (dibuang) ke laut. Dengan kata lain jumlah air yang terinfiltrasi dan terperkolasi yang kemudian menjadi air tanah menjadi sangat sedikit.

3. Vegetasi

Vegetasi merupakan media menampung air hujan sebelum jatuh ke tanah. Makin rimbun tanaman maka makin lama air mencapai tanah. Pada wilayah yang masih berhutan lebat, air hujan akan cukup lama tertahan di vegetasi sebelum secara perlahan jatuh ke tanah. Kondisi ini akan mengoptimalkan proses infiltrasi air hujan ke dalam tanah.

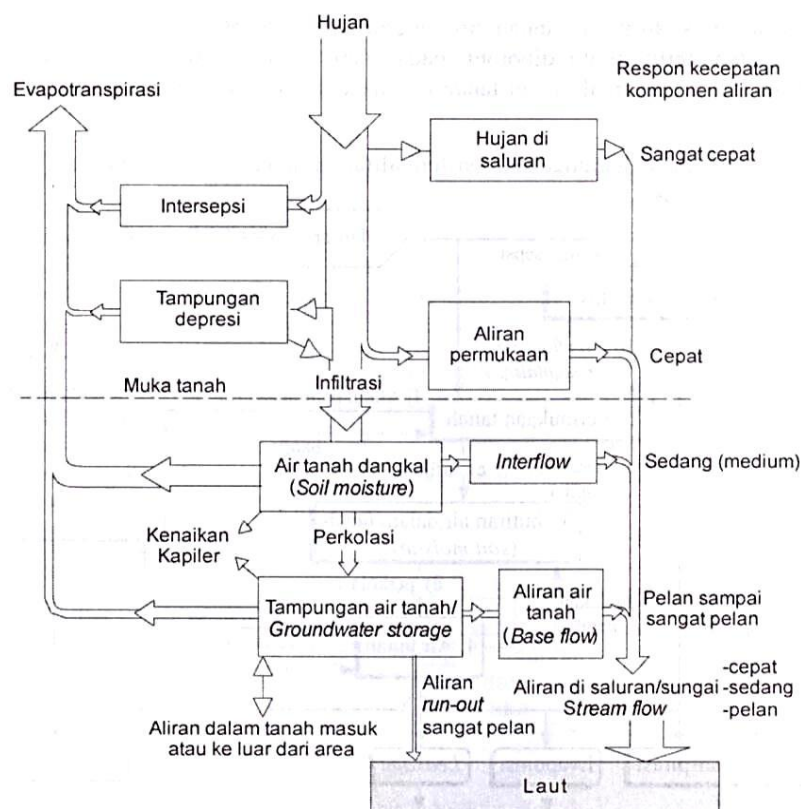
4. Badan air termasuk danau, sungai dan laut

Danau dan sungai merupakan badan air yang mampu menampung air hujan sementara di daratan sebelum akhirnya dialirkan ke laut. Semakin banyak dan lama badan air di daratan mampu menampung air, maka berarti ketersediaan air tawar di daratan makin banyak yang dapat dimanfaatkan. Dalam proses daur hidrologi danau dan sungai menyumbang evaporasi ke atmosfer yang akan membentuk presipitasi. Sementara laut merupakan penyumbang evaporasi terbesar ke atmosfer.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa, keberadaan unsur-unsur alam dalam siklus hidrologi tersebut akan mempengaruhi ketersediaan sumberdaya air yang dapat dimanfaatkan. Secara umum, meski beberapa Negara sudah melakukan desalinisasi air laut, sumber air yang dominan dimanfaatkan dalam kehidupan manusia adalah bersumber dari air permukaan dan air tanah karena lebih mudah dan murah pengambilan dan pengolahannya

serta relatif tersedia di setiap wilayah. Oleh sebab itu, dari sudut pandang ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan, maka siklus hidrologi dalam pengelolaan sumberdaya air dapat dipandang bukan sebagai proses aliran air melainkan sebagai proses bagaimana dapat menampung air tawar sebanyak-banyaknya dari air hujan sebagai sumber utama air untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

Besaran rata-rata air yang lewat pada setiap unsur siklus hidrologi (selain matahari sebagai sumber energy) dan respon kecepatan komponennya berbeda-beda untuk setiap tahapan siklus. Air hujan yang turun mendekati muka tanah akan terdistribusi menjadi intersepsi (lewat vegetasi), hujan di saluran (*channel precipitation*), tampungan depresi (*depression storage*), aliran permukaan (*surface run off*) dan infiltrasi ke dalam tanah. Distribusi air hujan tersebut secara diagramatik dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini:



Catatan: Lebar anak panah menunjukkan besaran relatif rata-rata air yang lewat dalam siklus hidrologi.

Gambar 3. Diagram Siklus Hidrologi
(sumber: Solomon & Codey, 1984 dalam Maidment, 1993)

Gambar 3 menunjukkan bahwa besaran air yang seharusnya terinfiltrasi adalah yang paling besar dibandingkan dengan yang lainnya. Infiltrasi ini terjadi di wilayah yang disebut Daerah Aliran Sungai (DAS). Oleh karena itu untuk dapat memanfaatkan seoptimal mungkin

sumberdaya air, maka factor kondisi DAS menjadi sangat penting. Faktor penutup lahan juga mempunyai peran yang penting dalam proses infiltrasi. Apabila penutup lahan DAS berupa vegetasi yang lebat maka vegetasi ini menghambat aliran permukaan, sehingga proses infiltrasi bisa berlangsung sampai optimal. Namun apabila penutup lahan berupa lapisan kedap air misalnya lantai beton, rumah atau bangunan, maka aliran permukaan akan menjadi besar dan makin sedikit air yang terinfiltrasi.

Indonesia yang terletak di katulistiwa adalah merupakan Negara kepulauan yang sebagian besar berupa lautan/samudra. Komponen matahari dan laut merupakan modal alam yang dimiliki wilayah Negara Indonesia dalam proses hidrologi secara global. Dengan total luas 5.180.053 km², luas wilayah perairan lautan adalah sebesar 3.257.483 km² (62,9%), sisanya adalah wilayah daratan. Selain itu, Indonesia merupakan salah satu Negara dengan hutan primer yang masih luas. Letak dan karakter geografis Indonesia inilah yang menyebabkan Negara Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara yang memiliki kuantitas air tawar yang melimpah. Keberadaan air di 10 (sepuluh) Negara yaitu Brazil, Rusia, China, Canada, Indonesia, Amerika, india, Colombia dan Congo mencapai 60% dari total air tawar di bumi.

Meskipun demikian, tidak seluruh pulau-pulau di Indonesia memiliki unsur penting untuk menunjang terjadinya siklus hidrologi yang panjang dan sempurna. Wilayah di Indonesia banyak terdiri dari pulau berukuran sedang dan kecil yang tidak memiliki hutan, tanah yang cukup luas, danau ataupun sungai yang relative panjang serta kapasitas infiltrasi yang rendah. Hal ini menyebabkan kemampuan daratan untuk menampung air sementara, baik berupa air permukaan dan air tanah menjadi kecil. Kondisi siklus hidrologi yang pendek yang terjadi di pulau-pulau inilah yang sering menyebabkan terjadi kekeringan pada musim kemarau.

2.2. Sumber Air

Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah (UU No. 7 tahun 2004). Dari sudut pandang ketersediaan sumber air, skema tentang siklus hidrologi terutama yang berlangsung di darat dapat dipandang dari sudut pandang sebagai tampungan atau sumber air.

Selama berlangsungnya daur hidrologi, air pada periode tertentu akan tertahan / berada sementara di daratan. Air dalam bentuk dan periode inilah yang digunakan sebagai sumber air bersih yang dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Seperti diketahui, komposisi air tawar di daratan diperkirakan sebagian besar (98,89%) berupa air tanah dan

hanya 1,11% berupa air permukaan. Sumber air untuk keduanya berasal dari air hujan sebagai output dari proses hidrologi di atmosfer sekaligus input bagi proses hidrologi di daratan.

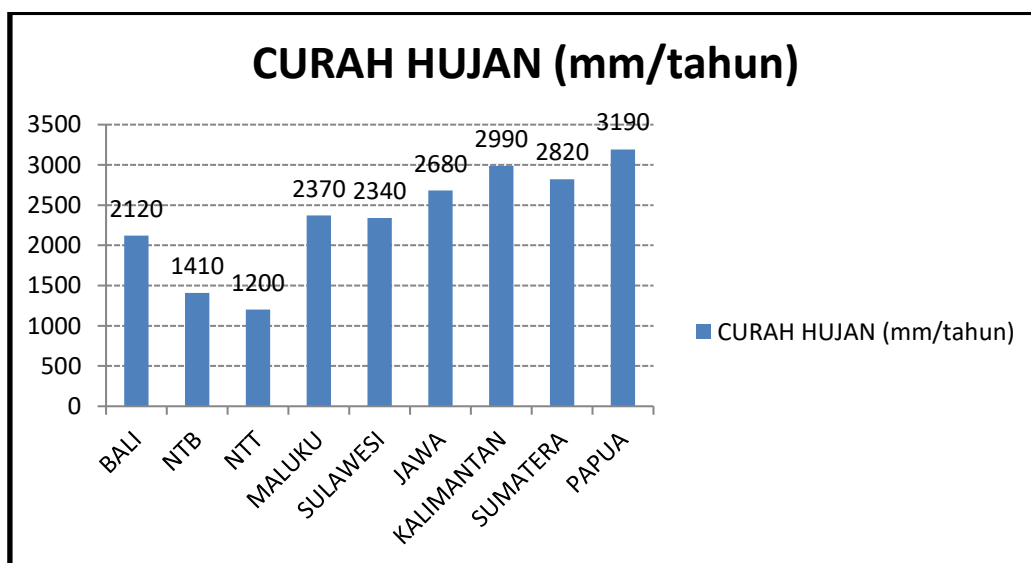
Sumber air sebagai tempat atau wadah air dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Sumber air di atmosfer

Air di atmosfer berupa uap air yang karena adanya perbedaan temperature di atmosfer dari panas menjadi dingin akan terjadi kondensasi yang mengubah uap air menjadi keadaan cairan dan apabila sudah cukup banyak akan turun menjadi hujan karena gaya beratnya sendiri.

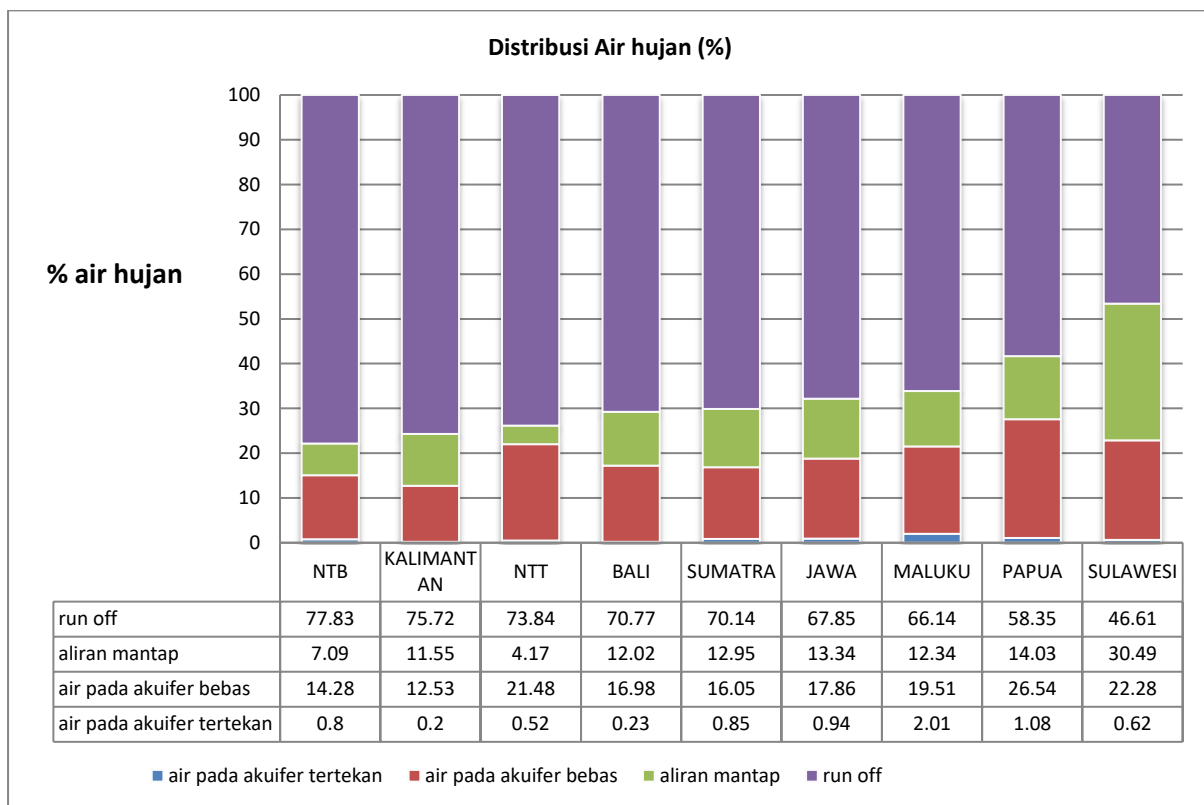
Hujan di Indonesia yang umum dijumpai adalah tipe hujan konvektif dan hujan orografik. Tipe hujan konvektif biasanya terjadi di daerah tropis dan dicirikan dengan intensitas tinggi, berlangsung relative cepat serta mencakup wilayah yang tidak terlalu luas. Sementara. Hujan orografik adalah hujan yang umum terjadi di pegunungan, yaitu ketika massa udara bergerak ke tempat yang lebih tinggi mengikuti bentang lahan pegunungan sampai saatnya terjadi proses kondensasi. Tipe hujan orografik dianggap sebagai pemasok sumber air di daratan (air tanah, danau, bendungan dan sungai) karena biasanya berlangsung di daerah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS).

Ditinjau intensitas curah hujannya, wilayah di Indonesia secara umum memiliki curah hujan yang relatif tinggi dan hanya di beberapa pulau yang sedang – rendah yaitu NTB dan NTT. Data curah hujan di beberapa pulau ditunjukkan pada gambar 4. berikut ini:



Gambar 4. Rata – rata Curah Hujan Tahunan Pulau – Pulau Besar di Indonesia (Sumber: JICA, 1992)

Berdasarkan data tersebut, ketersediaan sumber air untuk wilayah Indonesia sebenarnya cukup melimpah. Meskipun demikian, total curah hujan cukup tinggi di masing-masing pulau tersebut tidak seluruhnya diserap oleh tanah dan menjadi air tanah. Justru karena tidak terkontrolnya pertambahan lahan terbangun yang kedap air dan untuk menghindari banjir, upaya yang dilakukan adalah secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya air hujan tersebut dibuang ke laut. Data yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar air hujan menjadi run off atau air permukaan (Gambar 5).



**Gambar 5. Distribusi Air Hujan di Beberapa Pulau di Indonesia
(Sumber: Kodoatie dan R. Syarief, 2010)**

b. Sumber Air di Permukaan Tanah

Air permukaan bumi dengan jumlah 1,11% dari total air tawar terdistribusi dalam bentuk air di udara sebesar 0,12% dan air yang berada di sumber air permukaan tanah sebesar 0,99% dalam bentuk air danau sebanyak 0,85%, air rawa/payau 0,11%, air sungai 0,02%, dan air biologi 0,01%. Meski demikian, potensi ketersediaan air permukaan tidak hanya pada sungai, danau, waduk, dll, tetapi juga pada lapisan *vandoze zone* yaitu daerah antara permukaan sampai muka air tanah bebas (*unconfined zone*). Pada saat

terjadi peristiwa infiltrasi, air dari permukaan yang masuk ke lapisan tanah berada di lapisan *vadoze zone* yang merupakan zona tak jenuh (*unsaturated zone*).

Secara umum sumber air di permukaan tanah dapat bersifat alami maupun buatan. Pembangunan sumber-sumber air buatan dimaksudkan untuk dapat memanen/ menampung air hujan lebih banyak sehingga dapat lebih didayagunakan. Sumber air permukaan yang bersifat alami antara lain sungai, danau / situ, dan rawa. Sementara sumber air buatan antara lain waduk/bendungan, saluran drainase, embung, dan lain-lain. Sumber air di permukaan tanah ini yang paling sering digunakan sebagai sumber air baku, baik untuk pertanian, maupun kebutuhan domestik dan non domestik lainnya. Besarnya air yang akan menjadi air permukaan bergantung dari besarnya intensitas hujan dan kapasitas infiltrasi tanah. Sumber air di permukaan tanah akan mendapat pasokan dari air larian (*run off*) yang ada ketika jumlah curah hujan melampaui laju infiltrasi air ke dalam tanah. Setelah laju infiltrasi terpenuhi, air mulai mengisi cekungan-cekungan pada permukaan tanah seperti danau, situ, dan lainnya. Setelah pengisian air pada cekungan, air kemudian sesuai sifatnya akan mengalir ke daerah yang lebih rendah selanjutnya ke sungai atau saluran drainage lainnya. Sungai maupun saluran drainase dalam kondisi tanpa hambatan karena memiliki kemiringan lereng akan mengalirkan air permukaan ke laut.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya air, hal penting yang perlu diperhitungkan adalah pemanfaatan dan pengaliran air sungai dan air drainase setepat mungkin agar tidak terjadi masalah banjir (*too much water*) atau kekurangan sumber air baku (*too little water*). Seperti telah diuraikan sebelumnya, untuk dapat memanfaatkan seoptimal mungkin sumberdaya air, maka faktor kondisi DAS menjadi sangat penting. Makin banyak hilangnya lahan tak terbangun akan memperbesar volume air larian. Di musim hujan, sungai dan saluran drainase yang dalam kondisi buruk (kapasitas berkurang karena sedimentasi dan sampah) tidak akan mampu lagi mengalirkan kelebihan air yang ada, pada akhirnya terjadi banjir. Sementara di musim kemarau, debit sungai menurun drastis bahkan beberapa sungai kering karena tanah makin banyak yang tak jenuh dan kemampuan infiltrasi tanahnya meningkat.

Berdasarkan uraian tentang air permukaan, pengelolaan DAS menjadi hal yang penting untuk dilakukan karena di wilayah DAS inilah kesatuan sungai dan anak-anak sungainya berfungsi untuk menampung air yang berasal dari air hujan ke danau atau ke laut secara

alami. Seperti dinyatakan oleh Kondotie dan R. Syarif, 2010 bahwa DAS merupakan dasar pengelolaan untuk sumber daya air khususnya air permukaan. Dalam rangka memanen air hujan sebanyak mungkin, maka fungsi danau, situ, embung dan bendungan menjadi sumber air yang penting untuk dilestarikan karena periode penampungannya jauh lebih lama dibandingkan sungai yang secara alamiah akan mengalir. Secara alami sesuai hukum gravitasi, air akan mengalir dari hulu ke hilir DAS, dari gunung (daerah yang tinggi) menuju ke laut (daerah yang lebih rendah).

Di seluruh Indonesia ada kurang lebih 5.590 DAS baik yang berskala besar maupun kecil (Direktorat Sungai tahun 1994, diambil dalam Kondotie dan R. Syarif, 2010). Luas DAS beberapa sungai besar di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Jawa dapat dilihat pada Tabel 1. di bawah ini:

Tabel DAS Beberapa Sungai di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Jawa

Pulau	Luas Pulau (000 km²)	Nama DAS	Luas DAS (000 km²)	% luas DAS terhadap Luas Pulau (%)
Sumatra	474	Siak	11	2,32
		Indragiri	23	4,85
		Rokan	24	5,06
		Kampar	24,5	5,17
		Batang Hari	39	8,23
		Batu Kampar	47,2	9,96
		Musi	56,7	11,96
Kalimantan	539	Mentaya	5	0,93
		Lamandau	7,1	1,32
		Katinga	12	2,23
		Kahayan	14,2	2,63
		Barito	30,5	5,66
		Mahakam	65,1	12,08
		Kapuas	74,1	13,75
Jawa	132	Ciburit	1,1	0,83
		K. Pemali	1,3	0,98
		Citanduy	1,4	1,06
		Ciujung	1,6	1,21
		K. Lusi	1,6	1,21
		Citarum	2	1,52
		K. Progo	1,7	1,29
		K. Serayu	3	2,27
		Cimanuk	3,3	2,50
		Brantas	11,2	8,48
		Bengawan Solo	16,3	12,35

Sumber: Kondotie dan R. Syarif, 2010

Berdasarkan UU No 7 tahun 2004, pengelolaan sumberdaya air permukaan didasarkan pada apa yang disebut dengan Wilayah Sungai. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km². Didasarkan pada pengertian tersebut, sekitar 5590 DAS dibagi menjadi 133 Wilayah Sungai (WS). Penetapan Wilayah Sungai merupakan wewenang Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Sumber Daya Air Nasional. Sementara ditinjau dari kewenangan pengelolaannya, ke 133 WS tersebut dikategorikan menjadi (table 2):

- 1) Wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah yaitu mencakup WS Lintas Negara, WS Lintas Propinsi dan WS Strategis. Aspek/parameter yang digunakan untuk menentukan Wilayah Sungai Strategis adalah:
 - ukuran dan besarnya potensi sumber daya air pada wilayah sungai bersangkutan;
 - banyaknya sektor dan jumlah penduduk dalam wilayah sungai bersangkutan;
 - besarnya dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi terhadap pembangunan nasional; dan
 - besarnya dampak negatif akibat daya rusak air terhadap pertumbuhan ekonomi.
- 2) Wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu mencakup Wilayah Sungai Lintas Kabupaten.
- 3) Wilayah Sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu mencakup Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota.

Tabel 2. Tipologi Wilayah Sungai di Indonesia dan Kewenangan Pengelolaannya

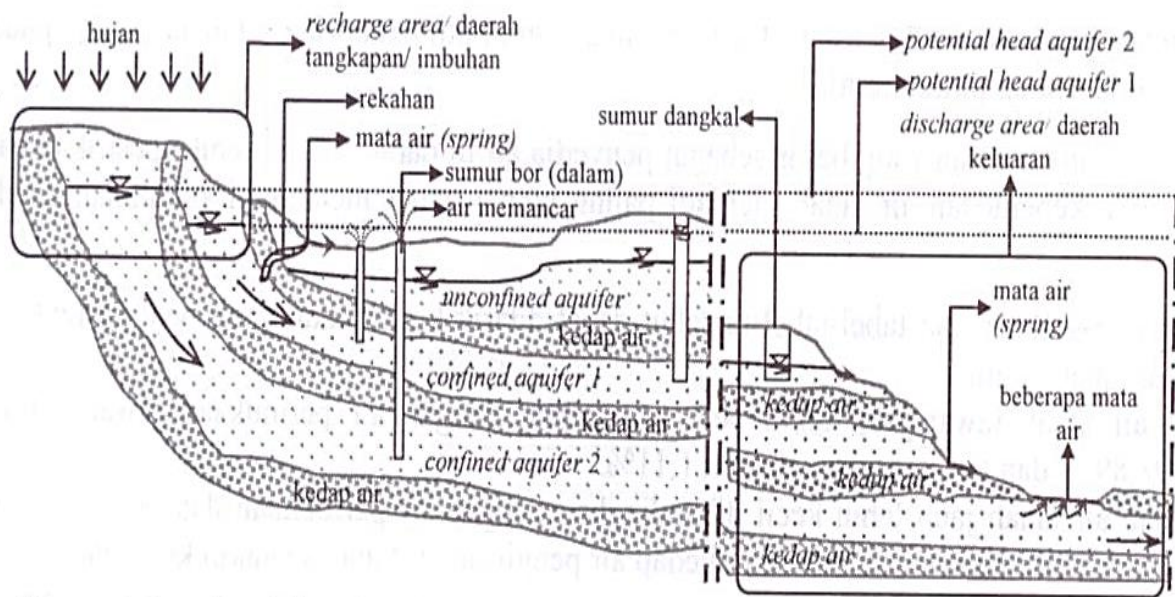
Wilayah Sungai	Jumlah	Total	Wewenang
Lintas Negara	5	69	Pemerintah
Lintas Provinsi	27		
Strategis Nasional	37		
Lintas Kabupaten/Kota	51	51	Pemerintah Provinsi
Dalam satu Kabupaten/kota	13	13	Pemerintah Kabupaten/Kota
TOTAL	133		

Sumber: Per Men PU 11A/PRT/M/2006

c. Air tanah

Air tanah dapat dijumpai di hampir semua tempat di bumi, bahkan di bawah gurun pasir yang paling kering atau di bawah tanah yang di lapisi salju atau es. Sebagian besar air tawar adalah berupa air tanah yang mengisi *unconfined aquifer* (akuifer bebas) maupun *confined aquifer* (akuifer terkekang). *Aquifer* (kantong air yang berada dalam tanah)

bebas terbentuk ketika tinggi muka air tanah menjadi batas atas zona tak jenuh (*vadose zone*). Tinggi muka air tanah berfluktuasi bergantung pada jumlah dan kecepatan air hujan yang terinfiltrasi, pengambilan air tanah dan permeabilitas tanah (proses evaporasi). Sedang akuifer terkekang atau disebut dengan artesis terbentuk ketika air tanah dalam dibatasi oleh lapisan kedap air sehingga tekanan di bawah lapisan kedap air tersebut lebih besar daripada tekanan atmosfer (Gambar 6). Selain air yang terdapat di akuifer, sumber air tanah lainnya adalah mata air yang merupakan salah satu daerah pelepasan air tanah yang bersifat alami.



Gambar 6 Ilustrasi Sumber Air Tanah
(sumber: Grigg, 1996 dalam Rodoatie dan R. Syarif, 2010)

Air tanah mempunyai kapasitas yang besar (96%) dibandingkan dengan air permukaan (4%), meskipun demikian kecepatan pengisian air ke dalam tanah jauh lebih kecil dibandingkan yang menjadi air permukaan. Hal ini dikarenakan air tanah memiliki kecepatan aliran (infiltrasi dan perkolasi) relatif sangat kecil yaitu mulai dari 10^{-13} m/detik untuk jenis tanah lempung sampai 10^{-2} m/detik untuk jenis tanah pasir. Sementara kecepatan run off (aliran air permukaan) bisa mulai 0 (artinya diam) sampai bisa mencapai 10 m/detik bergantung pada kemiringan lahan, tinggi aliran, penutup lahan dan material yang dibawa dalam aliran air (Kondotie dan Syarif, 2006). Oleh sebab itu, meskipun air tanah tersedia dalam jumlah yang besar, pemanfaatan air tanah sebaiknya tidak melebihi kapasitas air yang mampu diserap oleh tanah melalui infiltrasi dan perkolasi. Pengambilan air tanah yang berlebihan akan menyebabkan penurunan

kuantitas ketersediaan air tanah yang membutuhkan waktu yang lama untuk pengisian kembali. Seperti dikatakan Kondotie, air tanah meskipun termasuk sumberdaya alam yang terbaharui, namun proses pembentukannya memerlukan waktu yang lama, mencapai puluhan hingga ribuan tahun.

Tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan air tanah di Indonesia antara lain adalah terbatasnya pasokan dari sumber air permukaan, kualitas air permukaan yang buruk, terbatasnya infrastruktur distribusi air permukaan serta kebutuhan akan air yang terus menerus meningkat yang tidak mampu dilayani oleh pemerintah. Di wilayah yang sama sekali belum terlayani distribusi jaringan air minum perpipaan oleh pemerintah, masyarakat harus berupaya sendiri mendapatkan air bersih, dan air tanah menjadi pilihan pertama dalam memenuhi kebutuhan akan air bersih. Selain itu, rendahnya kualitas air minum yang diproduksi dan belum terjaminnya kontinuitas distribusi air minum, pemenuhan kebutuhan khususnya untuk air minum justru banyak dimanfaatkan oleh pengusaha dengan mengeksploitasi sumber air mata air maupun air artesis melalui produksi air dalam kemasan. Data tahun 2004 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan konsumen air kemasan terbesar ke delapan di dunia dengan konsumsi lebih dari 7 milyar liter per tahun dan dengan penjualan yang semakin meningkat pesat (ICBWA, *Global bottled water statistics*, Diambil dari Stalker, 2007).

Data tahun 2009 menunjukkan bahwa cakupan pelayanan air minum di perkotaan sebesar 47,23% dari total penduduk perkotaan, sementara di perdesaan hanya mencapai 11,55% dari total penduduk perdesaan. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di Indonesia masih sangat bergantung pada sumber air tanah sebagai sumber air bersih.

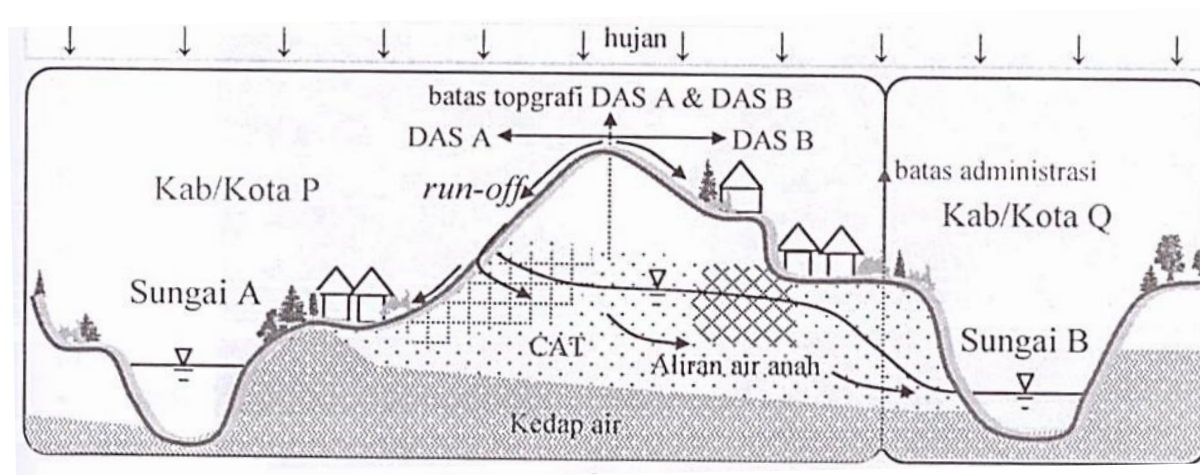
Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2004, pengelolaan sumberdaya air tanah didasarkan pada Cekungan Air Tanah (CAT) yaitu suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. Tidak seperti pembagian Wilayah Sungai, wilayah Indonesia tidak dibagi habis dalam bentuk CAT. Jumlah cekungan air tanah di Indonesia sebanyak 421 CAT terutama tersebar di pulau-pulau besar dengan total potensi air tanah sekitar 517 milyar m³/tahun. Data potensi air tanah pada CAT di Indonesia per Pulau dapat dilihat pada Table 3 berikut ini:

Tabel 3 Potensi Air Tanah pada CAT di Indonesia per Pulau

Pulau/ Kepulauan	Jumlah CAT	Luas CAT (km ²)	Potensi air tanah pada Akuifer (juta m ³ /tahun)		
			Bebas	Tertekan	% Tertekan terhadap Bebas
Bali	8	4.381	1.577	21	1,3
NTB	9	9.475	1.908	107	5,6
NTT	38	31.929	8.229	200	2,4
Maluku	68	25.830	11.943	1.231	10,3
Sulawesi	91	37.778	19.694	550	2,8
Jawa & Madura	80	81.147	38.851	2.046	5,3
Kalimantan	22	181.362	67.963	1.102	1,6
Sumatera	65	272.843	123.528	6.551	5,3
Papua	40	262.870	222.524	9.098	4,1
Total	421	907.615	496.217	20.906	4,2

Sumber: KepPres 26 tahun 2011

Seperti diketahui bahwa penentuan batas Cekungan Air tanah bukan didasarkan pada batas administrasi melainkan pada batas hidrogeologis, karena itu banyak CAT yang keberadaannya melintasi dua atau lebih wilayah administrasi. Batas CAT juga tidak sama dengan batas DAS, karena penentuan batas DAS didasarkan pada garis kontur tertinggi (Gambar 7). Dari total 421 CAT yang ada di Indonesia, terdapat 5 (lima) CAT yang berada pada Lintas Negara, 36 Lintas Propinsi, 176 Lintas Kab/kota dan 204 dalam Kabupaten/Kota.



Gambar 7 Penentuan Batas DAS dan Batas Cekungan Air Tanah dan kaitannya dengan Batas Administrasi (sumber; Kondotie dan Syarif, 2010)

2.3. Daya Air

Berdasarkan pengertiannya, daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya. Manusia dan semua makhluk hidup lainnya membutuhkan air untuk hidup. Untuk minum, manusia membutuhkan sekitar 8 liter per hari, tumbuhan dan binatang juga mutlak membutuhkan air.

Selain untuk pemenuhan kebutuhan minum, manusia juga memerlukan air untuk kegiatan lainnya. Secara umum, manfaat dari air untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kegiatannya dapat dibedakan menjadi pemenuhan kebutuhan domestik dan pemenuhan kebutuhan non domestik. Kebutuhan air domestik artinya kebutuhan air untuk rumah tangga dan pelayanan umum seperti minum, mandi, cuci, masak dan lain-lain. Kebutuhan air domestik ini bergantung pada tipologi wilayahnya, seperti kebutuhan air domestik per kapita penduduk di perkotaan akan berbeda dengan kebutuhan air domestik penduduk di perdesaan. Sementara, kebutuhan air non domestik adalah kebutuhan untuk usaha pertanian, peternakan, perikanan, industri, dan pengelolaan kota seperti untuk penggelontoran sungai, pemadam kebakaran, dan pertamanan.

Untuk menghitung kebutuhan air domestik suatu wilayah, dilakukan dengan cara mengalikan jumlah penduduk dengan rata-rata kebutuhan air per orang per hari. Di Indonesia, standard yang biasa digunakan untuk parameter kebutuhan air/orang/hari adalah menggunakan angka konsumsi air yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum dalam Petunjuk Teknis Penyediaan Sistem Air Bersih Perkotaan 2003 seperti dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 4 Konsumsi air per kapita berdasarkan Tipologi Wilayah

No	Kategori Kota	Jumlah Populasi (jiwa)	Konsumsi air (liter/orang/hari)
1	Metropolitan	>1.000.000	190
2	Large city	500.000 – 1.000.000	170
3	Medium City	100.000 – 500.000	150
4	Small City	20.000 – 100.000	130
5	Kecamatan/sub regional city	3.000 – 20.000	100
6	Rural City	>2000	60

Sumber: Nurhayati, 2009

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 Tanggal : 25 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, menyebutkan bahwa kebutuhan minimal setiap orang akan air bersih per hari adalah 60 liter atau 0,06 m³.

Selain untuk kegiatan domestik dan non domestik, air juga dimanfaatkan sebagai sumber energi misalnya untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Indonesia yang kaya akan sungai besar juga memanfaatkan sumberdaya air untuk sarana transportasi baik untuk transportasi penumpang maupun transportasi niaga. Sumber air seperti danau, situ, air terjun dan sungai juga merupakan potensi bagi pengembangan pariwisata dan beberapa dapat digunakan sebagai sarana olah raga. Standar kebutuhan air untuk masing-masing kegiatan yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Standar Kebutuhan Air Ditinjau dari Jenis Kegiatannya

NO	JENIS KEGIATAN	STANDAR KEBUTUHAN AIR
1	Perikanan	350 liter/hari/ha
2	Peternakan	
	- unggas	0,6 liter/ekor/hari
	- sapi/kerbau/kuda	40 liter/ekor/hari
	- kambing/domba	5 liter/ekor/hari
	- babi	6 liter/ekor/hari
3	Pertanian	300 m ³ /ha/tahun
4	Industri	0,4 liter/detik/ha
5	Perdagangan dan Jasa	
	- Niaga Kecil	900 liter/unit/hari
	- Niaga Besar	5000 liter/unit/hari
6	Pemeliharaan Sungai/ Penggelontoran	360 liter/kapita/hari; 300 liter/kapita/hari
7	Fasilitas umum dan sosial	30% kebutuhan domestik
8	Pemadam Kebakaran	14% kebutuhan domestik
9	Pemeliharaan Taman Kota/ Penghijauan	3% kebutuhan domestik
10	Kehilangan air	28% kebutuhan domestik

Sumber: Departemen Pekerjaan Umum dalam Nurhayati, 2009

Standar kebutuhan air untuk kawasan industry juga dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian melalui Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 35/M-IND/PER/3/2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri yaitu sebesar 0,55 – 0,75 liter/detik/ha.

Kemampuan air dalam menjaga keseimbangan lingkungan yang sering dilupakan adalah bahwa secara alamiah, air memiliki kemampuan untuk mengasimilasi limbah. Meskipun demikian, kemampuan asimilasi tersebut terbatas. Kemampuan mengasimilasi limbah ini biasa disebut bioasimilasi yang didefinisikan sebagai kemampuan dari lingkungan alam untuk mengabsorpsi berbagai material, termasuk limbah antropogenik, dalam konsentrasi tertentu tanpa mengalami degradasi (Cairns, 1977 dalam Cairns, 1999). Kemampuan asimilasi limbah pada sungai dipengaruhi oleh temperatur air, tekanan udara permukaan, debit sungai, dan kualitas sungai pada suatu waktu tertentu. Pencemaran air terjadi apabila zat, energi, makhluk hidup, atau komponen lain yang terkandung dalam air limbah tidak mampu lagi diserap oleh air sungai. Artinya makin buruk kualitas air, makin kecil kemampuan air tersebut mengasimilasi limbah yang masuk. Pembuangan limbah ke dalam/bawah permukaan tanah, apabila tidak mampu lagi diabsorpsi oleh media tanah dan air tanah, akan menyebabkan terjadinya pencemaran air tanah. Perubahan kualitas air tersebut dapat membahayakan kelangsungan hidup makhluk hidup di dalamnya maupun manusia yang menggunakannya sebagai sumber air bersih. Badan air yang sudah tercemar tidak dapat lagi digunakan sesuai peruntukannya tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu.

Sementara kondisi di Indonesia sangat memprihatinkan, sungai yang merupakan sumber air potensial, secara bersamaan juga dimanfaatkan sebagai media pembuangan limbah cair baik dari limbah industri dan non domestik lainnya maupun dari limbah domestik. Seperti diketahui, sistem drainase air hujan dan drainase limbah sampai saat ini hampir seluruh kota belum terpisah. Kondisi kualitas air sungai juga makin tercemar akibat buruknya pengelolaan sampah. Sampah yang tidak terangkut biasanya dibuang ke sungai atau dibuang sembarangan di berbagai lahan kosong yang apabila terkena aliran permukaan, sampah dan limbah cairnya juga akan terbawa mengalir ke sungai. Akhirnya sungai yang sebenarnya merupakan sumber air yang potensial menjadi jarang digunakan sebagai sumber air baku.

Pencemaran air tanah juga sering terjadi karena sifat tanah yang memiliki pori-pori udara. Pada saat limbah cair terbuang atau berada di atas tanah, sebagian limbah akan terinfiltrasi ke dalam tanah bercampur dengan air tanah. Rembesan limbah cair ke dalam tanah dapat bersumber dari tumpukan sampah (seperti di lokasi TPA) yang membusuk, septic tank, areal persawahan, industri, pertambangan, badan sungai, selokan dan lain-lain.

Selain manfaat ekologis, dan sosial ekonomi yang dimiliki air, karena kegagalan manusia mengelolanya, air juga memiliki daya rusak yang tinggi. Berbagai bencana terkait dengan air misalnya banjir, longsor, penurunan muka tanah yang menyebabkan gedung-gedung miring, amblesan tanah, dan sebagainya. Pada akhirnya, air yang seharusnya memiliki manfaat bagi kehidupan manusia justru "seolah-olah" membawa kerugian bagi manusia. Dari uraian di atas jelas bahwa faktor manusia menjadi faktor utama penentu kuantitas maupun kualitas air yang diinginkan. Pemahaman tentang sifat dan karakteristik alami air menjadi dasar untuk dapat mengelola air dengan baik dan tepat.

III. ISU PENTING TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR DI INDONESIA

1. Berkaitan dengan upaya pengelolaan sumberdaya air dalam rangka mewujudkan ketahanan air nasional, pendekatan konsep daya dukung lingkungan dapat digunakan untuk menyusun strategi pengelolaannya. Dengan konsep ini, aspek ketersediaan sumberdaya air dipandang sebagai sisi supply dan aspek kebutuhan sumberdaya air dipandang sebagai sisi demand. Permasalahan lingkungan akan terjadi apabila beban pada lingkungan karena manusia dan aktivitasnya melebihi daya dukung lingkungannya. Ketahanan air nasional terjadi pada saat kondisi daya dukung sumberdaya air tidak terlampaui secara berkelanjutan.

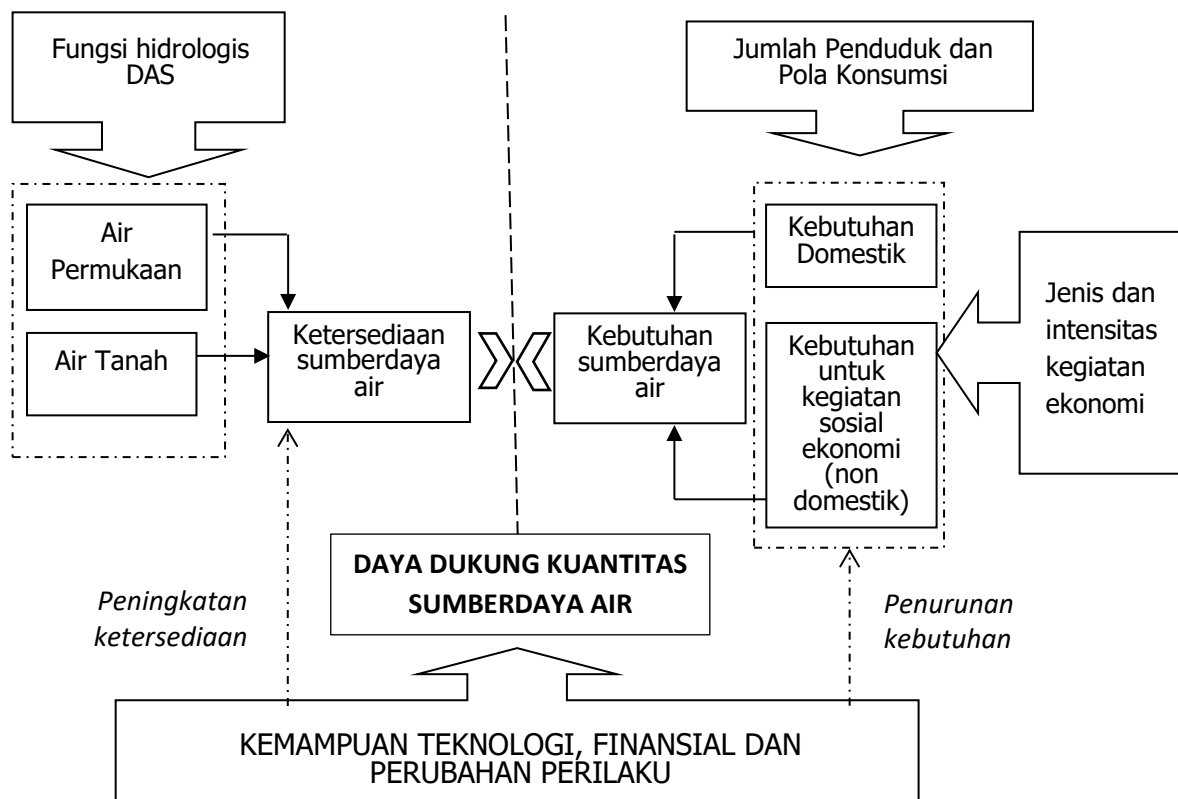
Seperti telah dibahas dalam bab sebelumnya, keberadaan air di suatu wilayah terjadi karena berlangsung suatu proses yang bersifat alami. Proses alami melalui siklus hidrologi tersebut akan mengalami perubahan atau bahkan ketidak seimbangan (gangguan) karena adanya campur tangan manusia. Sebagai suatu sumberdaya yang memiliki potensi terbarukan, degradasi sumberdaya maupun peningkatan daya rusak air tidak akan terjadi apabila perubahan/gangguan yang dialaminya tidak melebihi kemampuan air untuk memperbaruinya. Dengan kata lain, sumberdaya air merupakan sumberdaya yang terbatas ditinjau dari kuantitas maupun kemampuan mempertahankan kualitasnya.

Disisi lain, manusia sebagai pengguna sumberdaya memiliki tuntutan kebutuhan akan air untuk dapat hidup dan menjalankan aktivitasnya. Kebutuhan manusia akan air dapat dikatakan tidak terbatas. Seperti telah diuraikan sebelumnya, secara kuantitas kebutuhan air akan sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan pola konsumsinya. Ketersediaan air secara kuantitas, seringkali tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Ketersediaan sumber daya air untuk mendukung kehidupan

harus pula mampu memenuhi kriteria kebutuhan secara kualitas. Selain itu, syarat lain berkaitan dengan ketersediaan air adalah aspek kontinuitas. Dari aspek kontinuitas, harus ada keseimbangan antara jumlah air yang dapat disediakan dengan jumlah air yang dibutuhkan suatu wilayah. Apabila kondisi keseimbangan tersebut terlampaui, artinya kebutuhan air lebih besar dari jumlah air yang dapat disediakan maka syarat kontinuitas tidak terpenuhi.

Gambar 8. menunjukkan skema keterkaitan antara ketersediaan dan kebutuhan air dari aspek kuantitas di suatu wilayah. Pendekatan kewilayahan yang digunakan adalah Sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) mengingat proses hidrologi di daratan terjadi di wilayah tersebut. Pada Gambar 8 dapat dilihat ada input berupa teknologi, finansial (investasi) dan perubahan perilaku yang dapat menjadi input bagi ketersediaan maupun bagi kebutuhan air. Kedua input tersebut sendiri-sendiri maupun bersama-sama dapat mengubah kondisi (status) daya dukung sumberdaya air karena daya dukung adalah sesuatu yang bersifat dinamis, dapat terdegradasi atau punah apabila tidak dilestarikan dan sebaliknya dapat ditingkatkan kemampuannya. Seperti dikatakan oleh Arrow *et al* (1995 diambil dari Fatimah, 2009):

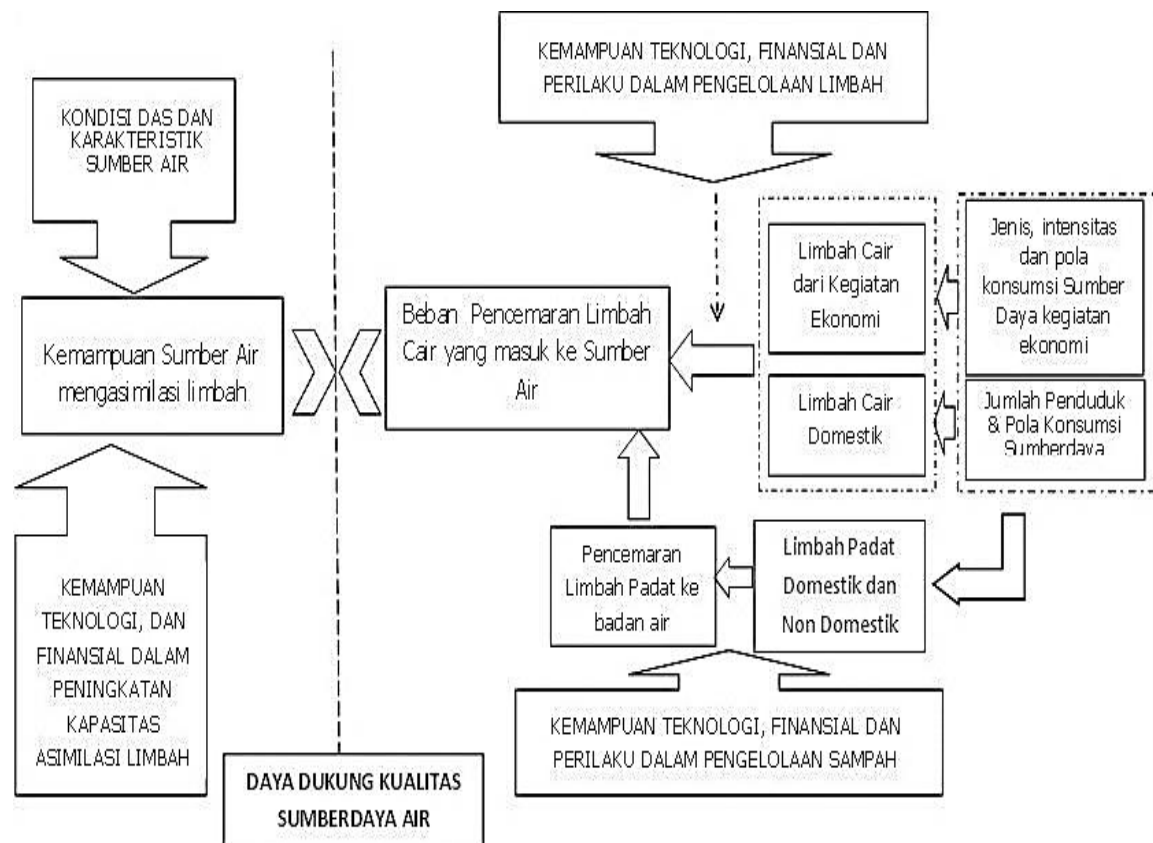
"carrying capacities in nature are not fixed, static, or single relations. They are contingent on technology, preferences, and the structures of production and consumption. They are also contingent on the ever-changing state of interactions between the physical and biotic environments".



Gambar 8 Daya Dukung Kuantitas Sumberdaya Air
(Sumber: Modifikasi dari Fatimah, 2009)

Sementara itu, seperti telah disebutkan sebelumnya, sumberdaya air juga berfungsi pula sebagai media pembuangan limbah cair dari kegiatan tersebut. Kualitas (kandungan cemaran) dan kuantitas (volume) limbah cair yang terbuang ke badan air akan mempengaruhi kualitas sumber daya air permukaan. Pada umumnya, beban limbah cair yang terbuang ke badan air berasal dari limbah domestik (kawasan permukiman) dan limbah kegiatan sosial ekonomi kota (seperti industri, perdagangan, rumah sakit, hotel dan sebagainya). Selain itu, limbah cair dapat berasal dari limbah padat yang tidak tertangani yang terbawa oleh aliran air permukaan. Dengan pendekatan daya dukung, kemampuan asimilasi limbah yang dimiliki oleh sumberdaya air dipandang sebagai sisi supply, sementara banyak limbahnya yang yang dibuang ke badan air dipandang sebagai sisi demand

Oleh karena itu, besarnya beban limbah cair dipengaruhi oleh jenis kegiatan yang ada, sistem pembuangan limbah cair serta tingkat penanganan pembuangan limbah padat seperti terlihat pada Gambar 9 berikut ini:



**Gambar 9 Daya Dukung Kualitas Sumberdaya Air
(Sumber: Modifikasi dari Fatimah, 2009)**

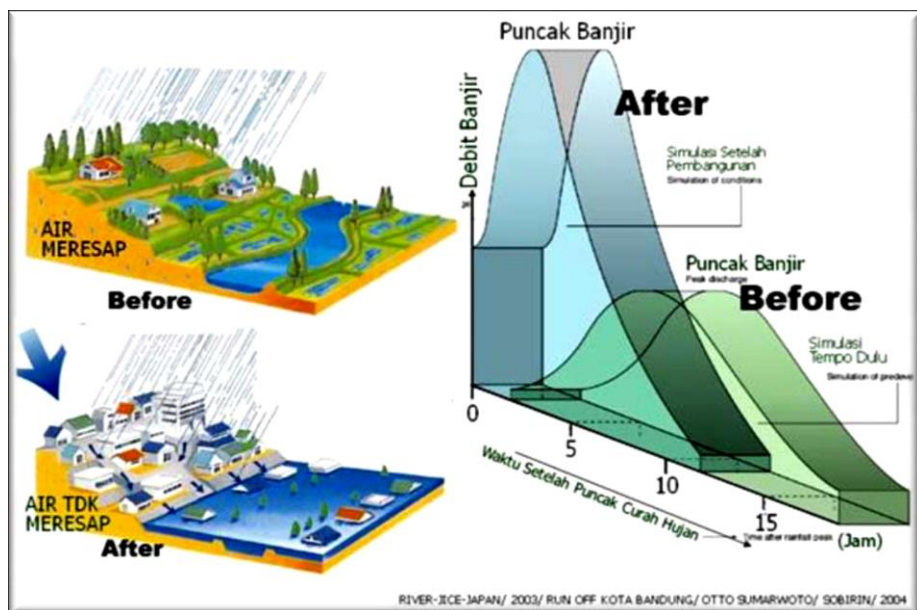
Faktor perilaku pada gambar 8 dan 9 mencakup perilaku manusia secara individu, kelompok maupun pemerintah dalam hal ini berkaitan dengan kinerja, kebijakan dan peraturan yang dihasilkan. Selain itu, dapat dilihat pada gambar 8 dan 9, factor teknologi dan kemampuan investasi juga memegang peranan penting dalam menentukan kondisi daya dukung sumberdaya air. Ke semua factor yang berpengaruh tersebutlah yang merupakan aspek-aspek dalam pengelolaan sumberdaya air secara menyeluruh.

- Indonesia merupakan Negara kepulauan yang karena letak geografisnya dan kondisi alamnya dengan banyak sungai dan gunung/pegunungan memiliki potensi sumberdaya air nasional yang melimpah. Namun demikian, berbagai permasalahan berkaitan dengan "daya rusak" air seringkali terjadi seperti banjir (too much water), kekeringan (too little water), pencemaran air di hampir semua sungai, pencemaran air tanah, penurunan muka air tanah, longsor dan lain sebagainya. Sumber penyebab dari berbagai permasalahan sebenarnya dapat dirangkum sebagai berikut:

a. Perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali

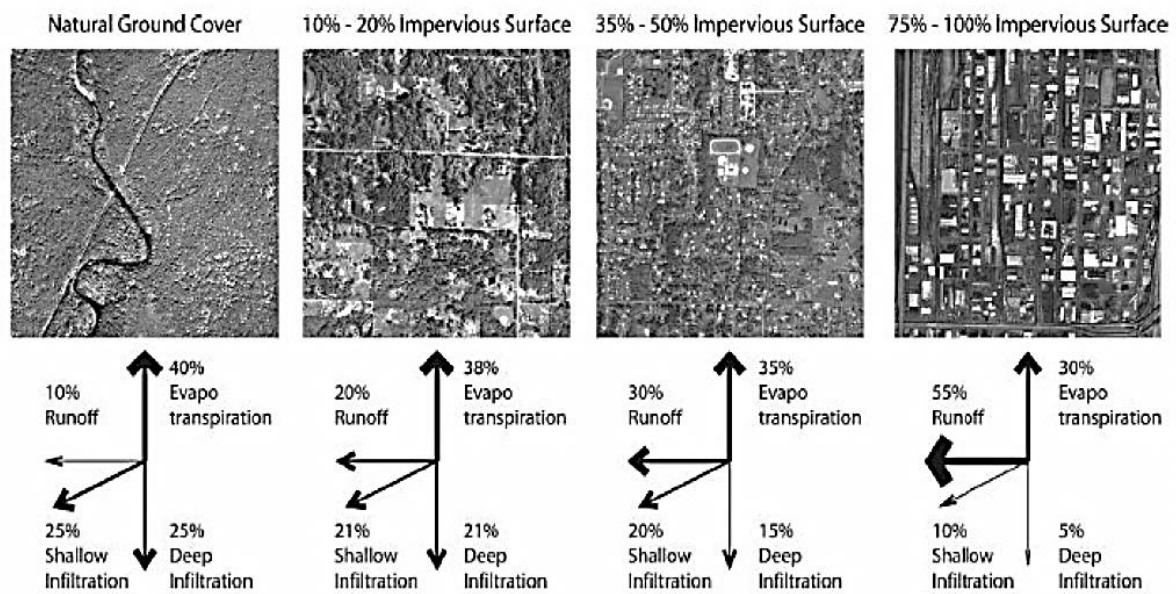
Air hujan lebih banyak menjadi aliran permukaan dibandingkan diserap oleh tanah atau ditampung dalam tampungan alami dan buatan. Kondisi ini terjadi berkaitan erat dengan terjadinya perubahan lahan besar-besaran yang dilakukan dengan mengubah tutupan lahan alami (hutan, danau dan situ) menjadi tutupan lahan buatan (kawasan pertanian, perkebunan, permukiman, dan kawasan budidaya lainnya). Perubahan tata guna lahan ini akan mengubah kemampuan infiltrasi tanahnya. Sebagai gambaran, hutan primer memiliki kemampuan infiltrasi hampir 100% yang berarti seluruh curah hujan akan diserap tanah, sebaliknya kawasan perkotaan yang padat hanya memiliki kemampuan infiltrasi 10-20%. Perubahan tata guna lahan yang pesat sudah mulai pula merambah wilayah hulu DAS yang seharusnya lebih berfungsi sebagai daerah resapan air maupun menghilangkan keberadaan situ-situ sebagai penampung air permukaan. Secara alamiah, air permukaan hampir seluruhnya akan mengalir ke sungai dan anak sungainya.

Tingginya run off dan makin hilangnya penutup tanah akan menyebabkan tingginya potensi erosi di wilayah hulu dan gerusan tanah tersebut terbawa aliran permukaan sehingga menyebabkan sedimentasi di badan air maupun wilayah hilirnya. Sedimen yang masuk ke badan air (sungai, situ, danau) akan mengakibatkan penurunan kualitas air, pengurangan kapasitas dan debit aliran sungai. Apabila peningkatan aliran permukaan dan penurunan kapasitas badan air terus berlangsung, maka masalah lain akan terjadi yaitu banjir.



Gambar 10

Ilustrasi Perubahan Penggunaan Lahan dan Kaitannya dengan Kejadian Banjir



Gambar 11
Pengaruh perubahan tutupan lahan terhadap besaran Runoff dan Infiltrasi
(Sumber: Alberti, 2008)

b. Kurang layaknya ketersediaan infrastruktur keairan dan perkotaan lainnya

Ketersediaan infrastruktur keairan adalah komponen buatan berupa bangunan air untuk satu tujuan tertentu. Dalam konteks lingkungan sebagai suatu system, infrastruktur keairan dapat berupa komponen lingkungan alami atau komponen lingkungan buatan. Secara alami, alam telah menyediakan infrastruktur keairan seperti system sungai dan anak sungai dalam DAS, danau dan sebagainya. Meski demikian, keberadaan infrastruktur alami tersebut sering kali belum mampu menghantarkan ketersediaan SD Air sampai dapat dimanfaatkan secara optimum untuk kebutuhan lingkungan social ekonomi. Oleh sebab itu, upaya pembangunan infrastruktur buatan dibangun untuk mendukung tugas dan fungsi infrastruktur alami agar SD air dapat dimanfaatkan. Menurut Grigg, 1988, infrastruktur keairan adalah system fisik yang menyediakan transportasi air, pengantaran air, penyediaan dan pengisian air, pengairan, drainase penahanan, penyimpanan, bangunan air dan fasilitas air untuk public lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam lingkup social dan ekonomi. Beberapa contoh infrastruktur keairan antara lain:

1) System jaringan drainase

Sistem drainase berfungsi untuk membuang air baik di perkotaan maupun pedesaan agar tidak terjadi genangan atau banjir. Caranya yaitu dengan pembuatan saluran yang dapat menampung dan mengalirkan air hujan untuk dialirkan ke system yang lebih besar. Idealnya, sebelum air dalam system drainase buatan dialirkan ke system yang lebih besar (misal sungai atau laut), perlu dilakukan pengolahan limbah terlebih dahulu. Sistem drainase di Indonesia sebagian besar masih belum memisahkan antara system drainase air hujan dengan system drainase limbah cair domestic dan non domestic. Dengan kata lain, dapat dipastikan limbah cair yang dibuang ke sungai atau lain mengandung cemaran tinggi. Aturan tentang baku mutu limbah cair yang boleh dibuang untuk beberapa kegiatan, misal industry, rumah sakit dan lain-lain memang telah diatur, sehingga diwajibkan mengalirkan ke IPAL sebelum dibuang. Sementara limbah cair domestik yang berjumlah besar dan mengandung cemaran tinggi jarang diolah terlebih dahulu.

2) Sistem jaringan air bersih

Sistem jaringan air bersih berfungsi untuk mendistribusikan air bersih ke konsumen. Sistem jaringan air bersih terdiri dari sumber air, conveyor, tampungan air baku, Water Treatment Plant (WTP), tampungan air bersih, dan jaringan transmisi serta distribusi. Sistem jaringan air bersih di Indonesia belum mampu menjangkau seluruh wilayah. Bahkan di kawasan perkotaan sekalipun yang seharusnya berdasarkan ketentuan yang ada wajib melayani seluruh warganya, pemerintah belum mampu menyediakannya. Pada akhirnya masih banyak penduduk di Indonesia yang memanfaatkan air tanah sebagai sumber air bersih dan pengambilan air tanah secara individu inilah yang sulit dikontrol. Selain itu, air bersih yang didistribusikanpun belum terjamin kualitas maupun kuantitasnya, sehingga konsumsi air dalam kemasan di Indonesia sangat besar. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa air kemasan bersumber dari mata air maupun penyedotan air tanah dalam yang diselenggarakan melalui ijin hak guna usaha.

c. Lunturnya nilai-nilai social budaya masyarakat terhadap air

Dari beberapa kajian tersebut sejarah kebudayaan masyarakat di Indonesia, pemahaman terhadap pentingnya air bagi kehidupan sudah membudaya dalam kehidupan masyarakat sejak jaman dulu. Pemahaman terhadap pemaknaan air,

memiliki akar yang kuat dalam masyarakat Indonesia. Pada zaman Hindu, air disebut sebagai *tirta amerta*. Tirta adalah air. Sedangkan amerta adalah bentuk negasi dari merta, kematian. Jadi berarti, tirta amerta adalah air antikematian, lazimnya, air kehidupan.

Pentingnya air, disimbolkan secara spatial dalam penamaan daerah-daerah di beberapa wilayah. Di Pasundan, hampir semua kota dan desa memakai nama yang berawalan ci - , yang berarti air, atau pun bisa diartikan sungai. Pada masyarakat Melayu atau Minangkabau, terdapat banyak tempat yang menggunakan nama air, seperti Air Bangis dan Air Hadidi. Setali tiga uang dengan yang disebut sebelumnya, masyarakat Jawa juga menamakan beberapa daerah dengan nama air, sebut saja Banyumas dan Banyutibo. (Sumardjo, Jakob. *Kompas*, 14/11/09)

Bagi masyarakat Palembang, air bahkan memiliki peran penting dalam menentukan letak pemukiman. Sifat air yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat rendah dijadikan falsafah hidup masyarakat. Mereka mengenal konsep *ulu-ulak* (hulu-hilir). Dalam konsep ini dikenal adanya aturan bahwa pendirian rumah yang pertama dalam suatu perkampungan harus terletak di hulu. Konsep ini memberikan suatu penghargaan atau penghormatan kepada orang yang lebih tua untuk tinggal di bagian yang lebih tinggi. Hal ini berarti, peran orang tua sebagai pengayom bagi yang lebih muda. (Purwanti, Retno: 2010)

Bagi masyarakat Sunda, air pun mempengaruhi falsafah masyarakat dalam ritus dan upacara kepercayaan. Bagi masyarakat Sunda, mata air dalam tempat-tempat tertentu, seperti delta-delta sungai adalah disebut mata air kabuyutan yang keramat dan dipercayai mendatangkan berkat. Dalam ritual-ritual kampung, tak jarang nasi atau bubur yang akan dijadikan kenduri bersama harus dimasak menggunakan air kabuyutan ini. Hal ini berarti air merupakan berkah hidup yang akan membawa kelestarian hidup di dunia.

Berbeda dengan di Pasundan, masyarakat Bali mengenal konsep *Tri Hita Karana*. Konsep ini biasanya hidup pada organisasi pengelola pengairan pertanian yang dikenal dengan nama subak. Subak sendiri diperkirakan dikenal sejak abad kesembilan, seperti tersurat dalam prasasti Raja Purana yang berangka tahun saka 994 atau 1072 Masehi. Tri Hita Karana adalah sebuah tatanan nilai. Ia dimaknakan sebagai 'tiga penyebab kebahagiaan', mengajarkan pada manusia untuk

mengharmoniskan hubungannya secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal dalam bentuk bhakti, sujud kepada sang pencipta, sedangkan dalam dimensi horizontal terwujud dalam perilaku asah-asih-asuh terhadap sesama manusia dan peduli pada lingkungan.

Dalam masyarakat Bali yang agraris, Tri Hita Karana menjelma dalam perilaku keseharian seorang petani sebagai pusat pelaku atau subjek budaya berupa *parhyangan*, *pawongan* dan *palemahan*. *Parhyangan* berarti pembangunan dan penjagaan kawasan hulu air. *Pawongan* berarti pemenuhan rasa adil dan kerukunan di antara sesama. *Palemahan* secara konkrit terwujud dalam pemeliharaan hal-hal pertanian, seperti lahan garapan dan saluran irigasi air. (Sumarta, I Ketut: *Kompas*, 4/6/94)

Dalam dimensi waktu, air merupakan persoalan yang terus diupayakan kelestariannya dari waktu ke waktu. Air dijaga agar berguna bukan memusnahkan dan mendatangkan bencana. Pada era Majapahit (abad keempat belas), terdapat banyak waduk yang mengelilingi kota. Trowulan, sebagai ibukota kerajaan, telah dilengkapi dengan kolam buatan, kanal-kanal, dan waduk untuk mengelola air di daerah itu. Selain sebagai irigasi, waduk-waduk itu berguna sebagai pengatur air dan pencegah banjir.

Demikian pula saat JP Coen menjadi Gubernur Jenderal, di Batavia ia membuat kanal untuk mengendalikan air sekaligus berfungsi untuk pelayaran, pengairan, sanitasi, dan pertahanan. Masalah air tetap diperhatikan pemerintah jajahan hingga pada abad kesembilan belas dibentuk Dinas Pengairan Hindia Belanda, sampai pada jawatan air milik swasta. Di Yogyakarta pada Tahun 1943, demi mencegah rakyatnya dipaksa untuk romusha, Sri Sultan Hamengku Buwono IX memerintahkan rakyatnya untuk membangun Selokan Mataram. Selokan Mataram merupakan jaringan irigasi yang menghubungkan Kali Progo dengan Kali Opak sepanjang 30 km.

Masyarakat di Papua bahkan menganggap sumber air sebagai ibu orang yang paling dihormatinya. Mencemari sungai dan sumber air lainnya merupakan hal yang tabu untuk dilakukan.

Cara pandang budaya masyarakat yang memposisikan air sebagai sumber kehidupan membawa konsekuensi pada kehati-hatian penggunaan air maupun dalam merusak alam/sumber air. Pada masyarakat tradisional, kebutuhan air menjadi mutlak, air berguna untuk memproduksi hasil pertanian untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Pandangan tentang air sebagai sumber kehidupan membawa konsekuensi pada upaya masyarakat secara bersama-sama baik melembaga atau tidak untuk menjaga kelestarian sumberdaya air yang ada di sekitar tempat mereka hidup. Kesadaran untuk menjaga air yang ada di sekitar kita menjadi sesuatu keharusan, karena memang tidak pilihan lain untuk memperoleh air bagi kehidupan.

Saat ini pandangan ini sudah berbeda, nilai social budaya terhadap air sudah mulai digeser dengan nilai ekonomi air. Secara alamiah, air akan bergerak dari tempat yang atas ke tempat yang lebih rendah. Namun, dengan adanya teknologi, kemudahan aksesibilitas dan pergeseran dari kegiatan pertanian ke non pertanian, air dapat diperoleh dari luar wilayah bahkan yang jauh sekalipun. Misalnya, masyarakat di Jakarta merasa kurang perlu memelihara Sungai Ciliwung atau sungai lain yang melewatinya, karena menganggap sumber air kehidupan bagi mereka bukan dari sungai Ciliwung. Fenomena air kemasan dengan segala macam ukuran dan dapat diperoleh dengan mudah dimanapun, mengubah pandangan juga bahwa air bukan sesuatu yang harus dijaga keberadaan di sekitar lingkungan kita.

Kedua faktor penyebab permasalahan keairan yang pertama dan kedua tersebut di atas sebenarnya berkaitan erat dengan substansi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Seperti diketahui, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disusun berdasarkan batas administrasi dan menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan yang wajib ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan. Salah satu muatan dalam rencana tata ruang adalah rencana struktur dan rencana pola ruang. Rencana pembangunan dan pengembangan sistem jaringan infrastruktur termasuk dalam rencana struktur ruang, sementara penggunaan lahan termasuk dalam rencana pola ruang. Dilain pihak, tata ruang air dibatasi oleh batas hidrologi dan geologi yang bersifat alami dan bukan batas administrasi. Didasarkan pada hal tersebut, dalam proses penyusunan RTRW, analisis tentang daya dukung sumberdaya air menjadi bahan pertimbangan utama dalam menetapkan struktur ruang maupun pola ruang. Selain itu, yang sering sekali dilupakan dalam RTRW adalah perkiraan dampak berupa

limbah cair dan padat yang dihasilkan dari pertambahan intensitas kegiatan yang direncanakan, yang disandingkan dengan kemampuan daerah (teknologi dan investasi) dalam menyediakan pelayanan pengolahannya. Hal lain yang perlu dilakukan adalah sinkronisasi antar RTRW (disusun berdasarkan batas administrasi) karena masing-masing memanfaatkan sumberdaya air maupun lahan yang secara alamiah memiliki hubungan sebab akibat baik secara hidrologis, maupun hidrogeologis. Oleh karena itu, sinergitas kerjasama kelembagaan antar daerah dalam pengelolaan sumberdaya menjadi factor penting untuk keberhasilan keberlanjutan sumberdaya air.

Didasarkan pada uraian diatas, pemanfaatan sumberdaya air sebagai sumber kehidupan bagi manusia yang tidak dikelola secara terpadu akan menimbulkan berbagai macam konflik antara lain:

1. Konflik antar kawasan, daerah, propinsi bahkan Negara
Konflik antar kawasan misalnya adalah antara kawasan hulu dan kawasan bagian hilir DAS berkaitan dengan fungsi kawasan dalam siklus hidrologi. Konflik antar Negara dapat terjadi mengingat beberapa DAS dan Cekungan Air Tanah berada pada lintas Negara.
2. Konflik social dan budaya
Nilai-nilai social budaya masyarakat yang masih ada seringkali berbenturan dengan proses industrialisasi dan berkembangnya masyarakat urban yang juga menempatkan air sebagai media pembuangan limbah. Pencemaran atau kekeringan sungai dan sumur-sumur masyarakat akibat pembangunan di sekelilingnya seringkali menyebabkan penolakan terhadap keberlangsungan pembangunan tersebut.
3. Konflik pengelolaan antar instansi
Nilai strategis dari sumberdaya air bagi keberlangsungan hidup, alam dan kegiatan social ekonomi mendorong instansi-instansi terkait menyusun rencana dan kegiatan terkait dengan pengelolaan SD air sesuai dengan tupoksi dan kewenangan masing-masing. Namun demikian, belum ada keterpaduan diantaranya, bahkan seringkali menjadi tumpang tindih, tidak saling mendukung atau bahkan bertolak belakang. Pada akhirnya manfaat (outcome) yang dihasilkan belum optimal
4. Konflik pemanfaatan antar pemangku kepentingan
Konflik pemanfaatan seringkali terjadi berkaitan dengan adanya perbedaan kebutuhan baik jumlah (kuantitas) maupun kualitas air, sementara sumber air yang dimanfaatkan sama.

5. Konflik antara kebijakan pembangunan ekonomi dan kebijakan pelestarian sumberdaya alam.

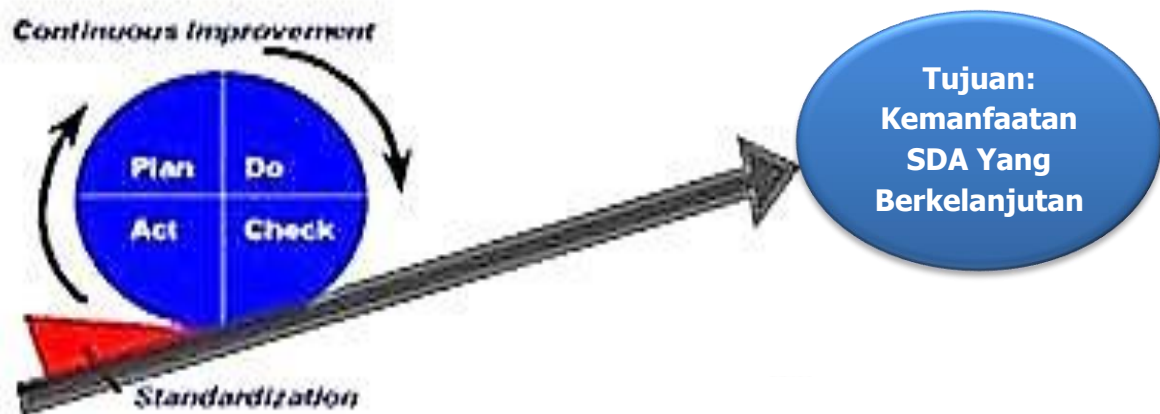
Konflik ini hampir terjadi di semua Negara, di satu sisi upaya strategis dan percepatan pembangunan ekonomi sangat diperlukan dan mendesak untuk dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dilain pihak upaya pelestarian sumberdaya alam juga bersifat strategis mengingat sudah banyak sekali bencana lingkungan terjadi akibat kerusakan lingkungan.

IV. KONSEP GRAND DESIGN PENGELOLAAN SUMBERDAYA TERPADU

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 menyebutkan bahwa pengelolaan sumberdaya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. Pengertian tersebut mengandung arti bahwa tahapan kegiatan dalam proses pengelolaan mencakup:

1. Perencanaan pengelolaan
2. Pelaksanaan
3. Pemantauan
4. Evaluasi

Meskipun demikian sebagai suatu proses yang berkelanjutan, hasil evaluasi yang dilakukan seharusnya merupakan input bagi penyusunan rencana pengelolaan. Demikian secara terus menerus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya air, dimana demand akan kuantitas dan kualitas sumber daya air meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan kegiatannya serta tingkat social ekonomi masyarakat, maka tujuan yang akan dicapai dalam pengelolaan sumberdaya air juga tidak memiliki ukuran secara kuantitatif melainkan lebih bersifat kualitatif. Seperti juga dinyatakan dalam Undang undang No 7 tahun 2004, bahwa tujuan pengelolaan sumberdaya air adalah mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, proses kegiatan pengelolaan sumber daya air dapat menggunakan konsep siklus PDCA yang dikembangkan oleh Shewhart dan kemudian dilanjutkan oleh Deming. Seperti dikatakan oleh Poerwanto, H., (www.hendrakualitas.web.id diunduh tanggal 30 Agustus 2012), siklus PDCA adalah alat yang bermanfaat untuk melakukan perbaikan secara terus menerus tanpa berhenti (*Continuous Improvement*). Secara skematik, tahapan proses pengelolaan sumber daya air dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 12 Ilustrasi Proses PDCA yang berkelanjutan
Sumber: www.hendrakualitas.web.id

Seperti diuraikan sebelumnya, banyak manfaat sumberdaya air antara lain adalah untuk dikonsumsi makhluk hidup, raw material atau material penunjang kegiatan ekonomi, media penetralisir (assimilator) limbah cair, sumber energy, prasarana transportasi, dll. Secara umum, manfaat tersebut dapat dibedakan menjadi 2 kategori besar yaitu:

1. Air sebagai barang konsumsi artinya ada sejumlah air secara kuantitas yang dimanfaatkan untuk dikonsumsi. Pemanfaatan ini akan mempengaruhi ketersediaan air secara kuantitas. Apabila konsumsi air dilakukan secara berlebihan, tidak terkontrol dan tidak tepat, pemanfaatan ini akan mengganggu ketersediaan air secara kualitas (kemampuan air memberikan jasa lingkungan).
2. Air sebagai bahan yang memiliki jasa lingkungan artinya pemanfaatan air tidak dengan cara pengurangan ketersediaan secara kuantitas. Pemanfaatan ini terutama akan mempengaruhi kualitas air (kemampuan air memberikan jasa lingkungan).

Kembali kepada konsep daya dukung sumberdaya air, **tujuan pengelolaan sumber daya air sebenarnya adalah upaya PDCA (Plan, Do, Check dan Act) dengan tujuan mempertahankan kondisi daya dukung SDA secara kuantitas, kualitas dan kontinuitas agar tidak terlampaui.** Menurut UU No 7/2004, upaya-upaya pengelolaan tersebut secara garis besar dikategorikan menjadi kegiatan-kegiatan:

1. Penyelenggaraan konservasi sumberdaya air

Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia

dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

2. Pendayagunaan sumber daya air

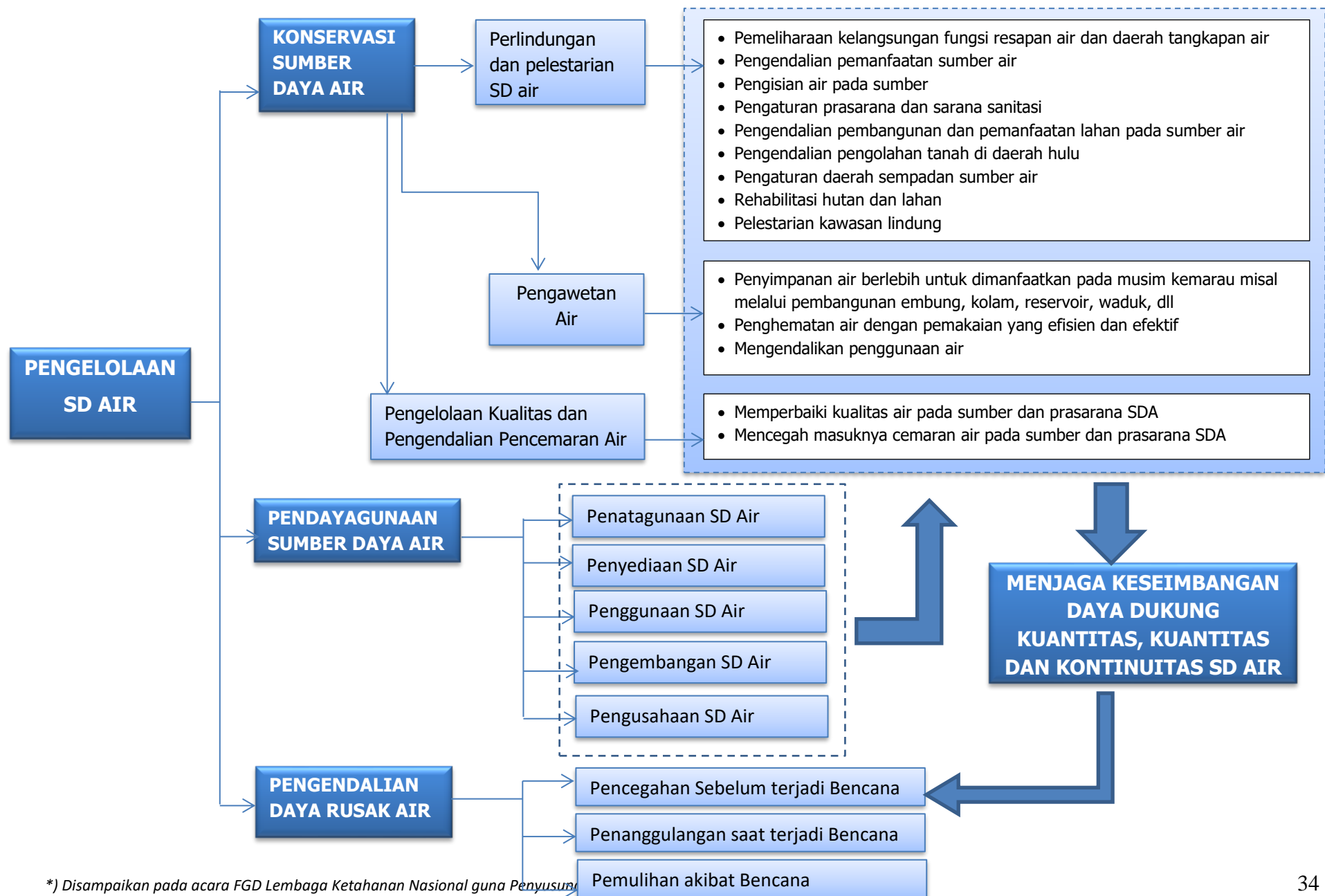
Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.

3. Pengendalian daya rusak air

Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.

Secara skematik, PLAN atau Rencana yang disusun dalam pengelolaan sumberdaya air dapat diilustrasikan pada Gambar 13. Mengingat adanya keterkaitan yang kuat antara sumberdaya air dan tanah, rencana pengelolaan sumberdaya air yang merupakan upaya menjamin keberlangsungan siklus hidrologi alami seharusnya menjadi acuan dasar bagi disusunnya rencana pembangunan baik di atas, pada dan di bawah permukaan tanah yang nantinya tertuang dalam RPJPD, RPJMD dan Rencana Tata Ruang Wilayah maupun RTR yang lebih rinci.

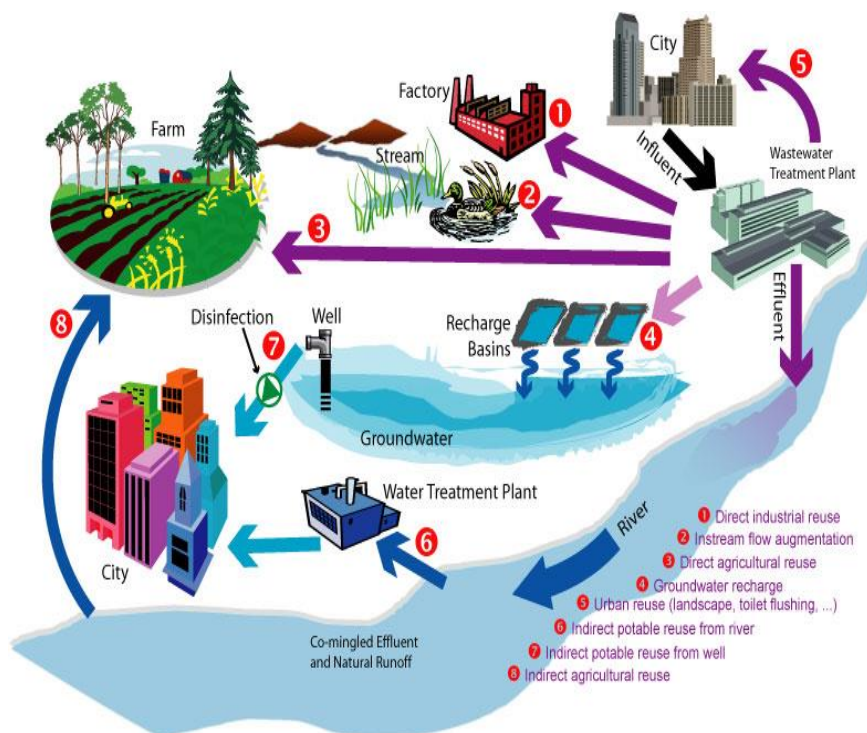
Seperti telah disebutkan sebelumnya, batas wilayah pengelolaan sumberdaya air khususnya air permukaan adalah Daerah Aliran Sungai. Batas teknis ruang sumberdaya air ini berbeda dengan batas administrasi dasar penyusunan RTRW. Oleh sebab itu, seharusnya Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air untuk masing-masing DAS sudah semestinya tersedia agar dapat menjadi acuan seberapa banyak air yang dapat dimanfaatkan masing-masing daerah administrasi dan akhirnya dijadikan dasar untuk menentukan rencana pembangunan apa yang layak dilakukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mampu didukung dengan supply air yang tersedia.



*) Disampaikan pada acara FGD Lembaga Ketahanan Nasional guna Penyusunan Sumber Daya Air Guna Mendukung Pembangunan Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional, Jakarta 4 September 2012

Hal lain yang perlu diingat dan telah diuraikan sebelumnya adalah bahwa pemanfaatan sumberdaya air dapat dioptimalkan dengan tanpa melampaui daya dukungnya melalui intervensi teknologi, finansial (investasi) dan perubahan perilaku konsumsi. Intervensi teknologi yang sudah banyak dilakukan antara lain Teknologi Water Recycling and Reuse. Air limbah dapat digunakan kembali untuk beberapa kegiatan seperti mengairi lahan pertanian, taman, dan lapangan golf; mendinginkan power plants dan oil refineries, toilet flushing, kegiatan konstruksi atau mengisi danau-danau buatan.

Secara skematik teknologi water recycling dan penerapannya dapat diilustrasikan sebagai berikut:



The Experience at Koele Golf Course, on the Island of Lanai, has used recycled water for irrigation since 1994. The pond shown is recycled water, as is all the water used to irrigate this world-class golf course in



The Irvine Ranch Water District provides recycled water for toilet flushing in high rise buildings in Irvine, California. For new buildings over seven stories, the additional cost of providing a dual system added only 9% to the cost of plumbing.

V. PENUTUP

Dari bahasan yang telah diuraikan dalam tulisan ini dapat dikatakan bahwa sumberdaya air memiliki manfaat yang tak ternilai bagi kehidupan manusia. Sebagai suatu unsur abiotic dalam bumi, keberadaan dan keberlangsungan air sangat bergantung pada apa yang dilakukan oleh manusia. Teknologi terkait dengan konservasi dan pemanfaatan sumber daya air telah banyak dikembangkan. Pemilihan teknologi yang tepat guna sesuai sangat ditentukan oleh karakteristik wilayah (alam, social dan budaya masyarakat) serta kemampuan dari finansial yang dimiliki. Namun demikian factor yang paling penting dalam keberhasilan pengelolaan sumberdaya air adalah factor manusia sebagai pengguna. Pelestarian kearifan local yang telah membudaya secara turun temurun dalam pengelolaan sumberdaya air perlu dilakukan. Akhir kata, untuk menuju terwujudnya ketahanan air secara nasional diperlukan manusia yang hemat penggunaan sumberdaya sekaligus memiliki kemampuan inovasi untuk mengembangkan teknologi-teknologi baru di bidang pengelolaan sumberdaya air dan lingkungan secara menyeluruh.



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

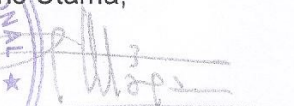
JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832306, FAKSIMILE (021) 3868553, Email : ditjansosbud@gmail.com

Nomor : B/ 2153/13/20/11/SET
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonon Sebagai Pembicara

Jakarta, 15 Agustus 2012

Yth. **Dr. Ir. Endrawati Fatimah**
Peneliti Senior Lembaga Penelitian Universitas Trisakti
di
Jakarta

1. Dasar:
 - a. Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja dan anggaran Lemhannas RI Tahun 2012.
 - b. Surat Perintah Gubernur Lemhannas RI Nomor : Sprin/1355/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Pembentukan Tim Kerja Kajian Aktual dengan judul **"Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mendukung Pembangunan Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional"**.
2. Sehubungan dasar tersebut di atas, mohon dengan hormat kesediaannya untuk hadir **sebagai pembicara (narasumber) dan menyiapkan naskah** dengan tema: **"Grand Design Pengelolaan Sumber Daya Air Nasional"**, pada acara *Focus Group Discussion (FGD)*, yang akan diselenggarakan pada:
 - a. hari/tanggal : Selasa, 4 September 2012
 - b. waktu : pukul 08.30 – 12.30 WIB
 - c. tempat : Ruang Rapat Nusantara 2 Gedung Trigatra Lt-I Lemhannas RI
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat
3. Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kesediaan Ibu diucapkan terima kasih.

a.n. Gubernur
Lembaga Ketahanan Nasional RI
Sekretaris Utama,

Drs. Chandra Manan Mangan, M.Sc
Pembina Utama (IV/e)

Tembusan:

1. Gubernur Lemhannas RI.
2. Wakil Gubernur Lemhannas RI.
3. Dejianstrat Lemhannas RI.
4. Karoren & Ku Settama Lemhannas RI.
5. Karoum Settama Lemhannas RI.

DEBIDJIAN STRATEGIK LEMHANNAS RI
DIREKTORAT PENGKAJIAN SOSBUD

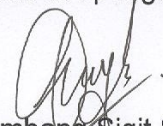
DAFTAR PESERTA *FOCUS GROUP DISCUSSION*

**"PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR GUNA MENDUKUNG
PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM RANGKA
KETAHANAN NASIONAL"**

Selasa, 4 September 2012

1. Irjen Pol Drs. Herry Haryanto, Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI.
2. Dr. Ir Djaja Murni Warga Dalam, DIPL. HE. M.Sc, Direktur Bina Pentatagunaan Sumber daya Air Dirjen Sumber Daya Air (PSDA), Kementerian Pekerjaan Umum RI, sebagai pembicara/nara sumber.
3. Bapak Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, sebagai pembicara/nara sumber.
4. Dr. Ir. Endrawati Fatimah Peneliti Senior Lembaga Penelitian Universitas Trisakti, sebagai pembicara/nara sumber.
5. Prof. Dr. Sudaryono, SU, Tenaga Pengkaji Bidang Sosbud Lemhannas RI, sebagai moderator.
6. Marsda TNI Ir. M. Amien Syahbudiono, M.Sc, Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Sumber Kekayaan Alam Lemhannas RI, sebagai penanggap.
7. Prof. Dr. Jana Tjahjana Anggadireja, Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam Lemhannas RI, sebagai penanggap.
8. Prof. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A, Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam Lemhannas RI, sebagai penanggap.
9. Mayjen TNI (Purn) Lumban Sianipar, S.IP, Tenaga Profesional Bidang Ketahanan Nasional Lemhannas RI, sebagai penanggap.
10. Irjen Pol (Pur) Drs. Zainal Abidin Ishak, SH Tenaga Profesional Bidang Hukum & HAM Lemhannas RI, sebagai penanggap.
11. Brigjen TNI Asis Wanto, Dirjian Ekonomi Debidjianstrat Lemhannas RI, sebagai penanggap.
12. Brigjen TNI M. Nasir Madjid, Dirjian Hankam Debidjianstrat Lemhannas RI, sebagai penanggap.
13. Brigjen Pol Drs. Cosmas Lembang, Dirjian Sosbud Debidjianstrat Lemhannas RI, sebagai penanggap.
14. Brigjen Pol Drs. Harwiyanto, SH, MM, Kepala Biro Umum Settama Lemhannas RI, sebagai penanggap.
15. Kolonel Lek Bambang Sigit S. M.Sc, Kasubdit Ilpengtek Ditjiansosbud Lemhannas RI, sebagai penanggap.
16. Emmy Irma Simanjuntak, SH, M.Sc, Kasubdit Sosial Ditjiansosbud Lemhannas RI, sebagai penanggap.
17. Kolonel Kes Suhartono, SKM, BE, Kasubdit Demografi Ditjiansosbud Lemhannas RI, sebagai penanggap.
18. Harsono, Kasi Ren Subdithan Ditjianhankam Lemhannas RI, sebagai operator.

Kasubdit Ilpengtek,


Bambang Sigit S. M.Sc
Kolonel Lek Nrp 506797

DEBIDJIAN STRATEGIK LEMHANNAS RI
DIREKTORAT PENGKAJIAN SOSBUD

SUSUNAN ACARA
FOCUS GROUP DISCUSSION

**"PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR GUNA MENDUKUNG
PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM RANGKA
KETAHANAN NASIONAL"**

Selasa, 4 September 2012

- 08.30 - 08.55 : Registrasi
- 08.55 - 09.00 : Pembukaan dilanjutkan penjelasan kegiatan kajian Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI.
- 09.00 - 09.10 : Pengantar Moderator; Prof. Dr. Sudaryono, SU, Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Sosbud Lemhanans RI
- 09.10 - 09.30 : Paparan Dr.Ir Djaja Murni Warga Dalam, DIPL. HE.M.Sc, Direktur Bina Pentatagunaan Sumber daya Air Dirjen Sumber Daya Air (PSDA) Kementerian Pekerjaan Umum RI, dengan tema: **"Optimalisasi Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Air Bersih dan Sumber Daya Air dalam Mendukung Pembangunan Nasional"**.
- 09.30 - 10.40 : Paparan Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dengan tema **"Membangun Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Nasional"**.
- 10.40 - 11.10 : Paparan Dr. Ir. Endrawati Fatimah Peneliti Senior Lembaga Penelitian Universitas Trisakti dengan tema: **"Grand Design Pengelolaan Sumber Daya Air Nasional"**.
- 11.10 - 11.45 : Tanggapan para penanggap
- 11.45 - 12.15 : Tanggapan dari para pembicara
- 12.15 - 12.20 : Moderator menyerahkan diskusi kepada Deputi
- 12.20 - 12.25 : Penutup oleh Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI.
- 12.25 : Selesai

Jakarta, Agustus 2012
a.n.Dirjian Sosbud
Kasubdit Ilpengtek,



Bambang Sigit S.,M.Sc
Kolonel Lek NRP 506797



jurnal kajian

LEMHANNAS RI

Edisi 15 | Mei 2013

Aktualisasi Semangat Kebangkitan Nasional

guna Memantapkan Wawasan Kebangsaan Lintas Generasi
dalam rangka Ketahanan Nasional

Meningkatkan Bela Negara Masyarakat Perbatasan

guna Mendukung Pembangunan Nasional dalam rangka Menjaga Keutuhan NKRI

Grand Design Pelaksanaan TKI ke Luar Negeri

guna Menjaga Harkat dan Martabat Bangsa dalam rangka Ketahanan Nasional

Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)

guna Penghematan Bahan Baku Fosil dalam rangka Ketahanan Energi Nasional

Meningkatkan Produktivitas Pertanian

guna Mewujudkan Ketahanan Pangan
dalam rangka Ketahanan Nasional

ASEAN Leadership

guna Mewujudkan ASEAN Community
dalam rangka Ketahanan Regional





SAMBUTAN REDAKSI

Assalamu'alaikumWr. Wb.,

Salam sejahtera bagi kita sekalian

Salam hangat dari segenap Tim Redaksi.

Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia dan kekuatan yang diberikan, Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 15 yang terbit bertepatan pada HUT ke 48 Lemhannas RI ini dapat sampai ke tangan para pembaca yang budiman tepat pada waktunya.

Pembaca yang budiman,

Dewasa ini kita semua memberikan perhatian serius pada masalah lapangan kerja, energi, transportasi nasional, keamanan maritim dan kerukunan umat beragama.

Kompleksitas permasalahan tersebut membutuhkan kajian, kebijakan, solusi dan diseminasi pemahaman yang holistik untuk komponen bangsa.

Mencermati hal ini, Redaksi Jurnal Kajian Lemhannas RI pada edisi ini menyajikan berbagai kajian strategis tentang: Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), Peningkatan Produktivitas Pertanian, Penataan Pengamanan Wilayah Maritim dan Peningkatan Bela Negara Masyarakat Perbatasan. Selain itu, jurnal kali ini juga memuat kajian tentang Penguatan Kepemimpinan Nasional di Daerah, Aktualisasi Semangat Kebangkitan Nasional, Pengembangan Transportasi Nasional dan Pengelolaan Sumber Daya Air. Tidak kalah pentingnya, kajian tentang Asean Leadership dan Grand Design Pelaksanaan TKI ke Luar Negeri juga turut memperkaya edisi ini.

Besar harapan kami, kajian-kajian tersebut dapat menginspirasi segenap komponen bangsa untuk menyikapi dan mengaktualisasikan semua potensi yang dimiliki untuk bersinergi dengan program pemerintah, demi meningkatnya ketahanan nasional yang kita idamkan bersama.

Pada kesempatan ini kami sampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang turut membantu terbitnya jurnal ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, November 2013

PEMIMPIN REDAKSI



● **PEMBINA:** Gubernur Lemhannas RI - Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. - Wakil Gubernur Lemhannas RI - Marsdya TNI Dede Rusamsi, S.E. ● **PENGARAH:** Sestama Lemhannas RI - Drs. Chandra Manan Mangnan, M.Sc. ● **PEMIMPIN REDAKSI:** Brigjen TNI Sahat Aritonang ● **EDITOR:** Kabag Protbok - Kolonel Laut (P) E. Estu Prabowo - Kabag Humas - Megawarni Simamora, S.E., M.M. - Letnan Kolonel Caj Drs. G.T. Situmorang - Letkol. Inf. Sumurung - Endah Heliana, S.Sos. - Trias Noverdi, S.S. ● **KOORDINATOR FOTOGRAFER:** Mayor Inf Muhammad Isdar, S.Sos, M.Si ● **FOTOGRAFER/ DESAIN:** Ariyanto, S.H. - Sertu Syafrizal - Bambang Iman Aryanto, S.T., Suryadi ● **ADMINISTRASI DAN TATA USAHA:** Linda Purnamasari, S.Sos. - Gatot, S.AP ● **DISTRIBUSI:** Lettu Supriyono - Peltu (K) Fransisca - Indiah Winarni ● Isi di luar tanggung jawab percetakan PT Yellow Multi Media



EKONOMI -----	4
Pengembangan Energi Terbarukan (EBT) guna Penghematan Bahan Baku Fosil dalam rangka Ketahanan Energi Nasional	



EKONOMI -----	12
Meningkatkan Produktivitas Pertanian guna Mewujudkan Ketahanan Pangan dalam rangka Ketahanan Nasional	



POLITIK -----	20
Penguatan Kepemimpinan Nasional di Daerah Dalam Implementasi Sistem Manajemen Nasional guna Mendorong Percepatan Pembangunan Nasional	



POLITIK -----	30
Aktualisasi Semangat Kebangkitan Nasional guna Memantapkan Wawasan Kebangsaan Lintas Generasi dalam rangka Ketahanan Nasional	



SOSBUD -----	41
Pengembangan Sistem Transportasi Nasional guna Mempercepat dan Memperluas Pembangunan Ekonomi dalam rangka Ketahanan Nasional	



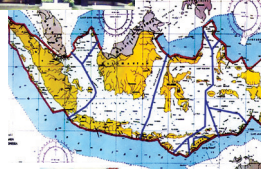
SOSBUD -----	50
Pengelolaan Sumber Daya Air guna Mendukung Pembangunan Nasional dalam rangka Ketahanan Nasional	



INTERNASIONAL -----	62
ASEAN Leadership guna Mewujudkan ASEAN Community dalam rangka Ketahanan Nasional	



INTERNASIONAL -----	65
Grand Design Pelaksanaan TKI Ke Luar Negeri guna Menjaga Harkat dan Martabat Bangsa dalam rangka Ketahanan Nasional	



HANKAM -----	76
Penataan Pengamanan Wilayah Maritim guna Memelihara Stabilitas Keamanan dalam rangka Menjaga Kedaulatan NKRI Tahun 2012	



HANKAM -----	88
Meningkatkan Bela Negara Masyarakat Perbatasan guna Mendukung Pembangunan Nasional dalam rangka Menjaga Keutuhan NKRI	



Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) guna Penghematan Bahan Baku Fosil dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional

1. Latar Belakang.

Untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, UUD Negara RI Tahun 1945 melalui pasal 33 telah mengamanatkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu kekayaan alam yang memiliki nilai strategis bagi pembangunan nasional secara berkelanjutan adalah **energi**. Kekayaan energi yang dimiliki Indonesia tidak hanya berkaitan dengan jumlahnya saja melainkan juga keberagamannya. Indonesia kaya akan berbagai jenis energi baik yang berbasis fosil maupun non fosil. Itulah salah satu kekuatan energi Indonesia. Oleh karenanya

tidak bijaksana kalau Indonesia hanya menggantungkan diri pada satu jenis energi saja yaitu yang berbasis fosil seperti BBM, karena cadangan energi fosil nasional bahkan duniapun sangat terbatas dan lambat laun akan habis.

Di samping sumber energi fosil sangat terbatas cadangannya, harganya pun fluktuatif karena sangat dipengaruhi oleh situasi politik dan ekonomi dunia. Dalam kondisi seperti itu, kebijakan **konservasi** dan **diversifikasi** energi yang telah dicanangkan oleh pemerintah merupakan kebijakan yang tepat untuk diterapkan di Indonesia. Oleh karenanya pengembangan **energi baru terbarukan (EBT)** sebagai komplementer energi berbasis fosil, mutlak untuk terus dilaksanakan. Untuk



mendukung kebijakan ini, hal penting yang perlu terus diupayakan adalah **konsistensi, komitmen dan perubahan *mindset*** dari pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia bahwa sumber energi bukan hanya BBM atau batubara atau gas saja, melainkan juga, air, gelombang laut, angin, matahari, panas bumi, bahan bakar nabati (BBN), nuklir bahkan sampah pun merupakan sumber energi yang sangat berguna, dan semua itu dimiliki oleh Indonesia. Untuk dapat memanfaatkan keberagaman energi tersebut, kata kuncinya adalah **kemauan (*political will*), kebijakan yang cerdas (*smart policy*) dan kerja keras (*etos kerja*)**. Konservasi dan diversifikasi energi yang ditopang oleh kedaulatan dan kemandirian penguasaan energi akan meningkatkan ketahanan energi yang pada gilirannya akan meningkatkan ketahanan nasional pula.

Ketahanan energi secara sederhana dapat diartikan sebagai kemampuan untuk merespon dinamika perubahan energi global (eksternal) dan kemampuan untuk menjamin ketersediaan energi dengan harga yang wajar (internal). Dengan demikian, ketahanan energi nasional harus dipandang sebagai suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan. Untuk itu harus didukung oleh pengembangan EBT yang bersifat berkelanjutan pula dan bukan hanya ditopang oleh energi berbasis bahan baku fosil yang terbatas jumlahnya dan kemungkinannya akan habis. Ketergantungan pada energi berbasis fosil yang sangat tinggi (mencapai 95% dari pemakaian energi) secepatnya harus ditinggalkan. Pemanfaatan EBT harus segera direalisasikan sehingga komposisi pemakaian energi fosil dan EBT pun semakin seimbang.

Salah satu keunggulan penggunaan EBT adalah tingkat polusinya rendah sehingga tidak menimbulkan dampak eksternal yang akan mempercepat *global warming*. Hal ini sejalan dengan konvensi internasional untuk ikut secara aktif menjaga kebersihan udara dunia. Di samping itu eksploitasi EBT merupakan suatu proses produksi yang *sustainable*, sehingga tidak perlu dikhawatirkan akan kehabisan sumbernya. Proses produksi seperti ini dapat dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif karena dapat dilakukan secara berklaster dari skala kecil, menengah sampai besar.

Ketahanan energi secara sederhana dapat diartikan sebagai kemampuan untuk merespon dinamika perubahan energi global (eksternal) dan kemampuan untuk menjamin ketersediaan energi dengan harga yang wajar (internal).

2. Data dan Fakta.

Yang perlu digarisbawahi adalah Indonesia tidak termasuk dalam kategori negara yang kaya sumber energi fosil. Cadangan per kapita minyak, gas dan batubara Indonesia berada di bawah cadangan per kapita rata-rata dunia. Penggunaan energi Indonesia masih relatif sangat kecil. Konsumsi energi listrik dan energi primer Indonesia (2006) per kapita sebesar 517 kWh dan 0,57 TOE, sedangkan konsumsi listrik dan energi primer rata-rata dunia adalah 2463 kWh dan 1,63 TOE.

Namun, justru Indonesia memiliki potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang terbesar, adalah energi air (*hydro*), yakni sebesar 75.670 MW. Namun hingga tahun 2008, pemanfaatannya baru mencapai 4.200 MW atau sekitar 5% dari potensi yang ada. Upaya pemanfaatan energi air sebagai salah satu energi alternatif masih terus dilakukan dan dikembangkan terutama melalui akuisisi teknologi mikrohidro (50-500 kW) yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan listrik di pedesaan.

a. Tuntutan Global Pemanfaatan Energi Terbarukan.

Berdasarkan hasil *Roundtable Discussion* (RTD) diperoleh gambaran bahwa energi terbarukan telah menjadi ambisi global di negara-negara Eropa, yang unggul dalam teknologi ramah lingkungan, dan negara-negara Timur Tengah dan Asia. Kecenderungan itu oleh PBB, diperkirakan akan terus dikaji. Berdasarkan draf terbaru *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) PBB yang dikeluarkan minggu lalu, pemanfaatan energi



terbarukan, seperti tenaga angin dan matahari, diperkirakan akan meningkat pada 2050.

Pada tahun 2008, penggunaan energi terbarukan secara global baru mencapai sekitar 19,9%. Peringkat pertama jenis energi itu masih berupa kayu bakar yang banyak digunakan di negara berkembang sebagai bahan bakar untuk memasak dan penghangat. Penggunaan bioenergi itu diperkirakan mencapai 10,2%. Namun demikian, saat ini kayu bakar tidak lagi dimasukkan dalam skenario IPCC.

b. Kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan EBT.

Sebagian besar skenario IPCC memperlihatkan bahwa energi terbarukan

per kapita. Apabila pemanfaatan energi terbarukan terus ditingkatkan, maka terhitung mulai tahun 2010 hingga tahun 2050, penghematan emisi karbon diperkirakan dapat mencapai 220-560 miliar ton.

c. Insentif dan disinsentif.

Saat ini, para investor dan pelobi teknologi hijau mengeluhkan subsidi yang diberikan oleh pemerintah negara-negara di dunia terhadap pemanfaatan energi fosil. Dengan teknologi energi terbarukan yang semakin murah, pemerintah beberapa negara mulai mengurangi insentif yang diberikan terhadap pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan. Hal tersebut dinilai tidak adil

Upaya pemanfaatan energi air sebagai salah satu energi alternatif masih terus dilakukan dan dikembangkan terutama melalui akuisisi teknologi mikrohidro (50-500 kW) yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan listrik di pedesaan.

bisa meningkat hingga 100 *exajoules* (EJ) setiap tahunnya pada pertengahan abad ini. Namun demikian, ada pula skenario yang menunjukkan peningkatan hingga 200-400 EJ tiap tahunnya. Jumlah tersebut tentunya sangat jauh di atas suplai pada tahun 2008 yang hanya mencapai 64 EJ, dengan suplai energi total sebesar 429 EJ. Namun laporan juga menyebutkan, bahwa untuk mencapai jumlah tersebut dibutuhkan peningkatan penggunaan energi terbarukan yang sangat besar, yaitu sekitar 20 kali lipat penggunaan saat ini dengan tidak memperhitungkan penggunaan kayu bakar. Jika hal itu dilakukan, skenario IPCC memperlihatkan dunia akan bisa menghemat emisi CO₂ hingga miliaran ton.

Bagi Indonesia, penurunan emisi bukanlah hal yang mendesak untuk dilakukan. Emisi gas rumah kaca (CO₂) Indonesia dipandang masih rendah yaitu sekitar 1,5 Ton per kapita dibandingkan rata-rata dunia 4,2 Ton per kapita atau bila dibandingkan terhadap rata-rata Negara OECD yang mencapai 11,4 Ton

oleh para investor karena pemerintah tidak mengurangi subsidi pada energi fosil. Walaupun para investor energi terbarukan saat ini sudah lebih mampu untuk mengembangkan teknologi sendiri, persaingan yang tidak adil dengan para pelaku energi fosil dinilai akan menjadi pukulan berat bagi sektor industri yang baru berkembang ini. Sejauh ini, negara-negara Eropa merupakan pendukung terbesar energi terbarukan, terutama energi surya.

d. Prioritas Program Pengembangan Energi baru dan Terbarukan.

Prioritas pengembangan energi terbarukan dalam jangka menengah adalah: Mengamankan pasokan baru dan penurunan emisi (emisi per kapita Indonesia masih rendah); Memprioritaskan pengembangan energi terbarukan yang mampu mensubsidi penggunaan energi fosil khususnya BBM, Mengembangkan sumber energi terbarukan yang tersedia di tempat yang membutuhkan energi mulai dari yang termurah dulu, mengembangkan sumber energi terbarukan yang tersedia



di tempat yang membutuhkan energi mulai dari skala yang besar dan *baseload*, memperhatikan karakteristiknya, maka yang perlu didahulukan dalam pengembangan energi terbarukan adalah *geothermal*, *hydro* dan biomassa, hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan pengelolaan sampah di sekitar 500 kota dengan pengembangan energi biomassa secara terprogram dan terarah serta Membangun *pilot project* dan melakukan riset lapangan untuk pengembangan energi gelombang laut.

3. Permasalahan.

Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi terkait dengan pengembangan energi terbarukan, antara lain :

Pertama, bagaimana mengatasi hambatan dan kendala ketersediaan infra struktur energi baru dan terbarukan yang masih terkendala aspek pendanaan dan sinergi dalam pengembangan Energi Baru dan Terbarukan.

Kedua, Bagaimana langkah-langkah strategis agar dalam tataran pelaksanaan, pemanfaatan energi baru terbarukan tidak dinilai sangat lambat, dan kaitannya dengan kontrak-kontrak jangka panjang dari Perjanjian Jual Beli Energi Baru dan Terbarukan.

Ketiga, bagaimana mengefektifkan kegiatan promosi penggunaan lampu hemat energi, dan sebagainya agar dapat merubah *mindset* masyarakat dalam penggunaan energi.

Keempat, bagaimana *roadmap* yang jelas untuk mengarah pada pengembangan Energi Baru dan Terbarukan sebagai sumber energi utama dalam rangka meningkatkan ketahanan energi nasional.

Kelima, bagaimana upaya untuk mendorong peningkatan fungsi koordinasi antarkementerian/lembaga terkait, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan agar dapat dilakukan percepatan implementasi pengembangan Energi Baru dan Terbarukan.

Keenam, biaya produksi dan pengembangan energi terbarukan relatif masih tinggi sehingga kurang menarik bagi investor nasional maupun asing. Tingginya biaya tersebut terutama dibutuhkan pada tahap awal investasi pengembangan energi terbarukan yang mengandalkan teknologi tinggi.

Ketujuh, Kebijakan pemerintah terkait dengan pengembangan energi terbarukan, dirasakan kurang berpihak bagi pelaku bisnis, sehingga para investor kurang berminat terhadap sektor energi terbarukan.

Kedelapan, penguasaan teknologi produksi dan pengembangan energi terbarukan secara nasional masih relatif



rendah, sehingga ketergantungan pada asing masih sangat tinggi. Oleh sebab itu, muncul kekhawatiran terkait tidak adanya jaminan bahwa pengembangan energi terbarukan dapat berjalan secara berkelanjutan.

4. Analisis.

Untuk mendapat gambaran yang komprehensif dalam pengembangan potensi dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, maka berdasarkan fakta yang ada dapat diuraikan melalui analisa berbagai aspek antara lain, aspek kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*) sebagai berikut:

a. Kekuatan (*Strength*) Energi Terbarukan. Keuntungan pemanfaatan energi terbarukan antara lain: Biaya pembangkitan yang rendah, mampu untuk kompetitif dibandingkan dengan pembangkit listrik berbahan bakar fosil, biaya pembangkit listrik Energi terbarukan adalah konstan selama masa pakai fasilitas, sumber energi konstan sepanjang waktu berselang seperti tenaga angin atau surya, sumber energi terbarukan karena berasal dari inti bumi dan cairannya disirkulasikan kembali

ke bumi, pembangkit listrik terbarukan *binary-cycle* tidak menghasilkan polusi dan emisi gas rumah kaca dan energi terbarukan dihasilkan secara domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak bumi.

Keunggulan lain adalah faktor kapasitas (*capacity factor*), yaitu perbandingan antara beban rata-rata yang dibangkitkan oleh pembangkit dalam suatu periode (*average load generated in period*) dengan beban maksimum yang dapat dibangkitkan. Adapun kekuatan (*strength*) energi terbarukan di Indonesia antara lain adalah potensi sumber daya terbarukan Indonesia pemanfaatannya bisa berkelanjutan, energi terbarukan berpeluang untuk mendapatkan dana karbon kredit dan Dukungan berbagai perundang-undangan terkait dan kegiatan pemanfaatan terbarukan sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan.

b. Kelemahan (*Weakness*) Energi Terbarukan. Kelemahan pemanfaatan energi terbarukan antara lain: Pembangkit listrik menjadi ekonomis di daerah energi terbarukan (dekat sumber); Pembangkit listrik energi terbarukan membutuhkan investasi yang sangat



<http://kunaifi.files.wordpress.com/2007/12/092.jpg>



mahal untuk eksplorasi, pengeboran, dan pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan dapat memengaruhi stabilitas tanah di daerah sekitarnya karena pengeboran dan Sumber energi terbarukan dapat habis jika tidak dikelola dengan baik.

Kelemahan lainnya adalah saat ini harga listrik dari energi terbarukan relatif belum kompetitif dibandingkan dengan harga listrik dari energi lainnya karena belum memperhitungkan tambahan biaya eksternal (biaya lingkungan), pada umumnya lokasi potensi energi terbarukan di daerah belum memiliki infrastruktur yang memadai, belum adanya peraturan pelaksanaan berbagai produk undang-undang sehingga belum ada kesamaan pandangan antara pemerintah pusat dan daerah mengenai pengelolaan energi terbarukan sehingga menimbulkan kekhawatiran terjadinya monopoli. Energi terbarukan bersifat *site specific* sehingga pemanfaatannya

bersifat setempat, tidak dapat diperjualbelikan sebagai komoditas sebelum dikonversikan menjadi energi listrik dan Perusahaan energi terbarukan untuk pembangkit tenaga listrik harus memerhatikan risiko tinggi dari eksplorasi dan eksploitasi.

c. Peluang (Opportunity) Energi Terbarukan. Peluang pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia antara lain: Dapat mengurangi penggunaan devisa dari pemanfaatan energi berbasis fosil, sehingga dapat meningkatkan ketahanan dalam negeri, hal ini dikarenakan adanya krisis listrik dan pertumbuhan permintaan listrik di sekitar daerah potensi serta masih

besarnya ketergantungan terhadap BBM yang menyebabkan masalah keamanan pasokan energi nasional, komitmen dunia sesuai dengan *Kyoto Protocol* untuk mengurangi emisi CO₂ dapat dimanfaatkan pembangkit listrik tenaga energi terbarukan untuk mengurangi emisi yang signifikan hingga tahun 2020, kompetensi SDM dan kemampuan teknologi nasional selama lebih dari 25 tahun pengembangan energi terbarukan dapat menjadi modal

dalam pemanfaatan energi terbarukan.

d. Ancaman (Threat) Energi Terbarukan.

Ancaman (*threat*) dalam mengembangkan energi terbarukan antara lain: Masih terbatasnya SDM khususnya di daerah, investasi di sektor industri energi terbarukan yang kurang diminati karena tingkat pengembalian modal yang rendah dan tidak pasti; Pola pengusahaan energi terbarukan yang belum *bankable*; Kemungkinan munculnya peraturan-peraturan daerah yang tidak sinkron dengan kebijakan panas bumi; Pengembangan energi terbarukan adalah bisnis yang sarat akan dana, dengan investasi yang besar dan dilakukan sebelum pembangkit berproduksi.

Biaya produksi dan pengembangan energi terbarukan relatif masih tinggi sehingga kurang menarik bagi investor nasional maupun asing. Tingginya biaya tersebut terutama dibutuhkan pada tahap awal investasi pengembangan energi terbarukan yang mengandalkan teknologi tinggi.

5. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil Kajian tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

a. Pengembangan Energi terutama Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi memerlukan program yang tepat berikut pendanaan yang jelas. Energi baru dan terbarukan yang masih bersifat komplementer, diharapkan ke depan diarahkan untuk menggantikan energi fosil, khususnya bahan bakar minyak untuk transportasi dan pembangkitan listrik.



b. Pengembangan energi baru dan terbarukan tidak dapat dilakukan sendiri tetapi memerlukan jaringan yang kuat. Terkait dengan masih tinggi atau besarnya biaya produksi dalam pengembangan energi terbarukan menyebabkan minimnya investor nasional atau asing untuk berinvestasi di bidang energi terbarukan.

c. Terkait masalah energi, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, mengamanatkan beberapa hal terkait dengan energi terbarukan, antara lain bahwa: pengelolaan energi harus mengutamakan kemampuan nasional, mengutamakan penggunaan teknologi ramah lingkungan, penyediaan energi diutamakan menggunakan energi setempat yang bersumber pada energi terbarukan serta pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk menyediakan energi baru dan terbarukan.

6. Saran / Rekomendasi.

Dalam mengembangkan energi baru dan terbarukan, beberapa agenda yang segera dan mendesak dilakukan agar dapat mencapai target yang lebih cepat dibandingkan dengan yang ditargetkan (pada tahun 2025) disusun *roadmap* sebagai berikut :

a. Tahapan Aksi Operasional adalah:

- 1) Perlu segera dibuat neraca sumber daya alam nasional (khususnya energi), sebagai acuan untuk memetakan seluruh ragam potensi dan produksi energi nasional di seluruh wilayah nusantara.
- 2) Perlu segera dipercepat pengembangan infrastruktur EBT sesuai dengan *roadmap* pencapaian bauran energi visi 2025.
- 3) Segera dirumuskan dan diterapkan pola subsidi energi yang lebih tepat (untuk BBM dan non BBM), sehingga EBT memiliki nilai kompetitif dibandingkan dengan energi fosil.
- 4) Segera direalisasikan pemberian insentif bagi pelaku produksi EBT, baik yang berkaitan dengan insentif fiskal, teknologi maupun tarif, sesuai

amanat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007.

- 5) Perlu dikaji ulang kebijakan ekspor-impor energi dikaitkan dengan pola kebutuhan dan penyediaan energi.
 - 6) Perlu didorong partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengembangkan EBT sesuai dengan kekhasan lokal (mikro hidro, tenaga surya, angin dll).
 - 7) Perlu ditetapkan target atau quota pasokan EBT per tahun yang dikaitkan dengan Neraca Energi Nasional (termasuk di dalamnya kebijakan impor dan ekspor energi) dan disesuaikan secara konsisten dengan Rencana Induk Konservasi Energi Nasional (RIKEN) maupun Rencana Induk Diversifikasi Energi Nasional (RIDEN).
 - 8) Pengembangan EBT selayaknya merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari berbagai program pembangunan nasional lainnya yang salah satunya adalah MP3EI.
 - 9) Perlu dipertimbangkan untuk segera mengembangkan energi nuklir yang memiliki berbagai kelebihan, di antaranya menghasilkan energi yang cukup besar, merupakan energi bersih, *sustainable*, dan keamanannya terjamin selama sesuai dengan standar dan ketentuan yang diharuskan.
- #### b. Tahapan Pembenahan Kelembagaan.
- Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan harmonisasi dan sinergitas dari berbagai kebijakan energi nasional sehingga lebih bersifat *action oriented*. Langkah-langkah dimaksud antara lain:
- 1) Meningkatkan efektivitas sistem manajemen nasional dengan mendorong pengelolaan sumber daya energi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 33 UUD Negara RI Tahun 1945.
 - 2) Membenahi berbagai regulasi yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang tidak efektif dan



tumpang tindih (UU mengenai kehutanan, Minerba dan Pertanahan).

- 3) **Membangun keharmonisan pemerintah pusat dan daerah** dalam penerapan undang-undang otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga daerah juga bergairah untuk mengembangkan EBT.

- 4) **Meningkatkan kinerja dan kapasitas kelembagaan yang berkaitan dengan pengembangan EBT**, khususnya meningkatkan koordinasi antar instansi, dan menghilangkan tumpang tindih kewenangan serta perlunya sebuah BUMN yang menangani pengembangan EBT.

Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) Guna Penghematan Bahan Baku Fosil Dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional

Focus Group Discussion (FGD)

- Selasa, 27 Maret 2012
- Pembicara :
 1. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan & Konservasi Energi Kementerian ESDM RI Dr. Ir. Kardaya Warnika.
 2. Direktur Pusat Pengkajian Energi UI Prof. Dr. Ir. Iwa Garniwa.
 3. Wakil Ketua Komite Tetap Energi Baru Terbarukan KADIN Erwin Susanto Sadirsan.
 4. Tenaga Profesional Bidang Ekonomi Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani.
- Penanggap :
 1. Tenaga Ahli Pengkaji Bidang IPTEK Lemhannas RI Ir. Kurdinanto Sarah, MSP.
 2. Tenaga Profesional Bidang Ekonomi Lemhannas RI Dr. Panutan Sakti, SE, MT, AK.
 3. Direktur Pengkajian Bidang Politik Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Fashbir Noor Sidin, SE, MSP.
 4. Tenaga Ahli Pengkaji Bidang SKA Lemhannas RI Marsda TNI Moch. Amien Syahbudiono, M.Sc.
 5. Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Geografi Lemhannas RI Mayjen TNI Endang Haerudin, ST, MM.

Roundtable Discussion (RTD)

- Selasa, 3 April 2012
- Pembicara :
 1. Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek.
 2. Kepala BATAN Dr. Hudi Hastowo
 3. Wakil Menteri ESDM, diwakilkan oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan & Konservasi Energi Kementerian ESDM RI Dr. Ir. Kardaya Warnika.
 4. Direktur Pusat Pengkajian Energi Universitas Indonesia PROF. Dr. Ir. Iwa Garniwa,
- Penanggap :
 1. Anggito Abimanyu.
 2. Dr. Ir. Hilmi Panigoro, M.Sc
 3. Teuku Riefky
 4. Dr. Tri Mumpuni
 5. Prof. Dr. Miyasto, SU.
 6. Ir. Timotius D.H.

Tim Penyusun : Direktorat Pengkajian Bidang Ekonomi



Meningkatkan Produktivitas Pertanian guna Mewujudkan Ketahanan Pangan dalam Rangka Ketahanan Nasional

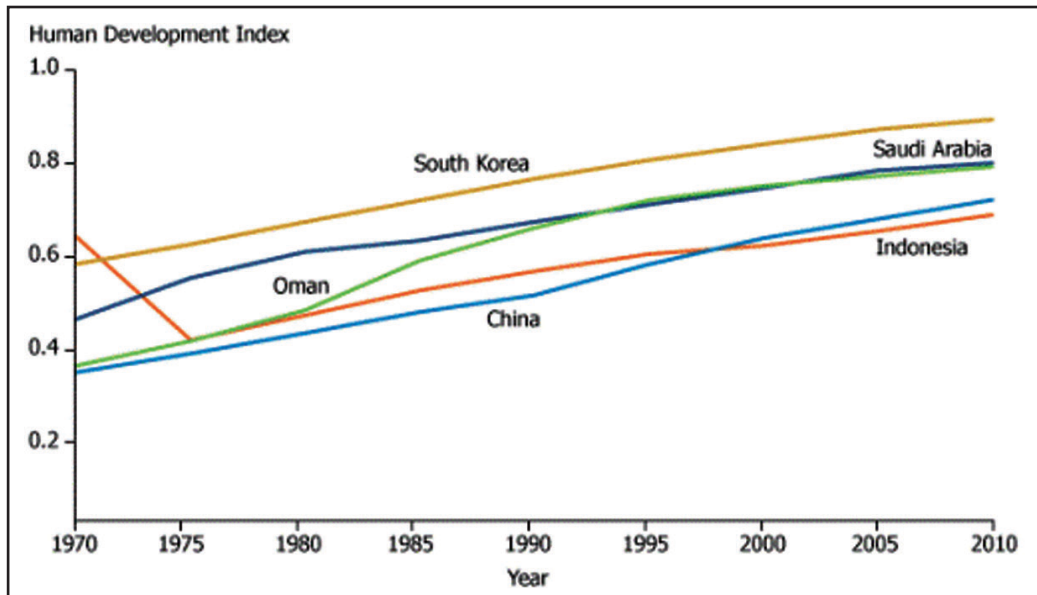
1. Latar Belakang.

Berdasarkan hasil penelitian *Food Agriculture Organization (FAO)*, jumlah penduduk dunia yang menderita kelaparan pada tahun 2010 mencapai 925 juta orang. Situasi ini diperparah dengan semakin berkurangnya investasi di sektor pertanian yang sudah berlangsung selama 20 tahun terakhir. Sementara sektor pertanian menyumbang 70% dari lapangan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung (Bustanul Arifin, 7 Juni 2011).

Indonesia adalah negara yang memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan global dan juga telah menandatangani *Letter of Intent (LOI)* dengan FAO pada bulan Maret 2009 sebagai bentuk dukungan terhadap berbagai program peningkatan ketahanan pangan global dan pembangunan pertanian negara-negara berkembang lainnya, terutama

dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan (*South-south Cooperation*), kerjasama teknis negara-negara berkembang (KTNB/TCDC) dan pencapaian tujuan dari MDGs. Penandatanganan LOI ini juga diharapkan akan semakin memperkuat peran Indonesia dalam membantu peningkatan pembangunan pertanian di negara-negara berkembang, terutama di negara-negara Asia Pasifik dan Afrika yang telah berjalan sejak tahun 1980.

Pangan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak untuk ditindaklanjuti dan memerlukan langkah-langkah penanganan dengan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Upaya-upaya tersebut, harus ditujukan untuk mengurangi beban masyarakat dan memenuhi hak-hak dasar setiap warga negara secara layak, sehingga dapat menjalani dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Mengingat pentingnya pangan untuk keberlanjutan berbangsa dan



<http://www.prb.org/images10/hditop.gif>

bernegara, maka seluruh pemangku kepentingan harus mampu menyatukan langkah dan pemikiran serta menempatkan upaya produktivitas pertanian sebagai prioritas utama.

Selama ini, Pemerintah telah berupaya menyempurnakan kebijakan Produktivitas Pertanian, baik dari sisi paradigma, anggaran maupun instrumen program meningkatkan produktivitas pertanian. Dibukanya ruang partisipasi pada semua pihak dalam upaya Peningkatan Produktivitas Pertanian dan menjadikan isu sebagai tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan, merupakan langkah awal yang ditujukan untuk mendorong seluruh elemen masyarakat, agar turut berperan dan bertanggung jawab dalam upaya Meningkatkan Produktivitas Pertanian. Semangat inilah yang mendasari berbagai prakarsa yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.

Peningkatan produktivitas pertanian harus memperhatikan dua aspek yang saling berkaitan yaitu permintaan dan penawaran. Aspek permintaan berkaitan dengan kuantitas dan kualitas penduduk sedangkan aspek penawaran berkaitan dengan jumlah produk pertanian yang dihasilkan.

Namun demikian, berbagai kebijakan dan program yang telah digulirkan masih belum sepenuhnya berjalan dan terselenggara secara selaras, terpadu, efisien dan efektif.

2. Data dan Fakta.

Permasalahan peningkatan produktivitas pertanian harus memperhatikan dua aspek yang saling berkaitan yaitu permintaan dan penawaran. Aspek permintaan berkaitan dengan kuantitas dan kualitas penduduk sedangkan aspek penawaran berkaitan dengan jumlah produk pertanian yang dihasilkan.

a. Aspek Permintaan.

Data jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk masih tinggi, kondisi ini membutuhkan pangan yang besar dimana sebagian harus dipasok dari hasil produksi pertanian.

Namun jumlah penduduk yang besar dengan laju pertumbuhan yang tinggi



belum diimbangi dengan kualitas penduduk yang tinggi. Perkembangan *Human Development Index* (HDI) Indonesia untuk tahun 1980 sampai dengan 2011 masih belum menggembirakan. Karena dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka semakin besarlah jumlah pangan yang dibutuhkan.

b. **Apek Penawaran.**

Sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan terus mengalami penurunan, kondisi ini menunjukkan bahwa sektor tersebut pertumbuhannya semakin melambat. Bahkan, jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor lainnya, maka laju pertumbuhan sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan tergolong paling lambat. Apabila produktivitas pertanian ingin

kedelai hanya 1,4 ton per hektar. Pertumbuhan produktivitas tebu sangat tidak terpola, kadang tinggi sampai 6,2 ton per hektar, tetapi kadang anjlok sampai di bawah 5,8 ton per hektar. Hanya jagung yang menunjukkan peningkatan produktivitas konsisten hampir dua kali lipat. Fenomena produktivitas tersebut sekaligus menunjukkan inkonsistensi pola dan sistem produksi pangan strategis di Indonesia.

Kapasitas produktivitas pertanian di Indonesia, selain memang rendah sejak awal, juga mengalami kelelahan sistematis karena pola budidaya, lingkungan tumbuh dan inefisiensi skala produksi usaha tani. Petani sebagai pelaku utama memiliki keterbatasan dalam mengelola dan memodifikasi lingkungan biofisik dan sosial ekonomi sistem produksi

Inovasi dan perubahan teknologi, termasuk pengembangan dan pemanfaatan bioteknologi pertanian, akan mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas pertanian dalam menyiapkan ketahanan pangan.

ditingkatkan lebih lanjut, maka faktor pertama yang harus diperhatikan adalah ketersediaan dan kualitas infrastruktur, pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dimana semakin tinggi nilai elastisitas, maka semakin penting pengaruh faktor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara nasional infrastruktur irigasi mempunyai angka elastisitas di atas 1 yang berarti sangat penting pengaruhnya terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Khususnya pengaruh terhadap perkembangan produktivitas pertanian.

c. **Selama dua dasawarsa terakhir, laju pertumbuhan produktivitas pangan di Indonesia sangat lamban. Pada kurun waktu 14 tahun terakhir (1996-2010), produktivitas beras tumbuh di bawah 1 persen per tahun. Pertumbuhan produktivitas kedelai stagnan, jika tidak dikatakan negatif. Pada dekade 1990-an, produktivitas kedelai mencapai 1,7 ton per hektar, tetapi kini produktivitas**

pertanian. Petani sulit sekali untuk mampu mempengaruhi lingkungan kebijakan, apalagi untuk mengubah landasan ekonomi makro, yang menentukan tingkat kesejahteraannya. Pada level kapasitas yang sama, pengaturan teknik budidaya, penanggulangan hama dan penyakit serta pengelolaan air irigasi hanya mampu meningkatkan produksi pertanian sekedarnya. Berbeda halnya jika kapasitas produksinya ditingkatkan, apalagi jika dikombinasikan dengan langkah intensifikasi, produksi pertanian akan melompat berlipat-lipat. Kisah lonjakan produktivitas jagung di atas tidak dapat dilepaskan dari penggunaan dan adopsi benih jagung hibrida. Singkatnya, inovasi dan perubahan teknologi, termasuk pengembangan dan pemanfaatan bioteknologi pertanian, akan mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas pertanian dalam menyiapkan ketahanan pangan.

3. Permasalahan.

Dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian, Indonesia masih menghadapi



berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut dapat dikelompokkan menjadi permasalahan paradigma, produksi, distribusi, konsumsi, koordinasi dan keuangan.

Pertama, dari aspek paradigma mencakup: sistem agribisnis harus digeser menjadi berbasis kepada petani dan pengusaha, sedangkan peran pemerintah hanya sebagai fasilitator, pendekatan masih bersifat sektoral, dan peran pemerintah daerah masih kurang,

Kedua, dari aspek produksi mencakup: skala usaha petani masih kecil, alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian masih tinggi, rusaknya infrastruktur pertanian di berbagai daerah, melemahnya sistem penyuluhan pertanian, suplai air semakin berkurang, laju pertumbuhan penduduk relatif tinggi, ketergantungan masyarakat terhadap beras masih tinggi, produksi beras cenderung berfluktuasi, adopsi inovasi teknologi relatif rendah, pemilikan lahan sangat kecil (rata-rata 0,25 ha per petani), kelembagaan petani masih lemah, pascapanen tergantung alam, keadaan cuaca dan keadaan geografi setempat.

Ketiga, dari aspek distribusi mencakup: fluktuasi harga/inflasi relatif tinggi, pengelolaan distribusi yang belum merata di seluruh wilayah, permintaan dari luar daerah sangat tinggi, cadangan pangan beras belum terdata dengan baik dan biaya koleksi dan distribusi yang relatif tinggi.

Keempat, dari aspek konsumsi mencakup: keamanan pangan, kerawanan pangan dan gizi, diversifikasi pangan serta daya beli masyarakat yang belum memadai.

Kelima, dari aspek koordinasi mencakup: masing-masing instansi hanya fokus pada tugas pokok fungsinya masing-masing, lemahnya koordinasi antar-instansi dan lemahnya *leadership* yang dapat mengkoordinasi berbagai instansi.

Keenam, dari aspek keuangan yaitu terbatasnya akses petani terhadap sumber permodalan serta belum adanya perlindungan keuangan terhadap petani.

4. Analisis.

Berdasarkan hasil studi *literature* dan meta analisis terhadap hasil-hasil kajian terkait dengan kebijakan, strategi dan upaya-upaya peningkatan produktivitas pertanian

yang diselenggarakan melalui *Focus Group Discussion* dan *Round Table Discussion* di Lemhannas RI, masih banyak permasalahan yang harus diatasi, sehingga diperlukan kesadaran bersama baik pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk saling bersinergi dengan pendekatan *holistic integral* dalam meningkatkan produktivitas pertanian guna meningkatkan ketahanan pangan dalam rangka ketahanan nasional.

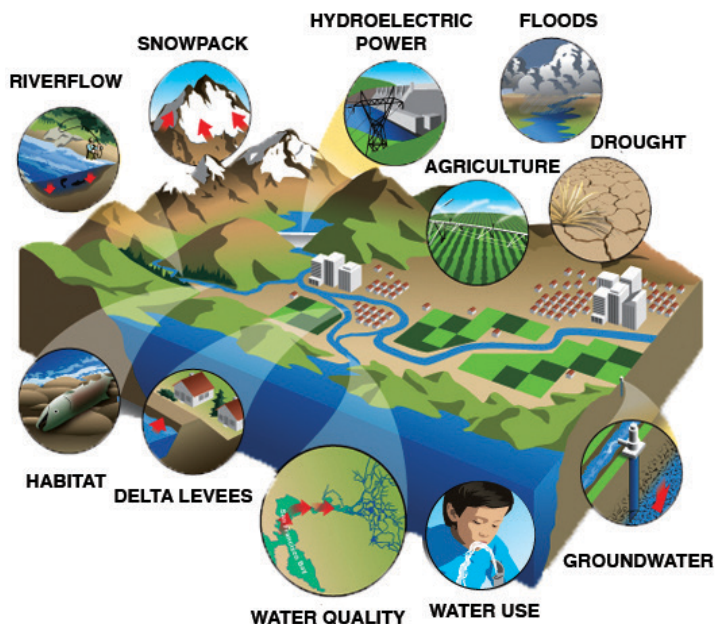
Hal ini disebabkan Implementasi kebijakan dan program kegiatan, belum berjalan secara

buruknya jalan usaha tani, terbengkalainya saluran irigasi, ancaman serangan hama dan penyakit tanaman.

Dari seluruh permasalahan yang dihadapi petani dapat dikelompokkan menjadi (1) Pengaruh lingkungan strategis bersifat global dan (2) Pengaruh internal. Pengaruh global seperti liberalisasi, *climate change*, dan *global price*. Namun yang sangat besar dan langsung dampaknya adalah *climate change*. *Climate change* atau perubahan iklim global menyebabkan terjadinya anomali iklim. Perubahan iklim ini menyebabkan meningkatnya suhu udara, musim hujan lebih panjang atau pendek dan musim kemarau yang lebih panjang atau pendek. Hal tersebut dapat mengakibatkan banjir, kemarau panjang dan gagal panen. Meningkatnya suhu udara sering berdampak negatif pada pertumbuhan, seperti melemahnya daya tahan tanaman, meningkatnya serangan hama dan penyakit tanaman.

Selama ini para akademisi maupun para birokrat melihat soal pemenuhan pangan hanya melalui pendekatan produksi. Jika ada kekurangan pangan,

usahanya adalah peningkatan produksi. Jika dilihat jauh ke depan, pada tahun 2035, menurut proyeksi para ahli kependudukan, sekalipun program Keluarga Berencana (KB) sukses, penduduk kita akan mencapai sekitar 350 juta jiwa. Dengan tingkat konsumsi per kapita seperti sekarang ini, 139 kg per kapita per tahun, pada 2035 dibutuhkan sekitar 50 juta ton beras. Untuk menghasilkan 50 juta ton beras, dibutuhkan sawah dengan produktivitas rata-rata 5 ton GKG (Gabah Kering Giling) per ha seluas sekitar 11 juta ha. Data menunjukkan, sekarang Indonesia hanya mempunyai sekitar 6,5 juta hektar sawah, sehingga sangat sulit membayangkan bagaimana mendapatkan areal baru untuk



https://newsline.lln.gov/articles/2008/jul/07.25.08/climate_change.png

optimal sebagai satu kesatuan kebijakan yang utuh, serasi dan selaras, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas keseluruhan kebijakan serta program kegiatan. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan maupun implementasi program kegiatan belum sepenuhnya terselenggara secara efisien dan efektif antara pemerintah pusat dengan pemerintah Daerah maupun dengan para pemangku kepentingan lainnya.

Upaya meningkatkan produktivitas pertanian khususnya ketersediaan beras, masih menghadapi berbagai permasalahan. Setiap kali musim tanam padi berbagai hambatan produksi masih terus dialami petani, seperti tersendatnya distribusi pupuk,



mencapai 11 juta ha tadi. Jadi, masalahnya pertambahan permintaan lebih besar daripada kemampuan memproduksi. Jadi pertambahan permintaan itu tidak bisa diatasi semata-mata dengan meningkatkan produksi karena : **Pertama**, penambahan areal sawah (ekstensifikasi) sangat sulit dilakukan. **Kedua**, selain terbatasnya lahan, suplai air juga semakin berkurang. **Ketiga**, sistem pertanian kita semakin gurem, sehingga perlu ada reorganisasi pertanian supaya petani bisa bekerja pada skala usaha yang ekonomis untuk sebuah keluarga. **Keempat**, sulit meningkatkan produktivitas rata-rata

Pertanian, baik dari sisi paradigma, anggaran maupun instrumen program dalam meningkatkan Produktivitas Pertanian. Dibukanya ruang partisipasi pada semua pihak dalam upaya Peningkatan Produktivitas Pertanian, merupakan langkah awal yang ditujukan untuk mendorong seluruh elemen masyarakat, agar turut berperanserta dan bertanggung jawab dalam upaya Meningkatkan Produktivitas Pertanian. Semangat inilah yang mendasari berbagai prakarsa yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.

Untuk menghasilkan 50 juta ton beras, dibutuhkan sawah dengan produktivitas rata-rata 5 ton GKG (Gabah Kering Giling) per ha seluas sekitar 11 juta ha. Data menunjukkan, sekarang Indonesia hanya mempunyai sekitar 6,5 juta hektar sawah, sehingga sangat sulit membayangkan bagaimana mendapatkan areal baru untuk mencapai 11 juta ha tadi.

karena produktivitas kita saat ini, sekitar 4,9 ton GKG (Gabah Kering Giling) per ha, sudah cukup tinggi dibandingkan negara-negara produsen beras dunia. **Kelima**, hambatan dari luar pertanian dengan adanya ancaman *global warming*. Bila tidak diantisipasi dari sekarang, akibat *global warming* pada masa yang akan datang bisa lebih parah, seperti banjir, kekeringan, ledakan serangan hama dan penyakit.

5. Kesimpulan.

Pemenuhan kebutuhan Pangan bagi setiap warga negara merupakan hak sekaligus kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh Negara. Jika tidak terpenuhi, akan berpengaruh terhadap ketahanan nasional dan berdampak terhadap keutuhan NKRI. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilanjutkan langkah-langkah penanganan peningkatan produktivitas pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan dalam rangka ketahanan nasional dengan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh.

Selama ini, Pemerintah telah berupaya menyempurnakan kebijakan Produktivitas

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, hal mendasar yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut : Meningkatkan produktivitas pertanian membutuhkan paradigma baru melalui pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Pembangunan sistem dan usaha agribisnis adalah pembangunan yang berdaya saing, berkeadilan, berkelanjutan dan dilaksanakan secara terdesentralisir. Berdaya saing dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan globalisasi, sehingga kita mampu bersaing dengan produk impor dan bersaing di pasar internasional. Berkeadilan untuk memenuhi tuntutan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan. Berkelanjutan dalam mewujudkan daya saing dan berkeadilan melalui penyesuaian diri dengan perubahan iklim global. Jika kita tidak menyesuaikan diri dengan perubahan iklim dan memperhatikan kelestarian lingkungan, maka tidak akan bisa berkelanjutan.

Pengaruh lingkungan strategis baik eksternal maupun internal yang dihadapi petani padi Indonesia umumnya dan petani daerah sentra produksi beras khususnya dapat



diatasi dengan strategi pemecahan masalah melalui Waspada Krisis Pangan Global dengan menggalakkan peningkatan produk-produk lokal yang biasa dikonsumsi masyarakat lokal, Swasembada Beras Berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas Pertanian yang dilaksanakan secara terpadu mulai dari sektor hilir, hulu dan jasa penunjangnya. Jadi pendekatan sektoral harus dirubah menjadi pendekatan intersektoral. Itulah paradigma baru yang dibutuhkan.

Sistem Agribisnis di era Otonomi Daerah diselenggarakan dengan cara meningkatkan keunggulan komparatif pada masing-masing daerah secara bertahap ditransformasikan menjadi keunggulan bersaing melalui pengembangan organisasi ekonomi rakyat seperti koperasi, usaha kecil dan menengah serta pengembangan jaringan bisnisnya.

Koordinasi Antar-Instansi dan pengembangan Organisasi Petani dalam Iklim Demokrasi di era Reformasi, agar petani memiliki organisasi yang kuat untuk memperjuangkan kepentingan politik ekonominya. Organisasi petani harus memiliki pengaruh politik, tapi bukan partai politik. Perkuatan organisasi petani bukan pada *on-farm* tetapi harus ke *off-farm*, sehingga nilai tambah yang besar pada *off-farm* dapat jatuh ke tangan petani melalui koperasinya.

6. Rekomendasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka direkomendasikan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Penyusunan sistem data produktivitas yang akurat berbasis desa. Hal ini dimaksudkan sebagai langkah awal untuk mengembangkan kebijakan yang tepat sesuai kebutuhan lapangan.
- b. Pengembangan kebijakan insentif kepada wilayah yang mampu mendorong produktivitas secara signifikan. Hal ini dimaksudkan sebagai langkah untuk mendorong daya tarik kreativitas dalam bidang pertanian.
- c. Pengembangan penelitian dan pengembangan benih yang memiliki potensi yang lebih tinggi dan lebih adaptif dengan perubahan iklim serta lebih berumur pendek. Hal ini bertujuan sebagai langkah untuk mem-

bangun kekuatan produktivitas pertanian jangka panjang.

- d. Perlindungan lahan yang menjadi basis produktivitas dari alih fungsi lahan. Hal ini dimaksudkan sebagai langkah untuk menjaga masa depan produksi pangan nasional secara berkelanjutan.
- e. Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu (KAPET) harus mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian untuk ekspor yang memiliki keterkaitan kuat dengan kegiatan agribisnis rakyat.
- f. Program dan kebijakan nasional yang konsisten dan terintegrasi satu sama lain. Program pangan dari masing-masing instansi harus dipersatukan menjadi kebijakan dan program nasional yang sistematis, konsisten dan terpadu.
- g. Pembangunan pertanian “dipimpin” oleh para petani dan pengusaha pertanian, sehingga jauh lebih efisien, efektif dan berdaya saing. Pemerintah cukup berperan sebagai fasilitator.
- h. Percepatan pembentukan BUMN dalam bidang pangan. Hal ini dimaksudkan sebagai solusi untuk menaikkan skala usaha bidang pertanian.
- i. Pembentukan Bank dan Asuransi Pertanian. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan investasi di sektor pertanian.
- j. Pemanfaatan data-data dari Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional Lemhannas RI tentang tingkat Ketahanan Nasional Indonesia di masing-masing daerah yang telah dipetakan oleh Lemhannas RI sebagai bahan pertimbangan lanjutan dalam meningkatkan produktivitas pertanian.



Meningkatkan Produktivitas Pertanian Guna Mewujudkan Ketahanan Pangan Dalam Rangka Ketahanan Nasional

Focus Group Discussion (FGD)

- Selasa, 7 Agustus 2012
- Pembicara :
 1. Ekonom *Institute for Develeopment of Economics and Finances* Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin.
 2. Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI Dr. Ir. Tjuk Eko Hari Basuki, MST.
 3. Tenaga Profesional Bidang SKA Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, DEA.
 3. Guru Besar Fakultas Pertanian IPB Prof. Dr. Bungaran Saragih, M.Ec
 4. Komite Ekonomi Nasional Dr. Aviliani, SE, M.Si.
- Penanggap :
 1. Tenaga Profesional Bidang Ekonomi Lemhannas RI Dr. Rosita S. Noor, MA.
 2. Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Ekonomi Lemhannas RI Prof. Dr. Miyasto, SU.
 3. Tenaga Profesional Bidang Ekonomi Lemhannas RI Prof. Dr. Gunawan Sumodiningrat, M.Ec.
 4. Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Sosial Budaya Lemhannas RI Prof. Dr. Sudaryono, SU.

Roundtable Discussion (RTD)

- Rabu, 24 Oktober 2012
- Pembicara :
 1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI Ir. Udhoro Kasih Anggoro.
 2. Utusan Khusus Presiden RI Bidang penanggulangan Kemiskinan Dr. Ir. H.S. Dillon.

Tim Penyusun : Direktorat Pengkajian Bidang Ekonomi



Penguatan Kepemimpinan Nasional di Daerah Dalam Implementasi Sistem Manajemen Nasional guna Mendorong Percepatan Pembangunan Nasional

Kepemimpinan Nasional merupakan posisi yang sangat strategis dalam kehidupan suatu bangsa, sebab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara senantiasa dihadapkan dengan berbagai persoalan yang sering membutuhkan seseorang yang mampu menentukan kebijakan untuk mencari alternatif pemecahannya. Dalam hal ini fungsi pemimpin disamping sebagai penggerak seluruh komponen yang ada dalam masyarakat untuk bersatu padu dalam memecahkan persoalan yang dihadapi bangsa, maka kepemimpinan nasional masa depan harus mampu menentukan prioritas sasaran kepemimpinan dan strategi pokok kepemimpinan yang tepat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara bangsa yang majemuk, karena terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, bahasa dan beragam agama serta adat istiadat

budaya sangat memerlukan kepemimpinan nasional yang mampu mempersatukan dan membangun kehidupan masyarakat yang berwawasan kebangsaan Indonesia.

Menghadapi kondisi yang majemuk tersebut dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu mengelola semua potensi bangsa termasuk pemimpin yang dapat mengatasi krisis yang melanda bangsa Indonesia yang selanjutnya berkembang menjadi krisis multi dimensi pada seluruh aspek kehidupan nasional dan berujung pada krisis kepemimpinan. Untuk mengatasi krisis multidimensi dan untuk menjawab kondisi obyektif dan faktual tersebut dibutuhkan figur pimpinan yang memiliki karakter, integritas, komitmen serta konsisten mengaktualisasikan nilai-nilai amanah dan tetap memelihara nilai-nilai budaya yang melekat dalam kepemimpinan masyarakat dan bangsa Indonesia serta



menjalankan prinsip-prinsip kepemimpinan sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Dalam mengimplementasikan sistem manajemen nasional, pemimpin berperan penting karena sangat menentukan dalam pengambilan keputusan. Kepemimpinan dalam sismennas adalah sebagai input, berfungsi dalam rekrutmen serta pemilihan kepemimpinan yang berperan dalam memberikan masukan tentang ketersediaan orang-orang berkualitas untuk menempati berbagai kedudukan dan jabatan tertentu dalam memegang mandat, tugas dan pekerjaan dalam rangka Tatanan Pengambilan Keputusan yang Berkewenangan. Oleh karena itu, diperlukan kepemimpinan yang berkarakter sosial (*social leadership*), politik (*political leadership*) dan negarawan (*state leadership*) dalam rangka mentransformasikan berbagai masukan dari berbagai aspek kehidupan bangsa ke dalam

juga harus memiliki dan memahami kearifan lokal, seorang pemimpin dalam kepemimpinannya mampu mengkombinasikan antara kepentingan-kepentingan dan jangan mengorbankan masalah lokal (budaya).

Pemerintah dihadapkan dengan tiga tantangan sekaligus peluang secara simultan yaitu: **desentralisasi**, **demokrasi** dan **globalisasi** yang dapat mengangkat harkat kehidupan, atau sebaliknya. Ketiganya membuka ruang bagi kebebasan untuk berekspresi sebagai bentuk pengakuan terhadap hak dan kewajiban yang asasi, saat ini pemerintah perlu menerapkan pendekatan yang aspiratif dan akomodatif dalam rangka penguatan partisipasi bagi perbaikan tatanan kehidupan yang lebih baik, konsekuensinya lembaga pemerintah harus kredibel dan akuntabel karena citra-nya yang dapat diupayakan melalui proses reformasi birokrasi dalam kerangka perbaikan sistem dan mekanisme serta budaya kerja.

diperlukan kepemimpinan yang berkarakter sosial (social leadership), politik (political leadership) dan negarawan (state leadership) dalam rangka mentransformasikan berbagai masukan dari berbagai aspek kehidupan bangsa ke dalam bentuk administratif kebijakan dan untuk mewujudkan pelaksanaannya yang berdaya guna serta berhasil guna.

bentuk administratif kebijakan dan untuk mewujudkan pelaksanaannya yang berdaya guna serta berhasil guna.

Para pemimpin harus mampu dan mau mengakomodasikan diri untuk mulai meninggalkan cara-cara lama kemudian beranjak ke arah perubahan dengan perilaku baru yang positif. Sebagai konsekuensi logisnya, para pemimpin hendaknya selalu berfikir dan berusaha untuk memahami situasi yang berkembang dan melakukan pemecahan masalah yang terjadi. Dalam kepemimpinan di Era transisi, para pemimpin hendaknya dapat memahami dan memadukan keadaan yang saling bergantung dan beragam secara serasi dan seimbang melalui cara-cara berkomunikasi, bernegosiasi dan mengintegrasikan sikap para kolaborator untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin

Untuk mewujudkan penyelenggaraan *good governance*, maka kualitas kepemimpinan nasional merupakan salah satu kunci penting dalam menjamin keberhasilannya.

Kajian Penguatan Kepemimpinan Nasional di Daerah dalam Implementasi Sistem Manajemen Nasional guna mendorong percepatan Pembangunan Nasional dilaksanakan di 2 (dua) lokus yakni Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Riau, kajian tersebut dianalisis secara komprehensif ditinjau dari analisis Astagatra (Geografi, Demografi, Sumber Kekayaan Alam, Ideologi, Politik, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan), yang diharapkan dapat melihat permasalahan secara utuh.

a. Geografi

Kondisi geografi Indonesia yang berada di posisi silang merupakan posisi strategis sekaligus mempunyai ancaman



<http://keishafiorist.com/wp-content/uploads/2013/02/peta-sulawesi-selatan.jpg>

yang tinggi, lokus kajian Provinsi Sulawesi Selatan sangat strategis dan mendukung dalam menjembatani pembangunan nasional Kawasan Timur Indonesia (KTI) mengingat letak Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang kawasan Timur Indonesia dan terletak pada jalur pelayaran Internasional (ALKI-2), disamping itu berpotensi untuk masuk di dalam pasar bebas khususnya menghadapi AFTA (*Asean Free Trade Area*). Lokus Kajian Provinsi Riau juga sangat strategis dikarenakan di sebelah utara yang berbatasan dengan Selat Malaka yang dapat menjadi pintu gerbang perdagangan dan investasi guna mendorong percepatan pembangunan daerah.

Kedua wilayah tersebut memiliki potensi SDA yang cukup baik, baik daratan maupun lautan dalam rangka mendukung pembangunan di wilayah, lahan yang subur disertai iklim yang mendukung menjadikan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan yang ditandai dengan tingginya produktivitas pertanian, dan untuk Provinsi Riau letaknya yang strategis dengan Selat

Kualitas pemimpin nasional di daerah seyogyanya perlu terus ditingkatkan agar memenuhi segi-segi kompetensi, komitmen, profesionalitas, jujur, adil, amanah, berintegritas tinggi dan berpola pikir, pola sikap dan pola tindak yang komprehensif, integral dan holistik demi kepentingan rakyat dan masyarakatnya.

Malaka dan didukung dengan hasil bumi dan pertambangan menjadi modal dasar dalam membuka perdagangan dan investasi dengan negara-negara sahabat.

Meninjau keadaan geografis dua daerah yang strategis tersebut, kepemimpinan nasional di daerah dapat diperkuat melalui peningkatan kapasitas dalam pengelolaan sumber-sumber potensi daerah yang berwawasan nusantara, agar dapat menangkap peluang mengembangkan daerahnya dengan tetap meningkatkan kewaspadaan nasional.

b. Demografi

Aspek demografi berkaitan dengan potensi kependudukan dan penyebaran serta mobilitasnya yang di kaitkan dengan nilai-nilai strategis, sehingga. Aspek demografi dalam sebaran penduduk dan mobilitas terutama keluar wilayah dikaitkan dengan pengembangan potensi ekonomi dan sosial budaya, sehingga pengembangan sistem ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial budaya yang semakin kondusif terhadap proses pembangunan nasional. Peran pemerintah tidak mudah



dalam rangka mensejahterakan penduduk di daerah, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Riau. Fasilitas pendidikan, kesehatan dan kepentingan sosial lainnya dibangun, sebagai bagian dari upaya Pemerintah meningkatkan kualitas SDM di wilayah. Sedangkan keberadaan penduduk sangat penting untuk persyaratan aspek legal pemerintahan dan menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI.

c. Sumber Kekayaan Alam

Potensi sumber kekayaan alam yang tersedia di daerah khususnya Provinsi Sulawesi Selatan dan Riau sangat potensial. Sulawesi Selatan mempunyai potensi pertanian, peternakan dan perkebunan yang sangat besar, sedangkan di Provinsi Riau potensi sumber kekayaan alam dari sektor minyak bumi dan gas (migas) sangat besar. Dari potensi sumber kekayaan alam tersebut, sektor pertanian menjadi salah satu motor penggerak perekonomian rakyat, karena sektor pertanian tidak hanya memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian lokal, tetapi juga mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Dalam pengelolaan sumber kekayaan alam peran pemimpin nasional dihadapkan pada tantangan sejauh mana pemanfaatan sumber kekayaan alam tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna. Pengelolaan sumber kekayaan alam perlu menekankan aspek kesejahteraan dan pemerataan hasil, sehingga pemanfaatannya dapat meningkatkan kemakmuran rakyat. Strategi yang dapat dilakukan adalah pengelolaan sumber kekayaan alam yang berbasis teknologi, yang ditunjang dengan infrastruktur yang memadai. Pemimpin di daerah perlu memiliki kesadaran geografi, ekologi dan teknologi (*geographical, ecological and technological awareness*) pada setiap pengambilan keputusan yang terkait pengelolaan sumber kekayaan alam dengan mempertimbangkan aspek kepentingan masyarakat serta kearifan lokal di daerah.

Pengelolaan sumber kekayaan alam termasuk sumber daya alam juga perlu dipayungi oleh peraturan perundang-undangan dan prosedur yang jelas, ter-

utama yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, khususnya di wilayah perbatasan antar daerah agar tidak menimbulkan konflik kewilayahan yang dapat merembet ke konflik komunal melalui peraturan daerah dalam rangka mewujudkan kemakmuran masyarakat.

d. Ideologi

Kepemimpinan nasional di daerah tidak dapat terlepas dari sistem politik nasional yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan. Oleh karena itu, penguatan peran kepemimpinan nasional di daerah harus mampu bertumpu pada paradigma nasional, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika, hal tersebut merupakan fondasi utama dalam setiap tugas pemimpin, dan pemimpin juga mempunyai tanggung jawab untuk mengamalkan serta menyebarluaskan pemahaman tersebut kepada masyarakat yang dipimpinnya.

Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan dan Riau pada umumnya telah mengetahui dan memahami akan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara yang merupakan alat pemersatu bangsa. Beberapa permasalahan yang perlu diwaspadai adalah maraknya ideologi fundamentalisme agama yang diikuti dengan aksi kekerasan, maraknya aksi anarkis. Pemimpin berperan penting dalam menumbuhkan serta menjaga semangat toleransi dengan menekankan pada nilai-nilai persatuan dan kesatuan sesuai Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

e. Politik

Era Reformasi yang terjadi pada bangsa Indonesia menuntut dilaksanakannya demokratisasi dalam berbagai bidang pembangunan, khususnya dibidang Politik.

Dengan diberlakukannya secara optimal, sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Riau dalam Implementasi lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 tahun



2004 beberapa Kabupaten/Kota masih menghadapi kendala dalam dukungan anggaran maupun mekanisme kerja antar Kabupaten/Kota bagi proses pembangunan di Daerah. Hal ini telah disadari oleh Pemerintah Pusat, yang telah berupaya untuk merevisi Undang-Undang tersebut. Kebijakan Otonomi Daerah yang dituangkan melalui UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU RI No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Ditinjau dari sistem administrasi penyelenggaraan pemerintahan tidak ditemui kendala yang berarti, tetapi dari jiwa dan semangatnya telah menimbulkan arogansi dan semangat kedaerahan yang berlebihan ter-

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) pemerintah maupun sasaran pembangunan jangka panjang agar percepatan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat tercapai.

f. Ekonomi

Indikator dari peningkatan perekonomian suatu daerah adalah dengan melihat pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Riau menunjukkan angka yang positif, sampai akhir 2012 pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 8,45% dan Provinsi Riau 7,7% yang keduanya di atas target pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 6,5%. Adanya kerja sama regional meningkatkan *sinergisitas* dan *interkoneksi* kegiatan ekonomi antar wilayah.

Penguatan Kepemimpinan Nasional di Daerah dalam Implementasi Sistem Manajemen Nasional guna Mendorong Percepatan Pembangunan Nasional merupakan gambaran yang harus disikapi secara serius sehingga mendapatkan solusi nyata.

utama bagi daerah-daerah surplus yang cenderung tidak selalu sejalan dengan Pemerintah Pusat. Kepemimpinan nasional telah terpolarisasi antara pusat-daerah yang sangat rentan terhadap konflik vertikal, sehingga perlu pemahaman dan implementasi sistem manajemen nasional secara komprehensif, integral dan holistik dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, mulai dari tingkat Propinsi sampai tingkat Kelurahan.

Secara umum, seluruh komponen bangsa di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Riau telah memperlihatkan kesungguhan dalam menjaga stabilitas keamanan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, walaupun masih terdapat beberapa aksi demonstrasi yang berlebihan, khususnya di kalangan pelajar/mahasiswa. Dalam pembangunan, pemimpin/kepala daerah perlu menyelaraskan visi dan misi pembangunan dengan pemerintah pusat, setiap kebijakan pembangunan daerah perlu diselaraskan dengan Rencana

Sektor perdagangan baik perdagangan dalam negeri maupun luar negeri saat ini mengalami peningkatan.

Dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan, implementasinya masih menemui beberapa hambatan. Mengingat masih besarnya peranan pemerintah untuk melindungi sektor ekonomi strategis seperti industri minyak, gas, hutan, dan perkebunan. Kekuatan ekonomi yang tersedot ke pusat, membuat tingkat pemerataan dan kesejahteraan masyarakat daerah belum optimal. Meskipun demikian, ekonomi kerakyatan sangat potensial dikembangkan baik di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Riau, mengingat sistem sosial budaya masyarakatnya yang kondusif untuk mempercepat pelaksanaan sistem ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Riau sangat potensial, karena basis ekonominya adalah sektor pertanian, serta struktur ekonomi bawah yang sangat kuat, dikarenakan



<http://4.bp.blogspot.com/-IKtDSi69n64/UUu8W5zKXHI/AAAAAAAAXZ8/g7zzzWligrQ/s1600/peta+riau.jpg>

besarnya peran UMKM. Untuk dapat membangun ekonomi kerakyatan, pemimpin di daerah perlu mendorong lembaga-lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank untuk memberi keberpihakan bagi pembangunan ekonomi mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta program-program yang menyentuh langsung dan dapat membangkitkan perekonomian rakyat.

g. Sosial Budaya

Euforia reformasi mengakibatkan tidak dipatuhinya supremasi hukum dan dengan mengatasnamakan demi reformasi dan demokrasi, kelompok-kelompok masyarakat sering melakukan tindakan-tindakan destruktif serta anarkis, sehingga membuat aparat keamanan terpaksa melaksanakan tindakan represif menjadi kurang berwibawa. Tuntutan terhadap penyempurnaan produk-produk hukum yang kurang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi semakin meningkat. Dalam kaitan itu, penguatan kepemimpinan nasional di daerah dalam penyempurnaan produk hukum dan penegakan hukum serta sikap keteladanan terhadap rakyat akan menciptakan suasana kepatuhan hukum dan tegaknya HAM dapat ditingkatkan.

Informasi yang secara leluasa masuk melalui media cetak maupun elektronika telah menyebabkan masuknya nilai budaya

asing yang terkadang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan agama, sehingga menimbulkan terjadinya kegamangan budaya serta penyempitan wawasan kebangsaan masyarakat Indonesia. Akibat selanjutnya adalah masyarakat sering berperilaku menyimpang dari tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah dibangun selama ini. Untuk menjawab tantangan tersebut diperlukan kepemimpinan di daerah yang cerdas, tegas, memiliki etika

dan moral yang baik, visioner, antisipatif dan akomodatif serta patut diteladani oleh masyarakat di daerahnya.

h. Pertahanan dan Keamanan

Kondisi Pertahanan dan Keamanan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Riau pada umumnya cukup terkendali. Kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan cukup baik, hal ini terlihat dari rendahnya tingkat kerusuhan maupun rendahnya konflik sosial. Dalam pelaksanaan pertahanan dan keamanan, aparat keamanan masih dihadapkan pada keterbatasan sarana dan prasarana, kemampuan aparat dan lemahnya manajemen operasional.

Pemimpin di daerah khususnya melalui Pemerintah Daerah, satuan TNI dan Polri perlu meningkatkan melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan terhadap penduduk di wilayah. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan keamanan dan kesejahteraan dengan melibatkan aparat pemerintah maupun melalui kemitraan dengan unsur masyarakat, tokoh masyarakat termasuk media massa dengan program antara lain : Peningkatan kerjasama dan kemitraan dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah, Pelibatan masyarakat dalam penanganan masalah ketertiban, serta Pengembangan penyediaan fasilitas infrastruktur dasar, penataan dan pembinaan usaha sektor informal serta



http://i.okezone.tv/photos/2012/11/08/7736/47911_large.jpg

penanggulangan masalah sosial. Pada akhirnya jika di sektor pertahanan dan keamanan terjaga dengan baik maka akan mendukung terlaksananya percepatan pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dari berbagai permasalahan, kondisi awal dan faktor-faktor yang mempengaruhi menjelaskan data dan fakta, lingkungan strategis serta analisa dapat disimpulkan bahwa Penguatan Kepemimpinan Nasional di Daerah dalam Implementasi Sistem Manajemen Nasional guna Mendorong Percepatan Pembangunan Nasional merupakan gambaran yang harus disikapi secara serius sehingga mendapatkan solusi nyata. Adapun upaya yang merupakan arah kebijakan dan langkah strategis adalah sebagai berikut :

a. Arah Kebijakan

- 1) Terwujudnya kepemimpinan nasional di daerah yang selaras dengan Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dalam mengimplementasikan sistem manajemen nasional guna mendorong percepatan pembangunan nasional.

- 2) Terwujudnya pemerintahan yang efektif yang ditopang oleh kepemimpinan yang kuat sehingga terlaksananya pembangunan yang komprehensif, integral dan berkesinambungan bagi generasi yang akan datang.
- 3) Terwujudnya pemerintahan yang *good governance* dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang mempunyai kapasitas dan kompetensi bagi terselenggaranya pemerintahan yang berintegritas, bersih dan akuntabel.
- 4) Terbentuknya sistem kaderisasi serta rekrutmen kepemimpinan nasional di daerah yang mengedepankan aspek integritas, sikap kenegarawanan, kapabilitas di seluruh lapisan komponen masyarakat baik formal maupun informal.
- 5) Terciptanya kepastian hukum di daerah melalui kebijakan pemimpin daerah yang ditopang oleh peraturan perundang-undangan yang tegas dan jelas sehingga memicu peningkatan investasi maupun kegiatan perekonomian rakyat.



b. Langkah- Langkah Strategis.

- 1) Melaksanakan pemerintahan yang *good governance* dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta menciptakan kepastian hukum yang didukung aparatur negara yang bersih dan berwibawa.
- 2) Mendorong para pemimpin nasional di daerah untuk tetap berpedoman pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika dalam setiap pengambilan keputusan dapat mencerminkan etika bernegara.
- 3) Mengedepankan proses rekrutmen dan kaderisasi calon pemimpin yang memiliki karakter nasional di setiap partai politik dan komponen bangsa, ditopang oleh peraturan perundang-undangan yang tegas.
- 4) Mempersyaratkan pendidikan karakter sebagai kriteria bagi calon pemimpin nasional dari seluruh unsur komponen bangsa, agar memahami manajemen pemerintahan, pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan.
- 5) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan ekonomi kreatif guna men-sukseskan upaya peningkatan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Dari hasil kajian yang dibangun dengan mengikutsertakan segenap komponen bangsa di daerah terkait substansi kajian yaitu Lembaga/Kementerian Pemerintah, Legislatif, TNI-POLRI, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pers, Komunitas Bisnis dan Tokoh Masyarakat, dapat disimpulkan dan disarankan hal-hal sebagai berikut :

a. Kesimpulan.

- 1) Peran Kepemimpinan Nasional di Daerah saat ini, memang telah memahami suatu perubahan yang sangat signifikan, oleh

sebab itu penanganannya harus hati-hati dan konseptual. Beberapa kritik terhadap peran kepemimpinan nasional di Daerah, antara lain masih terdapatnya Gubernur, Bupati atau Walikota yang kurang tepat dalam menjabarkan dan mensosialisasikan jabsaran Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya para pemimpin di Daerah saling berlomba membangun daerahnya masing-masing, tetapi mendapat tantangan dari masyarakatnya, tanpa memperhatikan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian dengan pembangunan di Daerah lainnya.

- 2) Kecenderungan lainnya yang ditemui dengan diterapkannya kebijakan Otonomi diletakkan sepenuhnya pada Kabupaten dan Kota, adalah kedudukan Kepala Daerah semata-mata sebagai alat Daerah dan hanya bertanggung jawab kepada DPRD. Kondisi ini berakibat secara hukum memang DPRD berhak memberhentikan Bupati atau Walikota, tetapi harus dapat dipertanggung-jawabkan secara jelas. Akibat preseden tersebut, kondisi politik di Daerah akan lebih dan mudah terguncang karena adanya ketidakpastian masa jabatan Bupati dan Walikota.
- 3) Selanjutnya mencermati fenomena kehidupan politik di Daerah, masih banyak terjadinya konflik dan pertikaian atau benturan antar komponen masyarakat Euforia ini mengindikasikan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam kehidupan pemerintahan di daerah masih memerlukan langkah perbaikan yang bersifat esensial. Hal ini, tentunya sangat terkait dengan kebijakan Daerah yang merupakan hasil kinerja dan peranan kepemimpinan nasional di Daerah. Oleh karena itu, optimalisasi peran pimpinan di Daerah merupakan konsekuensi logis, serta tuntutan jaman yang harus dilakukan.



Kepemimpinan nasional di daerah tidak dapat terlepas dari sistem politik nasional yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan.

- 4) Kualitas pemimpin nasional di daerah seyogyanya perlu terus ditingkatkan agar memenuhi segi-segi kompetensi, komitmen, profesionalitas, jujur, adil, amanah, berintegritas tinggi dan berpola pikir, pola sikap dan pola tindak yang komprehensif, integral dan holistik demi kepentingan rakyat dan masyarakatnya.

b. Saran

Untuk mendukung penguatan kepemimpinan nasional di daerah dalam implementasi sistem manajemen nasional guna mendorong percepatan pembangunan nasional beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Dalam rangka menumbuhkembangkan kehidupan yang lebih demokratis dan guna mewujudkan seorang Kepala Daerah yang kuat dan mantap sebagai figur-figur terpilih perlu segera dikembangkan Peraturan Per-Undang-Undangan yang mengatur tentang tata cara pemilihan Kepala Daerah Tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota melalui sistem pemilihan umum secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh rakyat di Daerah yang bersangkutan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Dengan demikian akan memungkinkan rakyat memiliki tingkat kepercayaan yang

tinggi Kepala Daerah terpilih, dan tercipta pemerintahan daerah yang stabil.

- 2) Perlu dilakukan penyebarluasan atau pemasyarakatan Wawasan Kebangsaan kepada seluruh komponen bangsa di daerah, yang diawali contoh teladan dari para pimpinan di daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini, langkah yang efektif adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) atau Intruksi Presiden (Perpres) tentang perlunya pemahaman dan penghayatan terhadap Wawasan Nasional serta Ketahanan Nasional, serta secara berkesinambungan melaksanakan sosialisasi 4 (empat) pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 3) Perlu diadakan penegasan dalam UU bahwa Otonomi Daerah yang dikembangkan adalah Otonomi Daerah yang berbasis kultur tetapi tetap Berwawasan Kebangsaan memperkokoh keutuhan NKRI 17 Agustus 1945.
- 4) Perlu diadakan penataran Sistem Manajemen Nasional kepada Pemimpin dan Aparat Birokrasi di Daerah guna meningkatkan kemampuan manajemen pemerintahan yang profesional.



Penguatan Kepemimpinan Nasional Di Daerah dalam Implementasi Sistem Manajemen Nasional guna Percepatan Pembangunan Nasional

Focus Group Discussion (FGD)

- Rabu, 29 Agustus 2012
- Pembicara :
 1. CEO Perum LKBN ANTARA Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf.
 2. Peneliti Senior LIPI Prof. Dr. Syamsuddin Haris, Msi.
 3. Guru Besar Administrasi Negara Fisip Universitas Indonesia Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, MSi.

Roundtable Discussion (RTD)

- Jumat, 10 Agustus 2012
- Pembicara :
 1. Wakil Presiden RI Periode 2004-2009 Drs. H. M. Jusuf Kalla
 2. Gubernur DKI Jakarta Ir. H. Joko Widodo
 3. Gubernur Sulawesi Selatan Dr. H. M. Syahrul Yasin Limpo, M.Si
 4. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia Prof. Dr. Iberamsjah, MS

• Penanggung :

1. Tenaga Profesional Bidang Sismennas Lemhannas RI Marsda TNI (PURN) DR. Ir. S. Suharsa, M. Eng. Sc.
2. Tenaga Profesional Bidang Geopolitik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Kazan Gunawan.
3. Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Ketahanan Nasional Lemhannas RI Mayjen TNI M. Nasir Majid.
4. Tenaga Ahli Pengkaji Madya Bid. Ekonomi Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Fashbir Noor Sidin, SE, MSP.

Tim Penyusun : Direktorat Pengkajian Bidang Politik



Aktualisasi Semangat Kebangkitan Nasional guna Memantapkan Wawasan Kebangsaan Lintas Generasi dalam Rangka Ketahanan Nasional

Sejarah panjang bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kebangkitan nasional yang telah diperjuangkan oleh para perintis pergerakan nasional lintas generasi. Bangsa ini telah mengalami beberapa puncak kebangkitan nasional, diantaranya yaitu mulai dari terbentuknya Sarekat Dagang Islam (1905) yang kemudian menjadi Sarekat Islam (1906), berdirinya Boedi Oetomo (20 Mei 1908); Soempah Pemoeda (28 Oktober 1928), Proklamasi Kemerdekaan (17 Agustus 1945), sampai kepada upaya-upaya memodernisasi bangsa dan negara, dengan fokus kepada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya

sejak dimulainya Repelita I Tahun 1969 hingga periode reformasi saat ini. Salah satu persoalan besar yang dihadapi bangsa dan negara ini adalah bagaimana memelihara dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kebhinnekaan, selain itu bangsa Indonesia juga dihadapkan pada tantangan strategis yakni mewujudkan Visi Indonesia 2025.

Visi Indonesia 2025 yaitu Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur, berkaitan erat dengan semangat kebangkitan nasional, karena kemandirian berarti menuju kesetaraan dengan negara-negara



maju diukur dari keunggulan dan daya saing dengan mengutamakan kemampuan dan kekuatan sendiri serta menempatkan bantuan asing hanya sebagai pelengkap. Maju ditunjukkan oleh peningkatan kualitas sumberdaya manusia, tingkat kemakmuran, kemantapan sistem politik dan penegakan hukum. Adil ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antar individu dan diskriminasi berdasar *gender* di muka hukum, keterbukaan dalam mengakses sumber-sumber, hilangnya ketimpangan pembangunan antar daerah serta kecilnya kesenjangan antara si kaya dengan si miskin. Sedangkan makmur diukur dari pemenuhan kebutuhan hidup layak sebagai manusia yang bermartabat. Visi ini sebagai arah yang harus dituju oleh setiap individu, lembaga dan organisasi di Indonesia dalam mewujudkan tujuan nasional secara bertahap dan berkelanjutan melalui pembangunan nasional yang berparadigma *pro-poor*, *pro-job*, *pro-growth*, *pro-green* dan *pro-democracy* (termasuk *pro-decentralization*) dalam rangka menjawab tantangan nasional dan global.

Wawasan kebangsaan sebagai salah satu aktualisasi nilai-nilai dasar kebangkitan nasional perlu ditularkan kepada seluruh rakyat Indonesia lintas generasi untuk memperkokoh ketahanan bangsa di era globalisasi. Hal ini dikarenakan Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam mengekspresikan jati diri bangsa di tengah tatanan kehidupan dunia. Wawasan Kebangsaan juga mencerminkan hasrat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dalam kebersamaan untuk mengatasi semua hambatan dan tantangan, baik dari luar maupun dari dalam negeri, termasuk rasa kebersamaan dalam menghadapi ancaman separatisme dan radikalisme yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Wawasan Kebangsaan memberi nilai strategis tentang karakter bangsa, semangat kebersamaan, toleransi dan saling

menghormati, rasa bangga sebagai Bangsa Indonesia dan kesadaran hidup bernegara dan bermasyarakat dengan menjiwai dan berpegang teguh kepada Pancasila sebagai Dasar Negara. Bangsa yang besar memiliki kehendak kuat untuk hidup bersama, cita-cita bersama, memiliki sejarah hidup bersama, memiliki rasa senasib-sepenanggungan, memiliki karakter dan nilai-nilai serta adat budaya yang khas, namun tetap terbuka dan selektif terhadap pengaruh-pengaruh dari luar. Wawasan Kebangsaan sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negara yang dikaitkan dengan konsep Wawasan Nusantara dalam rangka membina kesadaran bersama tentang kesatuan wilayah, bangsa, bahasa dan pemerintahan. Wawasan Kebangsaan selaras dengan Visi Indonesia 2025 dan Paradigma Nasional dalam rangka Ketahanan Nasional yang mantap, dinamis dan demokratis dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Aktualisasi Semangat Kebangkitan Nasional guna Memantapkan Wawasan Kebangsaan Lintas Generasi dalam rangka Ketahanan Nasional dianalisis secara komprehensif ditinjau dari analisis Astagatra (Geografi, Demografi, Sumber Kekayaan Alam, Ideologi, Politik, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan), yang diharapkan dapat melihat permasalahan secara utuh.

1. Geografi

Letak Indonesia yang sangat strategis terletak di antara dua benua dan dua samudera menyebabkan Indonesia menjadi “incaran” asing dan menjadi wilayah pengaruh dari negara-negara maju.

Dengan posisi strategis yang demikian, diimbangi Indonesia yang kuat di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, akan disegani oleh dunia internasional dan memperkuat diplomasi Indonesia dengan luar negeri. Sebaliknya, Indonesia yang lemah karena dibebani hutang luar negeri yang cukup banyak, *bad governance*, kemiskinan dan rakyatnya terpecah-belah karena primordialisme sempit, pastilah akan mudah ditekan dan dipecah-belah oleh kekuatan-kekuatan asing.



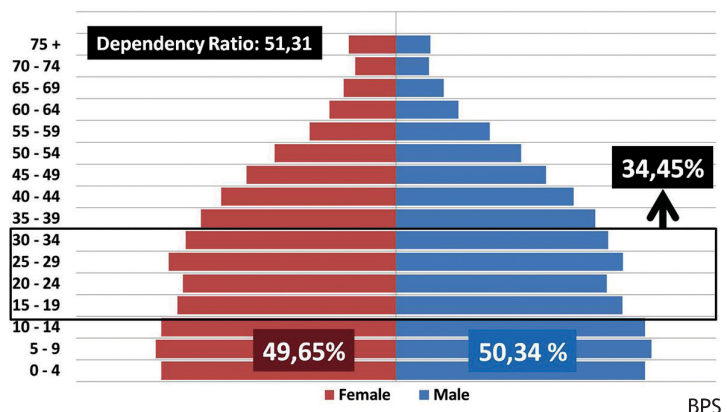
Pemerintah sebaiknya menjaga wilayah perbatasan Negara, agar tidak dicaplok oleh negara tetangga. Kurang perhatiannya Pemerintah pada wilayah-wilayah perbatasan negara dapat menimbulkan konflik atau sengketa tapal batas dengan negara tetangga. Kasus-kasus Sipadan-Ligitan, Ambalat, Camar Bulan di Sambas (Kalimantan Barat) dan lain-lain seyogyanya menjadi perhatian dan pelajaran berharga bagi Pemerintah dan seluruh komponen bangsa untuk menjaga perbatasan negara melalui pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan secara bersama-sama.

2. Demografi

Jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah kurang lebih 235 juta jiwa merupakan potensi pembangunan yang sangat penting apabila diikuti dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik ditunjang dengan teknologi yang maju. Jumlah usia produktif penduduk Indonesia cukup besar, sehingga prospektif untuk pembangunan bangsa. Melihat struktur penduduk pada tahun 2010, kelompok usia produktif dan menjelang produktif jumlahnya sangat banyak, kelompok usia 0-9 tahun berjumlah 45,93 juta orang, kelompok usia 10-19 tahun berjumlah 43,55 juta orang, kelompok usia 20-29 tahun berjumlah 41,20 juta orang dan kelompok usia 30-39 tahun berjumlah 38,34 juta orang. Potensi tersebut merupakan momentum yang tidak boleh disia-siakan karena ada fenomena bonus demografi (*demographic deviden*) sebagai “jendela kesempatan” (*the window of opportunity*) untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Kaum perempuan yang jumlahnya sangat besar perlu didayagunakan dan diberi kesempatan lebih besar untuk duduk dalam posisi-posisi strategis dalam

lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan semua bidang kehidupan bangsa.

Untuk menyiapkan potensi “kuantitas” yang besar tersebut menjadi “kualitas” yang mampu bersaing dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan dibutuhkan pendidikan, sehingga penduduk mempunyai pengetahuan (*knowledge*), keterampilan, agar mempunyai produktivitas yang dibutuhkan pasar kerja, maupun penciptaan lapangan kerja baru. Ketika penduduk mempunyai produktivitas, maka akan mendatangkan pendapatan, ketika ada pendapatan, maka ada konsumsi dan roda perekonomian



akan terus bergerak menciptakan kesejahteraan. Namun, jika sebaliknya potensi “kuantitas” yang besar tersebut tidak diiringi oleh pengetahuan dan keterampilan, maka yang terjadi adalah *demographic disaster* atau bencana demografi yang dapat menimbulkan pengangguran serta berujung pada kerentanan sampai disintegrasi sosial dan yang terburuk adalah terjadinya disintegrasi bangsa Indonesia.

3. Sumber Kekayaan Alam

Berbagai upaya perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang telah dilakukan masih memerlukan tindak lanjut mengingat masih banyaknya masalah serta tantangan yang dihadapi Indonesia.

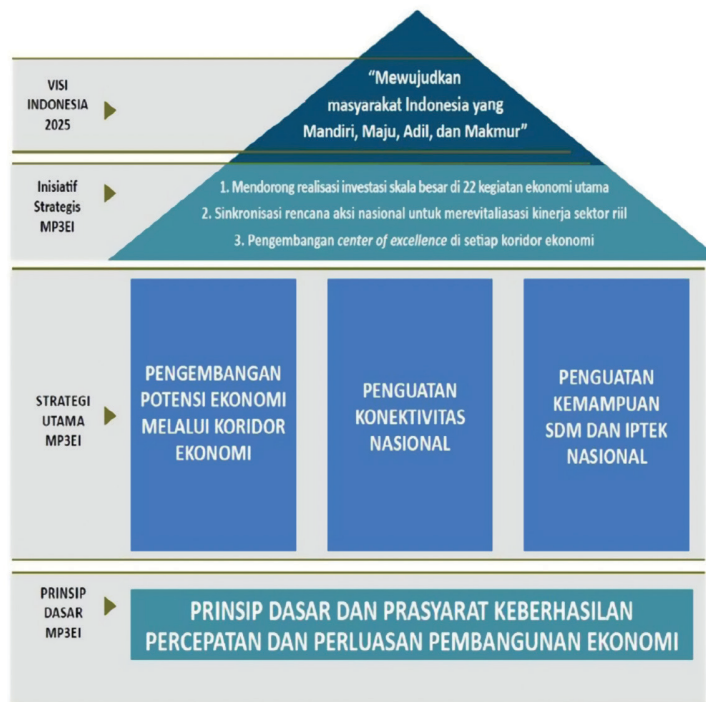


Visi Indonesia 2025 yaitu Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur, berkaitan erat dengan semangat kebangkitan nasional, karena kemandirian berarti menuju kesetaraan dengan negara-negara maju diukur dari keunggulan dan daya saing dengan mengutamakan kemampuan dan kekuatan sendiri serta menempatkan bantuan asing hanya sebagai pelengkap.

Di bidang energi, Indonesia bisa menjadi pengeksportir bahan baku primer dan biofuel terbesar di dunia. Peter Rosler Garcia, ahli politik dan ekonomi luar negeri dari Jerman menyebutkan, dengan menyempurnakan teknologi pertambangan laut dalam (*deep-water*), Indonesia bisa kembali menjadi eksportir bahan-bahan tambang, gas dan minyak bumi. Data Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2010 menunjukkan kualitas air sungai di kota-kota besar di Indonesia turun karena tercemar limbah industri dan rumah tangga. Begitu pula pencemaran udara dari pabrik dan kendaraan bermotor.

Dari laporan Forest Watch Indonesia (2000-2009), angka kehilangan hutan (deforestasi) di Indonesia diperkirakan mencapai 15,2 juta ha, dengan kecepatan 1,5 juta ha/tahun. Sementara itu, deforestasi hutan gambut mencapai 2 juta ha. Diperkirakan hingga tahun ini 26 juta ha hutan di Indonesia telah musnah. Deforestasi tidak hanya mengganggu fungsi ekologis hutan, tetapi juga dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati.

Berbagai bencana alam saat ini tak terlepas dari kerusakan lingkungan. Bila memperhatikan kondisi saat ini, pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan lebih serius lagi. Menjaga dan



<http://www.ristek.go.id/file/gallery/2012/02/image001.jpg>

melestarikan alam dan lingkungan hidup merupakan kewajiban moral seluruh umat manusia termasuk bangsa Indonesia.

Persoalan lingkungan terjadi karena lemahnya perencanaan dan pengendalian dalam pengelolaan sumber daya alam. Untuk mengatasinya, sesegera mungkin harus dilakukan upaya meningkatkan nilai sumber daya alam dan lingkungan



serta mengurangi eksternalitas negatif industrialisasi.

4. Ideologi

NKRI berdiri berkat adanya kebulatan tekad, semangat, visi dan cita-cita bersama seluruh komponen bangsa dari berbagai penjuru nusantara dengan berbagai latar belakang suku, agama, budaya dan bahasa, untuk bersatu mendirikan negara merdeka dan berdaulat yang kemudian diberi nama Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 menegaskan tentang pentingnya satu tanah Air, satu Bangsa, dan satu Bahasa, yakni Indonesia. Selanjutnya, pernyataan kepada dunia internasional mengenai berdirinya Indonesia yang merdeka dan berdaulat, dikumandangkan oleh dwitunggal Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebelumnya, pada 1 Juni

1945, Pancasila secara resmi lahir dari kandungan Nusantara dengan Ir. Soekarno sebagai tokoh yang sangat berjasa atas pemikiran dan perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Momen-momen yang sangat bersejarah itu, semuanya sulit dipisahkan dari perjuangan-perjuangan sebelumnya yang telah dirintis terlebih dahulu oleh para tokoh dan cerdik-cendekia Nusantara, khususnya yaitu dengan berdirinya Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908. Sampai sekarang, setiap tanggal 20 Mei bangsa Indonesia memperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

Bagi Indonesia, wawasan kebangsaan adalah *discourse* yang akan selalu relevan

untuk didiskusikan dan dikembangkan dari masa ke masa. Wawasan kebangsaan yang dimaksud adalah suatu cara pandang untuk melihat keanekaragaman (pluralitas) sumber daya, politik, ekonomi, dan sosial budaya sebagai modal dalam menghadapi persaingan antar bangsa-bangsa, terutama dalam era globalisasi sekarang ini. Dalam era globalisasi, kompetisi terjadi bukan hanya antara negara dengan negara saja, melainkan juga antar provinsi, kabupaten dan kota, dari berbagai negara. Kompetisi kita dengan negara luar dapat

dihadapi antara lain dengan mempererat kerjasama antar komponen Bangsa Indonesia di semua bidang kehidupan.

Dalam rangka menghadapi berbagai hambatan, tantangan, dan ancaman dari dalam dan luar negeri yang menimbulkan banyak ketidakpastian saat ini, Pancasila merupakan “jawaban” atas berbagai masalah tersebut. Dengan Pancasila sebagai dasar negara, maka kita tidak akan

mudah terombang-ambing oleh berbagai ketidakpastian.

5. Politik

Transisi demokrasi menghendaki kepemimpinan nasional yang tegas dan efektif, penegakan hukum yang berkeadilan, parpol-parpol yang akuntabel serta *civil society* yang kuat, agar integrasi nasional tetap terjaga. Demokrasi dipilih karena adanya nilai-nilai universal yang sesuai dengan nilai-nilai humanisme, yakni adanya kebebasan berpendapat dan berserikat, kebebasan berpartisipasi politik, persamaan di depan hukum, keterbukaan terhadap akses sumber daya ekonomi, kebebasan pers dan lain-lain.

Wawasan Kebangsaan memberi nilai strategis tentang karakter bangsa, semangat kebersamaan, toleransi dan saling menghormati, rasa bangga sebagai Bangsa Indonesia dan kesadaran hidup bernegara dan bermasyarakat dengan menjiwai dan berpegang teguh kepada Pancasila sebagai Dasar Negara.



Terlepas dari ekseseks negatifnya, demokratisasi yang berlangsung sejak 1998 ternyata mampu diterima dengan relatif baik oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Bahkan, dapat dikatakan demokratisasi telah ikut menyelamatkan NKRI dari ancaman disintegrasi akibat tuntutan merdeka atau federalisme dari sejumlah daerah menjelang Reformasi 1998. Akan tetapi, otonomi daerah dan desentralisasi di era reformasi, sedikit banyak telah mengakomodasi tuntutan daerah-daerah tersebut, kecuali Papua yang masih bermasalah. Sedangkan Aceh yang tadinya bergolak, saat ini banyak mengalami kemajuan karena mengalami transformasi politik demokrasi dari tadinya perjuangan bersenjata melawan NKRI. Aksi-aksi terorisme oleh kelompok-kelompok radikal juga menyurut berkat tindakan tegas dari Pemerintah dan adanya upaya-upaya Pemerintah melakukan de-radikalisasi kelompok-kelompok tertentu.

Negara Indonesia yang berdimensi persatuan, sebagai ekspresi dan pendorong semangat kegotong-royongan, harus mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, bukan membela atau mendiamkan suatu unsur masyarakat atau bagian tertentu dari teritorial Indonesia. Negara juga diharapkan mampu memberikan kebaikan bersama bagi warganya, tanpa memandang siapa dan dari golongan, etnis, atau agama apa mereka. Usaha mewujudkan negara persatuan itu dapat diperkuat dengan budaya gotong-royong dalam kehidupan masyarakat sipil dan politik dengan terus mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dan multi-kulturalisme yang dapat membangun rasa keadilan dan kebersamaan, dengan dilandasi prinsip-prinsip kehidupan publik yang lebih partisipatif dan non-diskriminatif.

Dalam memperkuat daya gotong-royong itu, keinginan hidup menjadi satu bangsa tidak akan mengarah pada nasionalisme yang sempit dan tertutup. **Kedalam**, kemajemukan dan aneka

perbedaan yang mewarnai kebangsaan Indonesia tidak boleh dipandang secara negatif sebagai ancaman yang bisa saling merugikan. Sebaliknya, hal itu perlu disikapi secara positif sebagai limpahan karunia yang bisa saling memperkaya khazanah budaya dan pengetahuan lewat proses penyerbukan silang budaya. Puncak-puncak kebudayaan daerah dan hasil persilangan antar budaya daerah terhitung sebagai kebudayaan bangsa yang dapat memperkuat kepribadian nasional. Bahasa daerah dan penyerapan bahasa antar daerah bisa menjadi sumber pengayaan bahasa nasional. **Keluar**, nasionalisme Indonesia juga nasionalisme yang memuliakan kemanusiaan universal dengan menjunjung tinggi persaudaraan, perdamaian dan keadilan antar umat manusia.

6. Ekonomi

Menurut John Naisbit dalam bukunya *Megatrends Asia* (1996), masa depan dunia adalah era keemasan Asia. Beberapa negara Asia bahkan telah menunjukkan kebangkitan ekonomi mereka, seperti misalnya Korea Selatan, India, China dan Vietnam, di samping Jepang yang sudah lebih dulu menjadi negara maju. Indonesia akan menjadi “macan” ekonomi Asia bila rakyat miskin yang saat ini berjumlah lebih dari 32 juta jiwa, tidak miskin lagi. Kesenjangan yang lebar antara si kaya dengan si miskin di negara kita menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi sumber-sumber ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan kebijakan pemerataan untuk mengatasi kesenjangan tersebut, termasuk dengan melakukan evaluasi penguasaan ekonomi (termasuk pertanahan) di Indonesia yang dikuasai oleh segelintir elit, agar tidak merugikan mayoritas rakyat Indonesia.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini paradigma pembangunan dituntut untuk lebih partisipatif dan pro-rakyat, hal tersebut selaras dengan tujuan otonomi daerah dan desentralisasi itu sendiri yakni untuk percepatan pencapaian



kesejahteraan rakyat. Upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan percepatan pencapaian kesejahteraan rakyat dapat dilakukan antara lain dengan membuat regulasi-regulasi yang pro-ekonomi kerakyatan. Dalam keadaan ini, maka pembangunan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, akan terwujud, sehingga dapat membantu meringankan tugas-tugas pemerintah dalam mensejahterakan rakyat. Pada gilirannya, setiap pihak akan merasa menjadi bagian dari bangsa besar ini dan akan meningkatkan *sense of belongingness* (rasa memiliki) terhadap NKRI. Kalau faktor ini terwujud, maka nasionalisme dan patriotisme akan

menjadi tendensi untuk mencari titik temu (persamaan). Dalam pada itu, warga juga bisa menemukan suasana saling pengertian, pada titik mana mereka bisa berbeda, dan pada titik mana pula mereka harus bersama.

Aktualisasi semangat Kebangkitan Nasional merupakan aktivitas terbuka, dalam arti menjadi kebutuhan semua pihak dan melibatkan semua pihak dalam upaya bersama menjaga integritas bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai konsep budaya, aktualisasi semangat Kebangkitan Nasional digali dan diwujudkan dalam wawasan kebangsaan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

NKRI berdiri berkat adanya kebulatan tekad, semangat, visi dan cita-cita bersama seluruh komponen bangsa dari berbagai penjuru nusantara dengan berbagai latar belakang suku, agama, budaya dan bahasa, untuk bersatu mendirikan negara merdeka dan berdaulat yang kemudian diberi nama Indonesia.

tertanam kuat dalam sanubari setiap anak bangsa.

7. Sosial Budaya

Karakter setiap bangsa relatif berbeda satu sama lain, maka jalan kemajuan suatu bangsa tidak hanya cukup dengan menerima atau menyerap begitu saja cara yang ditempuh oleh bangsa lain. Oleh karena itu, Indonesia harus mampu mencari jalan kemajuannya sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang menghormati nilai-nilai Pancasila.

Penguatan nasionalisme politik memerlukan kesetaraan kesempatan dan interaksi sosial. Sekolah-sekolah publik dan ruang publik lainnya harus bisa diakses oleh orang dari latar belakang agama dan etnis apa pun serta menjadi wahana penyerbukan silang budaya (*cross-culture fertilization*) yang dapat memperkuat budaya kewargaan (*civic culture*).

Dengan adanya kesetaraan dan keleluasaan dalam partisipasi publik, obsesi pada perbedaan akan beralih

Karena itu, dibutuhkan penciptaan suasana ke-Indonesiaan yang nyaman untuk semua, untuk terus menguatkan rasa *at home* dalam diri setiap warga negara dalam rumah yang bernama Indonesia. Sehubungan dengan itu, maka hanya dengan toleransi, kerjasama, dan saling menghormati dalam keberagaman, maka “rumah Indonesia” itu akan “hadir” dalam realita hidup sehari-hari bangsa Indonesia. Selain itu, pemerintah beserta seluruh jajarannya harus memberikan keteladanan yang baik kepada rakyat sebagai wujud nyata dari praktik wawasan kebangsaan oleh para penyelenggara negara.

8. Pertahanan dan Keamanan

Dalam konteks wawasan kebangsaan, kemampuan kita dalam menangkal setiap ancaman tidak bisa semata-mata hanya mengandalkan kekuatan pertahanan militer dengan pendekatan keamanan, namun juga diperlukan pendekatan kesejahteraan. Dua di antara sejumlah



paradigma baru (paradigma alternatif) yang dikembangkan negara-negara maju dan lebih berorientasi pada kemanusiaan belakangan ini, yakni paradigma *human security* dan *human eco-system*.

Dengan pendekatan *human security*, ikatan kebangsaan diasumsikan akan kuat ketika seluruh warga negara mendapatkan hak dan perlakuan yang sama, baik itu hak ekonomi, politik, kesejahteraan serta kesamaan di muka hukum. Sedangkan *human eco-system paradigm* adalah sebuah paradigma yang menekankan hubungan sinergis antara manusia dengan alam dan lingkungannya serta hubungan antar manusia itu sendiri. Itulah mengapa konsepsi wawasan kebangsaan yang digali dari nilai-nilai sejarah bangsa, perlu terus-menerus diproyeksikan dengan perkembangan-perkembangan dunia untuk mengantisipasi tantangan dan hambatan baru (baik dari dalam maupun dari luar) serta bagaimana menghadapinya secara tepat.

Aktualisasi semangat Kebangkitan Nasional adalah kebutuhan berlanjut yang harus dilakukan karena sangat luas implikasinya terhadap ideologi Pancasila dan kaderisasi generasi Indonesia yang berwawasan kebangsaan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh semua pihak yang

terlibat dan terkait serta berkepentingan dikemukakan menjadi arah kebijakan dan langkah-langkah strategis.

1. Arah Kebijakan

Visi Indonesia 2025 yaitu Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur, berkaitan erat dengan semangat kebangkitan nasional karena kemandirian berarti menuju kesetaraan dengan negara-negara maju diukur dari keunggulan dan daya saing dengan mengutamakan kemampuan dan kekuatan sendiri serta menempatkan bantuan asing hanya sebagai pelengkap dan alternatif. Agar pencapaian visi Indonesia 2025 tersebut dapat berjalan efektif, maka dibutuhkan “spirit” kebangkitan nasional yakni seluruh komponen bangsa mampu mengaktualisasikannya ke dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang berwawasan kebangsaan, mengedepankan kepentingan nasional dengan tetap berpegang teguh pada ideologi Pancasila.

2. Langkah- Langkah Strategis.

- a. Mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa dengan menyusun *grand strategy* revitalisasi Pancasila melalui metode kreatif-dialogis-partisipatif yang melibatkan lembaga-lembaga



Karakter setiap bangsa relatif berbeda satu sama lain, maka jalan kemajuan suatu bangsa tidak hanya cukup dengan menerima atau menyerap begitu saja cara yang ditempuh oleh bangsa lain. Oleh karena itu, Indonesia harus mampu mencari jalan kemajuannya sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang menghormati nilai-nilai Pancasila.

pemerintah, swasta dan lembaga kemasyarakatan.

- b. Melakukan pemantapan nilai-nilai kebangsaan kepada seluruh komponen bangsa lintas generasi, baik di suprastruktur maupun infrastruktur politik, melalui lembaga-lembaga negara serta partai politik dengan mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas calon pimpinan nasional yang memenuhi kriteria pemahaman wawasan kebangsaan, mencakup: Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Sistem Manajemen Nasional, Kewaspadaan Nasional, dan Kepemimpinan.
- c. Melaksanakan pemerataan pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, khususnya generasi muda, sehingga pengelolaan dan pemanfaatan akses sumber daya alam dan sumber daya ekonomi nasional dapat optimal dalam menciptakan kemakmuran rakyat.

- d. Melakukan penyempurnaan kurikulum dan metode pendidikan nasional, secara kreatif dan inovatif untuk menajamkan pendidikan karakter bangsa, sesuai dengan arah pembangunan nasional berbasis wawasan kebangsaan.
- e. Melaksanakan Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum yang berkeadilan dan bermartabat, khususnya dalam pemberantasan korupsi secara konsisten, agar warga negara memiliki integritas moral dan ketaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang disemangati nilai-nilai Pancasila.
- f. Melakukan “Kongres Nasional Generasi Muda” di antara komponen-komponen bangsa, melalui lembaga-lembaga dan forum komunikasi kemitraan masyarakat dengan mengedepankan toleransi, musyawarah-mufakat, memperhatikan kearifan lokal serta menghargai entitas masyarakat Indonesia yang multikultural.

Berdasarkan analisis, arah kebijakan dan langkah-langkah strategis terkait Aktualisasi Semangat Kebangkitan Nasional guna Memantapkan Wawasan Kebangsaan Lintas Generasi dalam rangka Ketahanan Nasional, maka kajian ini dapat diambil beberapa kesimpulan serta saran sebagai berikut:

1. Kesimpulan

- a. Kebangkitan Nasional Indonesia yang ditandai dengan terbentuknya organisasi Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908 pada dasarnya adalah aktualisasi rasa atau kesadaran kebangsaan yang telah lama terpendam dan terbelenggu oleh kekuasaan kaum penjajah. Kesadaran kebangsaan yang dikatakan sebagai ideologi perjuangan yang kemudian mampu memberi semangat kepada para pejuang kemerdekaan untuk mewujudkan impiannya, yaitu Indonesia yang bebas dan merdeka. Kesadaran kebangsaan tersebut, menjadi roh atau spirit kebangkitan nasional, sekaligus sebagai kekuatan



yang mampu merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

- b. Semangat kebangkitan nasional di era demokrasi sekarang ini, dihadapkan pada kondisi melemahnya nasionalisme, memudarnya jati diri bangsa serta kebutuhan akan keteladanan para pemimpin, khususnya dalam pencapaian Visi Indonesia 2025, negara kita menghadapi beberapa tantangan, antara lain di bidang ideologi dengan memudarnya keyakinan terhadap Pancasila, di bidang kepemimpinan masih lemahnya sistem kaderisasi pemimpin nasional yang berwawasan kebangsaan, di bidang ekonomi masih adanya kesenjangan yang cukup lebar akibat ketidakmerataan pembangunan, di bidang pendidikan yakni belum optimalnya pendidikan nasional kepada pembangunan karakter bangsa, ketidaktaatan hukum serta ancaman disintegrasi bangsa yang terus membayangi perjalanan NKRI di era otonomi daerah.
- c. Aktualisasi semangat kebangkitan nasional guna memantapkan wawasan kebangsaan lintas generasi perlu diimplementasikan melalui upaya-upaya strategis yang mencakup upaya revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melakukan pemantapan nilai-nilai kebangsaan kepada calon kader pemimpin nasional, melaksanakan pemerataan pembangunan nasional yang diikuti oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, penyempurnaan kurikulum dan metode pendidikan nasional yang menekankan pada wawasan kebangsaan, melaksanakan reformasi hukum yang diikuti dengan penegakan hukum yang berkeadilan dan bermartabat serta meningkatkan dialog antar komponen bangsa melalui forum kemitraan masyarakat guna membangun budaya

toleransi, musyawarah-mufakat, memperhatikan kearifan lokal serta menghargai entitas masyarakat Indonesia yang multikultural.

2. Saran

- a. Menggali budaya pemersatu bangsa untuk mengembangkan dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan di dalam keanekaragaman budaya, suku, adat, agama dan status sosial melalui pendidikan formal, informal dan non-formal.
- b. Memupuk semangat kebangkitan nasional di kalangan generasi muda, sehingga meningkatkan rasa solidaritas, rasa kebanggaan cinta tanah air serta persatuan dan kesatuan.
- c. Merevitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui sosialisasi dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan secara sistematis dan terlembaga dari tingkat pusat sampai daerah sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.
- d. Meningkatkan peran media massa cetak dan elektronik sebagai agen pembaharuan sekaligus sarana pendidikan yang memiliki komitmen turut serta mengembangkan wawasan kebangsaan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- e. Memprioritaskan pembangunan ekonomi dan politik di wilayah perbatasan NKRI, agar tercipta kesejahteraan rakyat, yang kemudian diikuti dengan meningkatnya nasionalisme Warga Negara Indonesia.
- f. Optimalisasi peran serta seluruh komponen bangsa dalam merealisasikan aktualisasi semangat kebangkitan nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga mempercepat tercapainya pemantapan wawasan kebangsaan dalam rangka ketahanan nasional.



Aktualisasi Semangat Kebangkitan Nasional guna Memantapkan Wawasan Kebangsaan Lintas Generasi dalam rangka Ketahanan Nasional

Focus Group Discussion (FGD)

- Kamis, 24 April 2012
- Pembicara :
 1. Peneliti Senior LIPI Prof. Dr. Syamsuddin Haris, MSi
 2. Guru Besar Universitas Negeri Jakarta Prof. Dr. Arief Rachman MPd.
 3. Guru Besar Fakultas Ekonomi & Manajemen IPB Prof. Dr. Syafri Mangkuprawira.

Roundtable Discussion (RTD)

- Rabu, 9 Mei 2012
- Pembicara :
 1. Ketua DPD-RI Irman Gusman, MBA
 2. Pakar Psikologi Sosial UI Prof. Dr. Hamdi Moeloek
 3. Budayawan Taufiq Abdul Gaffar Ismail
 4. Senior Editor Kompas Dr. Ninok Leksono.
- Penanggap :
 1. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora Bp. Drs. MB. Zubakhrum Tjenreng, M.S.i.
 2. Direktur Eksekutif The Habibie Center Dr. Rahimah Abdulrahim.
 3. Sekretaris Jenderal LVRI Laksda TNI (Purn) Wahyono, Sk, Ph.D.
 4. Budayawan Radhar Panca Dahana.
 5. Presiden BEM UI Faldo Maldini.

- Kamis, 10 Mei 2012
- Pembicara :
 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Prof. Dr. Muhammad Nuh, DEA
 2. Rektor IAIN Gorontalo Prof. Dr. Muhammadiyah Amin
 3. Direktur Eksekutif Reform Institute Dr. Yudi Latif
 4. Pakar Psikologi Sosial UI Prof. Dr. Hamdi Moeloek.
- Penanggap :
 1. Deputi II BIN Mayjen TNI Erfi Triassunu.
 2. Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI Dr. Ir. Pos M. Hutabarat.
 3. Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Dr. Idrus Marham.
 4. Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Bidang Kepemudaan Munadi Herlambang.
 5. Ketua Umum DPP KNPI Taufan Ekonugroho Rotorasiko.

Tim Penyusun : Direktorat Pengkajian Bidang Politik



Pengembangan Sistem Transportasi Nasional guna Mempercepat dan Memperluas Pembangunan Ekonomi dalam Rangka Ketahanan Nasional

1. Latar Belakang

Sistem transportasi merupakan bagian penting dan strategis bagi pembangunan suatu negara. Sistem transportasi yang handal merupakan sarana penunjang kemajuan ekonomi karena akan mendukung mobilitas penduduk dari satu daerah ke daerah lain yang mampu mendistribusikan barang dari satu tempat ke tempat lainnya secara meluas.

Indonesia dengan jumlah pulau diperkirakan 17.499 pulau dan luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta km² dengan panjang garis pantai 81.900 km (sumber : Dishidros TNI AL) serta jumlah penduduk mencapai 237,6 juta jiwa (survey BPS tahun 2010), merupakan sebuah negara kepulauan yang sangat luas dan berpopulasi tinggi. Banyaknya jumlah pulau, luasnya wilayah negara dan tingginya jumlah penduduk akan

membutuhkan sarana dan prasarana transportasi yang cukup kompleks. Melihat kondisi geografis dan demografis sebagaimana dikemukakan di atas, maka sistem transportasi Indonesia tidak dapat mengandalkan hanya satu jenis moda transportasi saja, melainkan membutuhkan sistem transportasi intermoda (darat, laut dan udara) maupun intramoda secara terintegrasi dalam pola transportasi multimoda. Pada saat ini, secara umum dapat dikatakan, bahwa sektor transportasi belum mampu menyatukan seluruh wilayah Indonesia dalam satu kesatuan pembangunan. Hal ini terlihat dari belum meratanya pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Implikasi dari tidak meratanya pembangunan di daerah-daerah maka ketahanan nasionalnya pun belum merata. Hal ini terlihat dari hasil pengukuran di Laboratorium

Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas) Lemhannas RI masih ditemukan ketimpangan ketahanan nasional Indonesia bagian barat, bagian tengah dan Indonesia bagian timur. Semua provinsi di wilayah Indonesia bagian timur (4 dari 4 provinsi) memiliki ketahanan nasional yang kurang tangguh. Di wilayah Indonesia bagian tengah dari 11 provinsi ada 3 provinsi juga masih berperingkat kurang tangguh. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian barat hanya ada 2 dari 18 provinsi (11%) yang berada pada posisi tersebut. Dengan demikian kondisi ketahanan nasional Indonesia bagian barat relatif lebih baik dibandingkan dengan Indonesia bagian tengah dan timur. Dari fakta ini semakin jelas terlihat, bahwa pembangunan di segala aspek (ekonomi, sosial dan politik) di wilayah Indonesia bagian barat relatif lebih maju dibandingkan dengan pembangunan di wilayah Indonesia bagian timur.

Oleh karena itu, sistem transportasi nasional yang akan disusun perlu dikaitkan dengan usaha untuk mempercepat dan memperluas, tidak hanya pertumbuhan pembangunan ekonomi

Dari uraian di atas terlihat, bahwa persoalan transportasi Indonesia perlu segera dicarikan jalan keluarnya dimulai dengan penyusunan *Grand Design* Sistem Transportasi Nasional yang mampu menjawab berbagai persoalan yang diarahkan dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional, diantaranya :

- a. Mampu menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai daerah / wilayah / pulau di seluruh nusantara.
- b. Mampu mewujudkan pembangunan nasional yang merata di seluruh wilayah nusantara.
- c. Mampu meningkatkan Daya Saing Nasional.
- d. Mampu mendukung Sistem Logistik Nasional.
- e. Mampu mendukung kekuatan bangsa dalam mempertahankan NKRI.

2. Permasalahan

Sesuai dengan kondisi geografis Indonesia, maka untuk meningkatkan daya saing internasional, perlu dirumuskan Sistem Transportasi Nasional yang efisien dan efektif

sistem transportasi Indonesia tidak dapat mengandalkan hanya satu jenis moda transportasi saja, melainkan membutuhkan sistem transportasi intermoda (darat, laut dan udara) maupun intramoda secara terintegrasi dalam pola transportasi multimoda

akan tetapi juga pemerataannya. Karena daya saing nasional akan meningkat jika Indonesia mampu memperkecil disparitas pembangunan di semua wilayah dan di semua sektor. Selain untuk meningkatkan kinerja pembangunan nasional, sektor transportasi juga harus dipacu untuk meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional. Sebagaimana diketahui, bahwa pada saat ini (tahun 2010-2011) indeks daya saing Indonesia dalam peringkat *Global Competitiveness Index* (GCI) menempati peringkat ke-44 dari 139 negara yang diukur. Kondisi ini lebih baik, dibandingkan dengan tingkat indeks pada tahun 2009-2010 yang hanya mencapai peringkat ke-54. Sedangkan di deretan ASEAN, Indonesia pada posisi ke-5 berada di bawah Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Thailand.

yang mampu mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi nasional dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan, sehingga akan terwujud ketahanan nasional yang tangguh. Namun sampai saat ini, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, diantaranya:

- a. Belum terciptanya dukungan peraturan perundangan yang lebih rinci dan operasional.
- b. Belum komprehensifnya landasan pemikiran yang menjadi dasar penyusunan *Grand Design* Sistem Transportasi Nasional.
- c. Masih ada kesenjangan pola pandang strategis dan operasional antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.



<http://www.batasnusa.com/wp-content/uploads/2013/02/garuda-indonesia.jpg>

- d. Masih belum terintegrasinya berbagai kebijakan sektoral dalam mewujudkan Sistem Transportasi Nasional yang memadai.

3. Analisis dan Upaya

Pembangunan sistem transportasi nasional sejatinya harus dilakukan dengan memperhatikan keterkaitannya dengan ketahanan nasional, yaitu menyangkut astagatra yakni gatra geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan kemanan. Penyelenggaraan transportasi dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi geografi Indonesia yang terdiri dari daratan dan perairan dengan pulau-pulau yang ada di dalamnya. Transportasi harus dapat menjangkau seluruh pelosok tanah air dan terjangkau oleh masyarakat banyak. Sumber kekayaan alam, dalam bentuk sumber bahan makanan, sumber energi, bahan mineral, flora serta fauna, memerlukan sarana dan prasarana transportasi, agar dapat dieksplorasi, diproduksi dan didistribusikan ataupun diperdagangkan, sehingga manfaatnya secara optimal dapat dinikmati oleh rakyat.

Jumlah, persebaran penduduk, tingkat pertumbuhan, struktur, tingkat kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia, merupakan masalah dan sekaligus potensi yang harus dipecahkan dan dilayani oleh sistem transportasi nasional khususnya melalui peningkatan mobilitas penduduk. Demikian juga transportasi harus menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan dalam bingkai geopolitik satu bangsa yang menjaga keutuhan nasional dalam perspektif wawasan nusantara.

a. Kondisi Transportasi Laut

Pelabuhan utama nasional yang beroperasi saat ini berjumlah 4 (empat)

yaitu Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan dan Makassar. Kesemua pelabuhan tersebut memiliki kemampuan pengelolaan angkutan barang untuk ekspor dan impor dengan sistem kontainer. Dari ke empat pelabuhan tersebut yang terbesar adalah Tanjung Priok.

Kondisi di atas perlu mendapat perhatian yang saksama, mengingat *trend* lalu lintas barang internasional semakin meningkat. Jika Indonesia tidak meningkatkan fasilitas pelabuhan-pelabuhannya dan manajemen kepelabuhanan, maka lalu lintas barang antarpulau akan terhambat dan para operator internasional akan menguasai sektor transportasi laut nasional.

b. Kondisi Transportasi Darat

Transportasi darat saat ini memegang peranan yang sangat penting. Jenis angkutan darat, meliputi jalan dan angkutan jalan raya, angkutan dalam kota, serta angkutan sungai, danau dan feri. Alat angkutan darat ini memiliki fungsi yang saling melengkapi, sehingga dalam pengembangannya perlu direncanakan secara terintegrasi. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Pasal 5 disebutkan, bahwa jalan memiliki fungsi: (1) sebagai bagian dari prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam ekonomi sosial budaya politik, pertahanan dan keamanan, lingkungan hidup serta wajib dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (2) sebagai prasarana distribusi barang dan jasa yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara; (3) sebagai satu kesatuan sistem jaringan jalan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.

Selanjutnya pengembangan jalan mengacu pada rencana tata ruang untuk mendukung terwujudnya kerangka strategis penataan ruang nasional. Jaringan jalan yang ada tidak saja berfungsi untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan, tapi



Pembangunan sistem transportasi nasional sejatinya harus dilakukan dengan memperhatikan keterkaitannya dengan ketahanan nasional, yaitu menyangkut astagatra yakni gatra geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan kemanan

juga berperan untuk menyeimbangkan pengembangan kawasan, mengamankan teritorial dan sebagai perekat keutuhan NKRI.

c. **Kondisi Transportasi Udara**

Kenaikan volume angkutan udara dalam 20-30 tahun belakangan ini terus meningkat. Hal ini didorong oleh kemajuan *e-commerce*, perkembangan *global supply chain*, dan upaya untuk menurunkan biaya *inventory* yang mahal serta memperpendek *order cycle time*. Walaupun volume barang yang diangkut melalui angkutan udara ini masih relatif kecil, namun nilai barang yang diangkut terus meningkat dari tahun ke tahun, baik untuk pengiriman dalam negeri maupun luar negeri. Namun, saat ini fasilitas penanganan kargo di Indonesia masih terbatas. Sebagai contoh kondisi gudang penanganan kargo di bandara utama Soekarno-Hatta sudah tidak memadai

dibandingkan dengan volume barang yang masuk, sehingga sering terjadi kargo diletakkan di luar gudang yang rawan terhadap resiko kehilangan ataupun kerusakan. Pada tahun 2000 penumpang dalam negeri berjumlah 7,6 juta orang dan pada tahun 2008 meningkat menjadi 37,4 juta orang, sedangkan angkutan kargo dalam negeri meningkat dari 119,5 ribu ton pada tahun 2000 menjadi 338,2 juta ton pada tahun 2008.

d. **Kondisi Angkutan Multimoda**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011, angkutan multimoda adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan



barang kepada penerima barang angkutan multimoda. Sedangkan transportasi intermoda adalah transportasi penumpang dan / atau barang yang menggunakan lebih dari satu moda transportasi dalam satu perjalanan yang berkesinambungan, dengan tetap menggunakan unit kemasan yang sama.

Menciptakan sistem logistik yang efektif dan efisien tidak terlepas dari bagaimana menciptakan sistem ataupun mekanisme pergerakan dan perpindahan barang dari satu moda ke moda lainnya dengan lancar, cepat, akurat dan dengan biaya yang wajar. Moda yang akan terlibat meliputi angkutan darat (truk, *trailer* dan truk mini), angkutan kereta api (gerbong dan apron/emplasemen), angkutan sungai dan danau (kapal, dermaga, *scanner* dan alat bongkar/muat), angkutan laut (dermaga, alat bongkar/muat, area penumpukan sementara dan alat perpindahan antarmoda) dan angkutan udara (pesawat, apron, alat bongkar/muat, area penumpukan sementara dan alat perpindahan antarmoda).

Berdasarkan pada kondisi yang ada serta mengacu pada arah pembangunan nasional dan kebijakan pembangunan lainnya (sistem logistik nasional dan konsep Sistranas sebelumnya) maka kebijakan Pengembangan Sistem Transportasi Nasional harus diarahkan pada terwujudnya “Sistem Transportasi Nasional yang Mampu Mempercepat dan Memperluas Pembangunan Ekonomi di Seluruh Wilayah Nusantara dalam Rangka Ketahanan Nasional”.

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu disusun *Grand Design* Sistem Transportasi Nasional yang mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut :

a. Mengutamakan Kepentingan Nasional

Sesuai dengan amanat UUD NRI 1945, maka kepentingan nasional harus diutamakan. Oleh karenanya Sistem Transportasi Nasional pun harus ditujukan untuk mencapai pembangunan yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta pencerdasan kehidupan bangsa.

Sistem Transportasi Nasional juga harus diarahkan untuk meningkatkan

daya saing nasional, sehingga Indonesia dapat sejajar dengan negara-negara lain. Demikian juga, Sistem Transportasi Nasional harus mampu memfasilitasi aliran barang, jasa dan manusia dari satu wilayah ke wilayah lainnya dalam spirit satu kesatuan wilayah sesuai dengan wawasan nusantara, sehingga seluruh wilayah dapat dipersatukan.

Dalam pengembangan Sistem Transportasi Nasional juga penting diperhatikan untuk selalu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia. Hal ini penting karena manusialah yang menjadi aktor utama keberhasilan suatu sistem. Walaupun sistem transportasi yang dibangun sudah berbasis pada teknologi canggih akan tetapi kalau manusianya tidak mampu mengelola sistem dimaksud, maka keberhasilannya pun tidak akan maksimal.

b. Mendorong Terwujudnya Indonesia Sebagai Negara Kepulauan

Tidak dapat dipungkiri, bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas beribu pulau yang terhubung oleh laut dengan kekayaan alam yang melimpah. Oleh karenanya pembangunan sistem transportasinya pun harus disesuaikan dengan kondisi geografis. Saat ini sedang dikembangkan pola transportasi negara maritim melalui penerapan konsep wilayah depan (*frontland*) dan wilayah dalam (*hinterland*). Penerapan konsep ini diharapkan mampu memperkokoh kedaulatan dan ketahanan ekonomi nasional serta ketahanan nasional secara paripurna. Konsep ini pula yang dianut dalam rangka mengembangkan Sistem Logistik Nasional dan juga dalam pelaksanaan MP3EI.

Dari hasil peninjauan secara langsung ke provinsi Sumatera Utara dan hasil diskusi dengan pihak-pihak yang terkait di antaranya PT. Pelindo I, Badan Otorita Kepelabuhanan, PT. Angkasa Pura 1, Badan Otorita Bandara, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara serta Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara, maka



penunjukan Kuala Tanjung sebagai pintu gerbang laut dan Kuala Namo sebagai pintu gerbang udara sudah dianggap tepat. Para *stakeholder* sudah siapkan untuk melaksanakan rencana ini, satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa konsep ini harus ditunjang oleh *political will* dan komitmen dari masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di samping itu pembukaan pintu gerbang Indonesia bagian barat harus dilaksanakan secara paralel dengan pembangunan pintu gerbang Indonesia bagian timur. Jika konsep ini tidak dipahami dan didukung oleh segenap komponen bangsa, niscaya kesatuan wilayah nusantara tidak akan pernah terwujud.

c. Mendukung Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Diseluruh Wilayah Nusantara

Sesuai dengan visi ekonomi Indonesia tahun 2025 yaitu “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”, maka pembangunan Sistem Transportasi Nasional pun harus diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh wilayah tanah air.

Sistem transportasi yang dibangun harus mampu membuka ketertutupan daerah-daerah tertinggal. Setiap daerah harus menjadi tujuan pendistribusian kemakmuran dan sekaligus menjadi sumber produksi yang akan dialirkan ke daerah lain. Untuk mencapai cita-cita ini perlu dibangun jaringan transportasi internal Indonesia yang menghubungkan seluruh titik, baik pada tingkat desa, kota dan pulau yang dihubungkan dengan jaringan internasional.

d. Meningkatkan Sinergitas Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta antar-Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap Pemerintah Daerah Kabupaten /

Kota memiliki kewenangan untuk menjalankan roda pemerintahan dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan komoditas pokok dan strategis rakyat setempat. Dengan demikian urusan transportasi komoditas pokok dan strategis pada hakikatnya adalah urusan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. Namun demikian jika tidak dijalin dengan baik, maka akan muncul ketimpangan dan persaingan antar-Pemerintah Daerah.

Oleh karenanya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi harus mampu menciptakan keseimbangan dan koneksitas antardaerah. Oleh karenanya walaupun otoritas untuk mengembangkan daerah berada di Pemerintah Daerah, akan tetapi *grand design* sistem transportasinya harus tetap terintegrasi dalam perspektif nasional. Pada sisi lain, operasionalisasinya dapat dilaksanakan oleh masing-masing daerah.

e. Meningkatkan Daya Saing Nasional

Pada era global, mau tidak mau pengaruh asing akan masuk dan mempengaruhi kondisi dalam negeri ini. Satu hal yang harus tetap dijaga adalah kemandirian dan kedaulatan nasional. Oleh karenanya Sistem Transportasi Nasional yang dikembangkan harus benar-benar dirancang untuk menjalin koneksitas dengan dunia internasional tanpa meninggalkan kepentingan nasional.

Sistem Transportasi Nasional harus mampu menumbuhkan proses nilai tambah di setiap daerah. Dengan demikian, berbagai sumber kekayaan lokal dapat didayagunakan secara maksimal. Di samping itu sistem ini harus mampu membawa berbagai kemajuan bagi daerah, sehingga tumbuh dan berkembang dari kearifan lokal menjadi sumber daya nasional yang mampu bersaing di dunia Internasional.



4. Kesimpulan

Dari analisis terhadap kondisi masa kini dan kebutuhan di masa mendatang dapat disimpulkan beberapa hal :

- a. Sistem transportasi nasional yang dimiliki saat ini belum ditunjang oleh infrastruktur yang merata dan tersebar di seluruh wilayah nusantara. Oleh karenanya cita-cita pembangunan nasional untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur belum sepenuhnya tercapai.
- b. Dari perspektif ketahanan nasional, masih dijumpai beberapa masalah pada sistem transportasi nasional, antara lain :
 - 1) Gatra Ideologi. Sistem transportasi nasional dirasakan belum dapat mendukung pembangunan nasional, sehingga mempengaruhi pencapaian cita-cita dan tujuan nasional sesuai amanat pembukaan UUD NRI 1945.
 - 2) Gatra Politik. Sistem transportasi nasional belum dapat berperan sebagai penghubung pulau-pulau besar, sehingga mempengaruhi perwujudan satu kesatuan wilayah.
 - 3) Gatra Ekonomi. Sistem transportasi nasional belum dapat mendukung perekonomian nasional terutama terkait dengan pengelolaan sumber kekayaan alam dan pendistribusiannya.
 - 4) Gatra Sosial Budaya. Sistem transportasi nasional belum dapat mendukung

mobilitas publik dalam rangka mempercepat proses kerja sama antara daerah otonom dan integrasi nasional.

- 5) Gatra Pertahanan dan Keamanan. Sistem transportasi nasional belum dapat mendukung kepentingan pertahanan keamanan terutama terkait dengan implementasi sistem pertahanan semesta.
- c. Sistem Transportasi Nasional sesungguhnya tidak boleh dipandang hanya sebagai penggerak ekonomi nasional saja, tetapi juga merupakan faktor pengungkit (*leverage factor*) daya saing nasional. Oleh karenanya, sistem transportasi nasional yang dibangun harus mampu meningkatkan mobilitas penduduk antardaerah / wilayah / pulau dan mampu mendistribusikan serta memanfaatkan seluruh daya produksi wilayah NKRI. Dengan demikian efisiensi distribusi penumpang dan barang di Indonesia akan semakin meningkat pula.
- d. Semakin efisien pelayanan sistem transportasi nasional yang ditandai dengan semakin besarnya angka pada indeks kinerja logistik, maka semakin tinggi daya saing produk dalam negeri, baik untuk konsumsi domestik maupun internasional.
- e. Untuk mewujudkan satu kesatuan wilayah Indonesia, maka perlu diterapkan pola sistem transportasi nasional yang didasarkan atas konsep wilayah depan (*frontland*)



dan wilayah dalam (*hinterland*). Dengan demikian tidak semua wilayah menjadi pintu masuk ke wilayah NKRI, sehingga ketahanan nasional dapat diwujudkan yang pada gilirannya akan memperkuat kedaulatan negara.

- f. Sebagai dampak dari perubahan sistem pemerintahan dari sistem terpusat menjadi desentralisasi, maka saat ini dirasakan masih ada berbagai peraturan yang masih belum harmonis, khususnya dalam pembagian kewenangan di bidang perencanaan dan pengaturan sistem transportasi.

5. Saran / Rekomendasi

Memperhatikan kondisi dan hambatan sebagaimana dikemukakan di atas, maka perlu dilakukan revitalisasi Sistranas dan menyusun kembali *Grand Design* Sistem Transportasi Nasional. Sistem yang dibangun seyogianya didasarkan atas perspektif ketahanan nasional, sehingga mampu merangkaikan berbagai pulau dan merajut satu kesatuan wilayah dalam satu bingkai NKRI guna menciptakan kesejahteraan dan sekaligus melindungi segenap rakyat Indonesia. *Grand Design* dimaksud harus mampu :

- 1) Mempersatukan seluruh daerah pulau sebagai satu kesatuan wilayah Nusantara.
- 2) Mengatur pintu masuk dan keluar dari Wilayah Kesatuan Nusantara dengan mempertimbangkan seluruh aspek kesatuan dan kedaulatan NKRI. Untuk itu perlu diacu pola transportasi negara maritim melalui penerapan konsep wilayah depan (*frontland*) dan wilayah dalam (*hinterland*).

c. **Mendukung Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi di seluruh Wilayah Nusantara.** Dalam hal ini sistem transportasi nasional harus mampu :

- 1) Mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh wilayah tanah air.
- 2) Membuka keterutupan daerah-daerah tertinggal. Setiap daerah harus menjadi tujuan pendistribusian kemakmuran dan sekaligus menjadi sumber produksi yang akan dialirkan ke daerah lain.
- 3) Menghubungkan seluruh titik, baik pada tingkat desa, kota maupun pulau yang dihubungkan dengan jaringan internasional

Menciptakan sistem logistik yang efektif dan efisien tidak terlepas dari bagaimana menciptakan sistem ataupun mekanisme pergerakan dan perpindahan barang dari satu moda ke moda lainnya dengan lancar, cepat, akurat dan dengan biaya yang wajar

a. **Mengutamakan Kepentingan Nasional.** Dalam hal ini Sistem Transportasi Nasional pun harus ditujukan untuk :

- 1) Mendukung pembangunan yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2) Meningkatkan daya saing nasional, sehingga Indonesia dapat sejajar dengan negara-negara lain.
- 3) Memfasilitasi aliran barang, jasa dan manusia dari satu wilayah ke wilayah lainnya dalam spirit satu kesatuan wilayah sesuai dengan wawasan nusantara.

b. **Mendorong Terwujudnya Indonesia Sebagai Negara Kepulauan.** Dalam hal ini sistem transportasi nasional harus mampu :

d. **Meningkatkan Sinergitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta antar-Pemerintah Daerah.** Dalam hal ini sistem transportasi nasional harus mampu menciptakan kesetimbangan dan koneksitas antardaerah.

e. **Meningkatkan Daya Saing Nasional.** Dalam hal ini sistem transportasi nasional harus mampu :

- 1) Menjaga kemandirian dan kedaulatan nasional.
- 2) Menjalin koneksitas dengan dunia internasional tanpa meninggalkan kepentingan nasional.
- 3) Menumbuhkan proses nilai tambah di setiap daerah.



Pengembangan Transportasi Nasional guna Mempercepat dan Memperluas Pembangunan Ekonomi Dalam Rangka Ketahanan Nasional

Focus Group Discussion (FGD)

- Selasa, 14 Februari 2012
- Pembicara :
 1. Kepala Pusat Pengkajian Logistik dan Rantai Pasok, Institute Teknologi Bandung Prof. Dr. Senator Nur Bahagia
 2. Kepala Pusat Kajian Kemitraan dan Jasa Transportasi Kementerian Perhubungan RI Ir. Hanggoro Budi Wiryawan
 3. Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INTRANS) Darmaningtyas
 4. Sesmenristek Kementerian Riset dan Teknologi RI Dr. Mulyanto.
- Penanggap
 1. Tenaga Pengkaji Bidang Sosbud Lemhannas RI Prof. Dr. Sudaryono, SU
 2. Tenaga Pengkaji Bidang Demografi Lemhannas RI Dr. Ratnasari Azahari, MPA
 3. Tenaga Profesional Bidang Ketahanan Nasional Lemhannas RI Mayjen TNI (Purn) Lumban Sianipar, S.IP
 4. Tenaga Profesional Bidang SKA Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A.

Roundtable Discussion (RTD)

- Kamis, 15 Maret 2012
- Pembicara :
 1. Kepala Biro Perencanaan Sekjen Kementerian Perhubungan RI Ir. Santoso Eddy Wibowo, M.Si
 2. Lektor Kepala *Transportation Research Group* ITB Ir. Harun Alrasyid Lubis, M.Sc, Ph.D
 3. Bupati Kab. Serdang Bedagai Sumut H.T Erry Nuradi
- Penanggap floor para Taprof, Taji dan Tajar Lemhannas RI
- Jumat 16 Maret 2012
- Pembicara :
 1. Dosen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Indonesia Dr. Ir. Ismeth S. Abidin, M.Sc
 2. Kepala Pusat Pengkajian Logistik Dan Rantai Pasok ITB Prof. Dr. Senator Nur Bahagia
 3. Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi /Intrans Darmaningtyas
- Penanggap floor para Taprof, Taji dan Tajar Lemhannas RI

**Tim Penyusun : Direktorat Pengkajian
Bidang Sosial dan Budaya**



Pengelolaan Sumber Daya Air guna Mendukung Pembangunan Nasional dalam Rangka Ketahanan Nasional

1. Latar Belakang

Sumber daya air sangat diperlukan untuk mendukung kehidupan manusia, flora dan fauna, oleh sebab itu sumber daya air perlu dikelola secara baik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pembangunan. Kekurangan air dapat menimbulkan kekeringan dan berdampak pada kehidupan spesies yang semakin rentan pada kesehatan, panen dan kepunahan. Di sisi lain, kelebihan air yang ekstrim dapat juga berdampak buruk pada kehidupan manusia, pertanian dan spesies tertentu.

Menyikapi perubahan musim secara ekstrim yang berdampak pada ketersediaan sumber daya air yang cukup dan dalam rangka memenuhi kewajiban negara, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004

tentang Sumber Daya Air, khususnya yang mengatur pengelolaan air secara terpadu dan berkelanjutan. Manajemen sumber daya air ini sangat penting karena keseimbangan penyediaan air di setiap musim tidaklah sama. Akibat adanya perubahan musim secara ekstrim, telah menyebabkan terjadinya krisis air yang dirasakan sangat mempengaruhi pembangunan nasional. Pada musim hujan, telah terjadi banjir bandang, tanah longsor dan kegagalan panen di berbagai daerah. Pada musim kemarau, telah terjadi kekeringan yang berkepanjangan, sejumlah irigasi tidak berfungsi, sehingga berdampak pada kegagalan panen, sejumlah sumber air minum mengalami kekeringan, sehingga masyarakat tertentu kekurangan air bersih.

Di samping permasalahan tersebut serta hal yang perlu dipertimbangkan dikaitkan



dengan sumber daya air adalah penambahan penduduk dan usaha masyarakat yang membutuhkan air seperti untuk kebutuhan rumah tangga, air untuk pertanian yang semakin meningkat dan air untuk kepentingan perkebunan, peternakan dan bidang usaha tertentu. Khusus untuk pemenuhan air bersih yang berkualitas, pada saat ini belum semua masyarakat mendapat akses yang sama. Sebagaimana dilaporkan pada laporan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia pada tahun 2010, tingkat pemenuhan air bersih yang berkualitas bagi penduduk baru mencapai 47,71% (tahun 2009) dan ditargetkan pada tahun 2015 harus mencapai 68,87%. Target di atas di- dasarkan atas target yang ingin dicapai pada program pembangunan milenium di bidang penyediaan air bersih dan sanitasi yaitu: “Menurunkan Hingga Setengahnya Proporsi Rumah Tangga Tanpa Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak dan Sanitasi Layak Hingga Tahun 2015” (target 7C).

Penyediaan kebutuhan air bersih berkualitas bagi penduduk juga terpengaruh oleh cepatnya laju pertumbuhan penduduk, sehingga program pembangunan harus berkejaran dengan laju pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2012 laju pertumbuhan penduduk yang masih berada pada tingkat 1,49%, merupakan tantangan tersendiri bagi penyediaan air nasional. Apalagi kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang jumlah penduduk di setiap pulau tidak merata menjadi persoalan yang unik dan berbeda dengan negara-negara lainnya. Sebagaimana diketahui, bahwa penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa (58%) sedangkan lainnya tersebar di berbagai pulau.

Dari capaian di atas terlihat, bahwa pemenuhan kebutuhan air bersih dan berkualitas secara berkesinambungan dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia belum tercapai sepenuhnya dan masih memerlukan perhatian khusus. Sehubungan dengan itu, air sebagai sumber daya alam strategis perlu dikelola secara baik, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pembangunan nasional yang pada akhirnya mengganggu kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, pada pasal 4 telah ditekankan secara jelas bahwa sumber daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi yang diselenggarakan serta diwujudkan secara selaras.

2. Permasalahan

Melihat pada gambaran umum sebagaimana dikemukakan di atas, dalam kajian ini akan dibahas 3 pokok bahasan utama yaitu:

- Seberapa jauh tingkat pencapaian penyediaan air bagi kebutuhan pembangunan?
- Seberapa jauh sumber daya air yang dimiliki dapat memenuhi kebutuhan nasional?
- Berbagai upaya apakah yang perlu dilakukan untuk melakukan manajemen air nasional, sehingga kebutuhan pembangunan nasional dapat didukung secara optimal?

Mengacu pada latar belakang dan berbagai permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka maksud dari kajian aktual ini adalah untuk melakukan identifikasi secara cermat dan mendalam mengenai berbagai kendala, hambatan dan persoalan yang dihadapi dalam mengembangkan kebijakan yang perlu dirumuskan dalam mengelola sumber daya air, sehingga mampu mendukung pembangunan nasional.

Adapun tujuan dari kajian aktual ini, adalah menghasilkan rumusan kebijakan untuk mendukung kebijakan yang perlu dirumuskan dalam mengelola sumber daya air, sehingga mampu mendukung pembangunan nasional. Kesemua capaian di atas diarahkan dalam rangka meningkatkan Ketahanan Nasional.

3. Kondisi Awal dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa air sangat dibutuhkan bagi kehidupan seluruh makhluk di dunia ini. Khusus bagi kehidupan manusia, tidak dapat disangkal, bahwa air minum merupakan kebutuhan dasar yang harus tersedia dalam kuantitas yang cukup



Sebagaimana dilaporkan pada laporan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia pada tahun 2010, tingkat pemenuhan air bersih yang berkualitas bagi penduduk baru mencapai 47,71% (tahun 2009) dan ditargetkan pada tahun 2015 harus mencapai 68,87%

dan kualitas yang memenuhi syarat. Alam semesta, pada dasarnya telah menyediakan air yang dibutuhkan dan telah mengatur penyediaan air melalui siklus yang sangat sistematis. Lautan yang sangat luas merupakan sumber air yang tidak pernah habis. Melalui siklus penguapan yang kemudian diembunkan dan dicairkan menjadi air hujan merupakan sumber dari seluruh awal kehidupan di dunia. Air tersebut kemudian ditampung di dalam tanah dan sebagian dialirkan kembali ke laut melalui sungai-sungai. Dengan demikian alam sebenarnya telah memiliki sistem dan mekanisme penyediaan air yang sangat sempurna. Dalam dunia ilmu pengetahuan siklus ini dikenal dengan istilah daur hidrologi.

Meskipun alam melalui manajemen airnya yang sangat spesifik telah menyediakan air dalam jumlah yang cukup dan kualitasnya yang sangat baik, tetapi pertumbuhan penduduk dan peningkatan aktivitasnya yang tidak selaras dengan manajemen air secara alamiah, telah mengubah tatanan dan keseimbangan air di alam. Bahkan, pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan hidup dan aktifitas manusia seringkali berdampak negatif terhadap ketersediaan sumber daya air. Berbagai masalah yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya air yang tidak terkontrol antara lain terjadinya pencemaran sungai, kekeringan, penurunan muka air tanah, banjir dan lain sebagainya. Hal ini sangat berkaitan dengan paradigma yang telah membudaya yang menganggap, bahwa sumber daya air termasuk kategori sumber daya air terbarukan (*renewable resources*),

sehingga penggunaannya tidak lagi memperhatikan keseimbangan yang terjadi.

a. Kondisi Global

Perkembangan lingkungan global merupakan suatu proses menuju integritas berbagai keterkaitan antar bangsa mengalami percepatan dalam perkembangannya. Globalisasi sebagai sebuah interaksi masyarakat bangsa/dunia mampu melampaui batas-batas konvensional sebuah negara, sehingga sulit untuk dibendung dalam memenuhi kebutuhan hidup. Saat ini permintaan air yang terus meningkat dan perubahan iklim mengancam ketersediaan air dunia. Jumlah permintaan pangan yang melampaui perkiraan, urbanisasi yang terus meningkat dan perubahan iklim adalah faktor utama yang menyebabkan air bersih semakin langka. Semua ini tercantum dalam Laporan Perkembangan Air Dunia PBB (UN World Water Development Report) yang diluncurkan bersamaan dengan acara Forum Air Dunia di Marseille.

Menurut PBB, dunia perlu melakukan perubahan radikal cara pengelolaan sumber daya air ini, agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa mendatang. Dari laporan tersebut juga terungkap, pada tahun 2050, permintaan pangan dunia akan naik sebesar 70%, menyebabkan kebutuhan air untuk pertanian melonjak sebesar 19%. Saat ini sebanyak 70% air tawar (*freshwater*) sudah digunakan untuk kebutuhan pertanian. Menurut Direktur Jenderal UNESCO, Irina Bokova, bahwa air tawar masih digunakan dengan tidak bijaksana, tidak sesuai dengan permintaan dan kebutuhan bahkan untuk mendapatkan informasi yang akurat (terkait penggunaan air) sangat sulit dan sistem pengelolaan air di dunia tidak seragam, sehingga (kondisi air) pada masa mendatang akan semakin tidak menentu dan berisiko.

Banyak negara yang menggali sumber air tanah untuk memenuhi permintaan air penduduknya. Proses pengangkatan air tanah meningkat tiga kali lipat



Alam semesta, pada dasarnya telah menyediakan air yang dibutuhkan dan telah mengatur penyediaan air melalui siklus yang sangat sistematis

dalam 50 tahun terakhir. Di sejumlah wilayah, kondisi air tanah bahkan tidak bisa dipulihkan lagi, air tanah semakin mengering dan saat ini berada dalam kondisi yang kritis. Perubahan iklim juga memperparah kondisi kekurangan air ini. Perubahan pola hujan dan kelembapan tanah, es yang terus mencair serta semakin seringnya bencana yang berhubungan dengan air seperti banjir dan kekeringan akan mempengaruhi produksi pangan dunia. Diperkirakan pada tahun 2070, lebih dari 44 juta penduduk di seluruh dunia akan terkena dampaknya. Bencana kekurangan air akan merugikan terutama bagi masyarakat miskin. Menurut laporan PBB, terdapat 1 miliar penduduk yang tidak memiliki akses atas air yang layak dan jumlah mereka terus bertambah terutama di wilayah perkotaan. Infrastruktur sanitasi juga tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk dan lebih dari 80% air limbah dunia belum diolah kembali dan dikumpulkan.

b. Kondisi Regional

Situasi regional yang terus berkembang pada dasarnya tidak terlepas dari permasalahan global, meningkatnya

kebutuhan air pada lingkup global baik akibat peningkatan jumlah penduduk, perubahan geografi maupun akibat kebijaksanaan pemerintah negara-negara di Asia Tenggara yang mempengaruhi peningkatan kebutuhan air. Sebagai contoh, Singapura, termasuk negara yang sukses membangun tingkat ketahanan air.

Awalnya, tahun 1970-an Singapura merupakan negara miskin air, tetapi pada tahun 2006 tingkat ketahanan air sudah mencapai 68%. Bandingkan dengan DKI Jakarta yang tingkat ketahanan airnya hanya sekitar 2,2% di luar air tanah. Ini berarti, pemerintah DKI Jakarta hanya mampu menyediakan kebutuhan air untuk warganya sekitar 2,2%. Padahal, DKI Jakarta dialiri oleh sekitar 13 sungai, tetapi tidak ada satu pun yang layak menjadi sumber air baku bagi PAM Jaya. Keberhasilan Singapura membangun tingkat ketahanan air, tidak terlepas dari komitmen dan kerja keras yang telah dilakukan. Dengan dukungan dana yang besar ditambah teknologi tinggi dengan membangun *Deep Tunnel Sewerage System* (DTSS), Singapura berhasil mengumpulkan dan mengolah hampir



<http://rri.co.id/Upload/Berita/pdam-kab-madiun.JPG>

seluruh air limbah perkotaan menjadi air bersih yang siap minum (*newater*). Singapura juga sukses mengembangkan teknologi dan fasilitas pengolahan air laut (*desalination facility*) berbiaya relatif murah. Begitu juga dengan sungai-sungainya yang dulu sangat kotor dan tercemar mampu dikelola dengan baik, sehingga menjadi enak untuk dinikmati oleh masyarakat maupun turis.

c. Kondisi Nasional

Kepentingan nasional Indonesia adalah kepentingan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita nasional dan mencapai tujuan nasionalnya. Cita-cita nasional merupakan karya nasional pada strata paling atas yang berdimensi waktu tidak terbatas. Tujuan nasional merupakan usaha-usaha yang terus menerus selama bangsa dan negara itu ada. Dengan demikian persepsi kepentingan nasional Indonesia adalah kepentingan seluruh bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita nasional sebagai *never ending goals* yang didasarkan pada kepentingan untuk terus menerus berusaha dalam mencapai tujuan nasional yang dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan nasional ditinjau dari aspek astagatra. Sesuai dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dinyatakan pada pasal 5, bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif. Untuk bisa menyediakan air yang berkualitas, maka perlu dilakukan pendayagunaan air dengan baik dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan pada pasal 1 angka 19, yaitu pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air secara optimal, agar berhasil guna dan berdaya guna.

Sumber daya air selain memiliki fungsi ekonomi, juga berperan sebagai fungsi sosial dan lingkungan hidup. Sebagai fungsi ekonomi, air merupakan elemen utama bagi kegiatan produksi, baik di sektor pertanian maupun sektor manufaktur. Tanpa air, maka sektor-sektor tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Khusus di bidang pertanian, air memiliki peran yang sangat penting. Tanpa air hampir dapat dipastikan kegiatan pertanian akan lumpuh. Pada saat ini masih banyak aktifitas pertanian masyarakat yang pemenuhan kebutuhan airnya masih tergantung pada siklus alam (tadah hujan), sedangkan kini dengan adanya berbagai anomali alam (pemanasan global, dan lain-lain) siklus tersebut sudah tidak beraturan. Oleh karenanya produktifitas pertanian masyarakat pun ikut terganggu. Berbagai jaringan irigasi banyak yang tidak terawat, sehingga kini banyak yang tidak berfungsi dengan baik. Tidak hanya jaringan irigasi saja yang kurang terpelihara, akan tetapi sumber-sumber air alami pun tidak



terpelihara dengan baik. Banyak wilayah pegunungan dan hutan yang digunduli, sehingga daya dukung gunung dan hutan sebagai penyimpan air pun kini semakin berkurang. Di wilayah perkotaan banyak sungai yang tercemar karena polusi yang diakibatkan oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, demikian juga embung dan danau tidak terpelihara, sehingga sumber air baku juga menjadi berkurang.

Pada era setelah terjadinya krisis ekonomi, kebijakan penyediaan dan pengelolaan air belum tertata secara baik. Prioritas pembangunan belum menyentuh sepenuhnya pada sektor ini, oleh karenanya target untuk swasembada

pada sumber air yang terlindungi. Arti terlindungi dalam hal ini adalah bisa saja yang bersumber dari sebuah sumur, misalnya, yang sudah diberi pembatas atau memiliki pagar atau tutup untuk melindunginya dari kontaminasi hewan. Atau bisa saja air sungai yang telah disaring oleh perusahaan air untuk menghilangkan hampir semua sumber kontaminasi dan kemudian menyalurkannya melalui pipa. Air seperti itu dapat dikategorikan sebagai “air yang bersih” meskipun tidak bisa disebut air minum yang aman. Bahkan ada berbagai standar yang berbeda tentang “kebersihan” air. Satu

Penyediaan air yang layak secara kuantitas dan kualitas, sesungguhnya sudah menjadi prioritas pembangunan di seluruh dunia, hal ini tercermin dari salah satu program Milenium Development Goals (MDG's), yaitu program no 7. Program ini dikaitkan dengan pelestarian lingkungan

pangan bahkan sebagai lumbung pangan ASEAN pun akan sulit tercapai. Untuk itu perhatian pada pengelolaan sumber daya air ini perlu dijadikan prioritas kembali.

- 1) Kondisi Kemampuan Penyediaan Air Berkualitas Saat Ini.

Penyediaan air yang layak secara kuantitas dan kualitas, sesungguhnya sudah menjadi prioritas pembangunan di seluruh dunia, hal ini tercermin dari salah satu program Milenium Development Goals (MDG's), yaitu program no 7. Program ini dikaitkan dengan pelestarian lingkungan. Khusus dalam penyediaan air bersih, target dari MDG program no 7 ini antara lain menetapkan target untuk menurunkan separuh dari proporsi penduduk yang tidak memiliki “akses yang berkelanjutan terhadap air minum yang aman”.

Berdasarkan laporan Tim MDG Indonesia, pada tahun 2006 hanya ada 16 provinsi atau kurang lebih 50% dari provinsi di Indonesia yang penduduknya telah memiliki akses

standar, misalnya, mensyaratkan bahwa sumber air paling tidak harus berjarak minimal 10 meter dari tempat yang digunakan untuk pembuangan tinja. Sedangkan Pada tahun 2010 baru sekitar 47,71% penduduk yang telah memiliki akses pada air bersih.

- 2) Kondisi sumber daya air saat ini

Sumber daya air nasional sebenarnya cukup memadai, akan tetapi manajemen air nasional belum dilakukan secara baik. Salah satu indikator ketersediaan air dapat dilihat dari kondisi curah hujan. Ditinjau intensitas curah hujannya, wilayah di Indonesia secara umum memiliki curah hujan yang relatif tinggi dan hanya di beberapa pulau yang sedang sampai dengan rendah, yaitu di Provinsi NTB dan NTT.

Ketersediaan sumber air untuk wilayah Indonesia sebenarnya cukup melimpah. Meskipun demikian, total curah hujan cukup tinggi di masing-masing pulau tersebut tidak



seluruhnya diserap oleh tanah dan menjadi air tanah. Justru karena tidak terkontrolnya pertambahan lahan terbangun yang kedap air dan untuk menghindari banjir, upaya yang dilakukan adalah secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya air hujan tersebut dibuang ke laut. Data yang ada menunjukkan, bahwa sebagian besar air hujan menjadi *run off* atau air permukaan. Secara ringkas masalah yang mengancam ketahanan air di Indonesia meliputi:

- a) Semakin bertambahnya luas lahan kritis 13,1 juta ha (1992) dan 18,5 juta ha (2009).
- b) Semakin berkurangnya daerah resapan air menjadi kawasan kota dan industri (alih fungsi lahan pertanian 35000 ha/th juga mengancam ketahanan pangan).
- c) Semakin tingginya pemakaian air tanah (di beberapa kota besar 73% penduduk menggunakan air tanah).
- d) Semakin bertambahnya pengguna air karena pertumbuhan penduduk meningkat.
- e) Semakin tingginya penggunaan air karena peningkatan kualitas kehidupan.
- f) Semakin tercemarnya sumber-sumber air (sungai, danau, air tanah) karena tidak tersedia sarana pengolahan air limbah di perkotaan.
- g) Pemanasan global/kenaikan muka air laut yang menimbulkan gangguan terhadap pertambakan, abrasi pantai dan memperberat masalah banjir kota-kota tepi pantai, (mengancam 450,000 ha tambak, 10.666 desa pantai dengan 16 juta penduduk yang tinggal di kawasan pantai).
- h) Belum terpadunya program, kewenangan dan tanggung jawab antar lembaga/kementerian dalam hal pengelolaan lahan dan air (Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum,

Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ Air Tanah, dan Kementerian Dalam Negeri).

4. Analisa Strategik (Astagatra)

Beberapa permasalahan terkait dengan sistem pengelolaan sumber daya air nasional dari perspektif ketahanan nasional, antara lain:

- a. **Gatra Geografi.** Indonesia merupakan negara kepulauan yang dihubungkan oleh luasnya lautan, oleh karenanya sistem pengelolaan air yang dianggap tepat adalah sistem distributif disentralistik yang berbasis pada kearifan lokal (*local based innovation*). Saat ini pola tersebut baru diadopsi oleh beberapa daerah saja.
- b. **Gatra Demografi.** Dengan laju pertumbuhan penduduk yang mencapai 1,49% sebagaimana dilaporkan pada tahun 2012 (menurut BPS), merupakan tantangan tersendiri bagi penyediaan air nasional. Apalagi kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan tidak meratanya jumlah penduduk pada berbagai wilayah menjadi persoalan yang unik dan berbeda dengan negara-negara lainnya.
- c. **Gatra Sumber Kekayaan Alam (SKA).** Indonesia pada dasarnya memiliki Sumber Daya Air (SDA) alamiah yang cukup, akan tetapi pola pengelolaannya belum sistemik dan tertata apik. Pada tingkat kebijakan, sudah cukup banyak tersedia berbagai peraturan dan perundang-undangan, akan tetapi pelaksanaannya belum berjalan secara konsisten.
- d. **Gatra Ideologi.** Sistem pengelolaan air nasional dirasakan belum dapat mendukung pembangunan nasional secara adil dan merata, sehingga mempengaruhi pencapaian cita-cita dan tujuan nasional sesuai amanat Pembukaan UUD NRI 1945.



- e. **Gatra Politik.** Sistem pengelolaan air nasional belum didukung oleh kemauan dan kesadaran politik yang merata dan konsisten di seluruh wilayah NKRI, sehingga mempengaruhi perwujudan satu kesatuan wilayah yang utuh dan seimbang.
- f. **Gatra Ekonomi.** Sistem pengelolaan air nasional belum mendukung berbagai aktifitas ekonomi secara paripurna. Antara prinsip keekonomian dan manfaat serta antara air sebagai komoditi dan air sebagai infra struktur belum diselaraskan dengan baik, sehingga mempengaruhi pengembangan perekonomian nasional.
- g. **Gatra Sosial Budaya.** Sistem pengelolaan air nasional belum sepenuhnya dapat mendukung aktifitas masyarakat (air untuk

untuk mendukung pembangunan nasional (pertanian, produksi, energi dan lain-lain)“.

Untuk mewujudkan kebijakan di atas, dilakukan melalui 4 (empat) strategi utama yaitu: Strategi 1. Membangun *mindset* masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, bahwa air bukanlah merupakan sumber daya alam yang tak terbatas. Oleh karenanya, sumber daya air perlu dikelola secara baik dan bertanggung jawab.

Strategi 1, ini dapat dicapai melalui berbagai upaya diantaranya:

- a. Pemerintah dan pemerintah daerah serta tokoh-tokoh masyarakat maupun tokoh agama senantiasa menyosialisasikan pandangan, bahwa air adalah anugrah dari Yang Maha Kuasa, akan tetapi harus dipelihara dengan baik karena jumlahnya tidak tak terbatas.
- b. Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta tokoh-tokoh masyarakat maupun

kebijakan sistem pengelolaan air nasional harus diarahkan pada “terwujudnya penyediaan air bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata baik untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari (kebutuhan domestik) maupun untuk mendukung pembangunan nasional (pertanian, produksi, energi dan lain-lain)”

konsumsi maupun sebagai faktor pendukung produksi) secara adil dan merata, sehingga untuk memperoleh air yang berkualitas sering kali menimbulkan konflik sosial.

- h. **Gatra Pertahanan dan Keamanan.** *Mindset* sistem pengelolaan air nasional belum dijadikan sebagai elemen penting dan menjadi bagian integral dari pertahanan dan keamanan nasional.

5. Arah Kebijakan Strategis dan Upaya

Mengacu pada data, fakta dan hasil analisis sebagaimana dikemukakan pada uraian sebelumnya, maka kebijakan sistem pengelolaan air nasional harus diarahkan pada “terwujudnya penyediaan air bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata baik untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari (kebutuhan domestik) maupun

tokoh agama senantiasa harus menjadi *role model* (teladan) dalam menjaga dan memelihara sumber-sumber air dan infrastruktur keairan nasional.

- c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta tokoh-tokoh masyarakat maupun tokoh agama senantiasa harus menyosialisasikan pemahaman hidup bersih dengan mempergunakan air bersih.
- d. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), melalui komunikasi, informasi dan edukasi serta pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi di sekolah.
- e. Meningkatkan pemahaman dan perilaku hemat air bagi masyarakat melalui edukasi di sekolah-sekolah dimulai dari tingkat dasar.



- f. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan serta memelihara seluruh infrastruktur keairan nasional.

Strategi 2. Mengembangkan sistem kelembagaan pengelolaan sumber daya air melalui semangat kerjasama dan koordinasi yang efektif dalam satu visi bersama “memperkuat ketahanan air untuk kesejahteraan bersama”. Untuk mewujudkan strategi 2 ini, dilakukan berbagai upaya diantaranya :

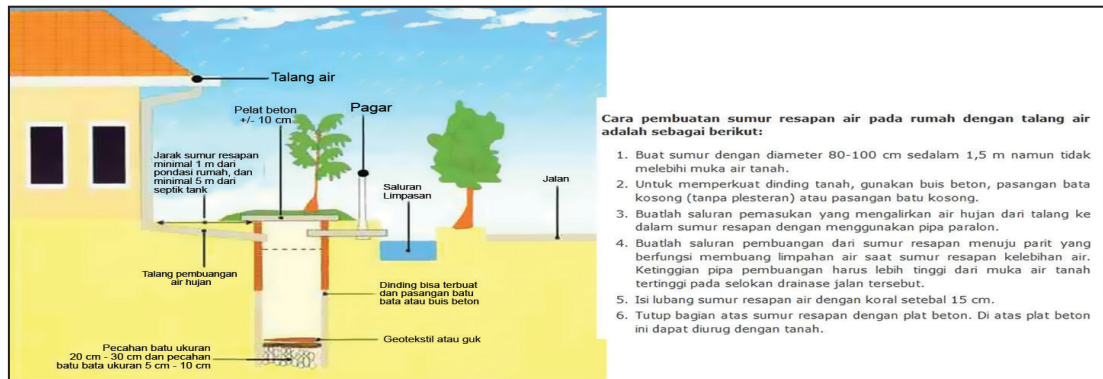
- Membentuk satu kementerian khusus yang mengintegrasikan berbagai fungsi pengelolaan air yang kini tersebar di berbagai kementerian.
- Meningkatkan sinergitas program aksi berbagai lembaga di tingkat pusat dan daerah dalam melaksanakan manajemen keairan nasional (penyediaan air bersih bagi domestik dan pembangunan, pemeliharaan infrastruktur air dan sebagainya).
- Meningkatkan kapabilitas SDM (*capacity building*) seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan manajemen keairan nasional (akademisi, brokrasi dan pelaku usaha).
- Meningkatkan kinerja manajemen penyelenggaraan air minum dan sanitasi yang layak, melalui: (i) penyusunan *business plan*, penerapan korporatisasi, pelaksanaan manajemen aset, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik yang dilakukan oleh institusi maupun masyarakat; (ii) peningkatan kerja sama lintas program, lintas sektor dan kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat; (iii) peningkatan keterkaitan antara sistem pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat dengan pemerintah; dan (iv) optimalisasi pemanfaatan sumber dana.

Strategi 3. Melakukan revitalisasi dan menyusun kembali *grand design* manajemen keairan nasional yang mampu meningkatkan cakupan pengelolaan air nasional dan mampu penyediaan kebutuhan air bagi seluruh masyarakat. Untuk mewujudkan strategi 3 ini, dilakukan berbagai upaya diantaranya :

- Merevitalisasi rencana induk sistem penyediaan air nasional yang mencakup pelayanan penyediaan air bagi seluruh daerah (kabupaten/kota).
- Merevitalisasi rencana induk konservasi sumber daya air yang mencakup perlindungan dan pelestarian sumber daya air, pengawetan air serta pengelolaan kualitas maupun pengendalian pencemaran air.
- Merevitalisasi sistem penyediaan air baku untuk air minum, melalui : (i) pengendalian penggunaan air tanah oleh pengguna domestik maupun industri; (ii) perlindungan sumber air tanah dan permukaan dari pencemaran domestik; dan (iii) pengembangan dan penerapan teknologi pemanfaatan sumber air alternati termasuk air reklamasi.
- Merevitalisasi sistem pemeliharaan infrastruktur keairan nasional termasuk didalamnya pemeliharaan berbagai sumber air yang dapat mendukung pembangunan nasional.
- Menciptakan iklim investasi yang mendukung pembangunan guna merangsang partisipasi aktif sektor swasta dan masyarakat dalam penyediaan air bersih khususnya bagi kepentingan domestik melalui: peningkatan kerjasama pemerintah-swasta (KPS) dan *corporate social responsibilities* (CSR) serta pengembangan maupun pemasaran pilihan sistem penyediaan air yang tepat guna.

Strategi 4. Menyelaraskan berbagai peraturan mengenai sistem pengelolaan air nasional, khususnya pada tingkat pelaksanaannya. Untuk mewujudkan strategi 4 ini, dilakukan berbagai upaya diantaranya:

- Menyelaraskan dan mengharmoniskan berbagai peraturan pada tingkat pusat dan daerah yang masih tumpang tindih.
- Menyelaraskan dan mengharmoniskan berbagai peraturan sektoral (antara lembaga dan kementerian).
- Melakukan penambahan, revisi atau deregulasi berbagai peraturan yang menghambat partisipasi masyarakat



<http://stat.ks.kidsklik.com/statics/files/2012/12/1356765959656765473.jpg>

dalam pengelolaan keairan nasional.

- d. Mempertegas berbagai peraturan yang berkaitan dengan pemeliharaan infrastruktur keairan nasional.

6. Kesimpulan

Dari analisis terhadap kondisi masa kini dan kebutuhan di masa mendatang dapat disimpulkan beberapa hal:

- a. Sumber daya air memiliki manfaat yang tak ternilai bagi kehidupan manusia. Sebagai suatu unsur abiotik dalam bumi, keberadaan dan keberlangsungan air sangat bergantung pada apa yang dilakukan oleh manusia. Teknologi terkait dengan konservasi dan pemanfaatan sumber daya air telah banyak dikembangkan. Pemilihan teknologi tepat guna yang ditentukan oleh karakteristik wilayah (alam, sosial dan budaya masyarakat) serta kemampuan dari finansial yang dimiliki. Namun demikian faktor yang paling penting dalam keberhasilan pengelolaan sumber daya air adalah faktor manusia sebagai pengguna. Pelestarian kearifan lokal yang telah membudaya secara turun temurun dalam pengelolaan sumber daya air perlu dilakukan.
- b. Upaya membangun tingkat ketahanan air nasional sudah seharusnya menjadi agenda nasional. Pasalnya ke depan, dengan jumlah populasi penduduk yang semakin bertambah serta kebutuhan air yang semakin meningkat, membuat keberadaan air semakin teramat penting. Ketersediaan air akan semakin menjadi faktor pembatas dan sekaligus

penentu keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Karena itulah, upaya pemetaan potensi air dan ketahanan air menjadi agenda yang harus menjadi perhatian yang serius.

- c. Pengelolaan sumber daya air juga memerlukan sistem kelembagaan yang kuat dan bertanggung jawab. Pengelolaan sumber daya air yang terpadu memerlukan juga keterlibatan berbagai pihak selain Kementerian Pekerjaan Umum, seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, serta Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah juga berupaya menggalang keterlibatan peran swasta dan masyarakat terutama dalam hal pendanaan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air serta pengendalian bencana alam. Pengembangan kelembagaan ini merupakan salah satu kunci penting dalam mewujudkan keterpaduan pengelolaan sumber daya air.
- d. Pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber kehidupan bagi manusia perlu dikelola secara terpadu, karena kalau tidak, maka akan menimbulkan berbagai macam konflik antara lain:
 - 1). Konflik antar kawasan, daerah, propinsi bahkan negara. Konflik antar kawasan misalnya adalah antara kawasan hulu dan kawasan bagian hilir DAS berkaitan dengan fungsi kawasan dalam siklus hidrologi. Konflik antar negara dapat terjadi mengingat beberapa DAS dan cekungan air tanah berada pada lintas negara.



- 2). Konflik sosial dan budaya. Nilai-nilai sosial budaya masyarakat yang masih ada seringkali berbenturan dengan proses industrialisasi dan berkembangnya masyarakat urban yang juga menempatkan air sebagai media pembuangan limbah. Pencemaran atau kekeringan sungai dan sumur-sumur masyarakat akibat pembangunan di sekelilingnya, seringkali menyebabkan penolakan terhadap keberlangsungan pembangunan tersebut.
- 3). Konflik pengelolaan antar instansi. Nilai strategis dari sumber daya air bagi keberlangsungan hidup, alam dan kegiatan sosial ekonomi mendorong instansi-instansi terkait menyusun rencana dan kegiatan konflik antara kebijakan pembangunan ekonomi dan kebijakan pelestarian sumber daya alam terkait dengan pengelolaan sumber daya air sesuai dengan tupoksi dan kewenangan masing-masing. Namun demikian, belum ada keterpaduan, bahkan seringkali menjadi tumpang tindih, tidak saling mendukung atau bahkan bertolak belakang. Pada akhirnya manfaat (*outcome*) yang dihasilkan belum optimal.
- 4). Konflik pemanfaatan antar pemangku kepentingan. Konflik pemanfaatan seringkali terjadi berkaitan dengan adanya perbedaan kebutuhan baik jumlah (kuantitas) maupun kualitas air, sementara sumber air yang dimanfaatkan sama.
- 5). Konflik ini hampir terjadi di semua negara, di satu sisi upaya strategis dan percepatan pembangunan ekonomi sangat diperlukan dan mendesak untuk dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dilain pihak upaya pelestarian sumber daya alam juga bersifat strategis mengingat sudah banyak sekali bencana lingkungan terjadi akibat kerusakan lingkungan.

7. Rekomendasi

Memperhatikan kondisi dan hambatan sebagaimana dikemukakan di atas, maka perlu dilakukan revitalisasi dan menyusun kembali *grand design* sistem pengelolaan air nasional.

- a. Membangun *mindset* masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, bahwa air bukanlah merupakan sumber daya alam yang tak terbatas. Oleh karenanya, sumber daya air perlu dipelihara dan dikelola secara baik, berkesinambungan dan bertanggung jawab.
- b. Menyelaraskan fungsi sosial lingkungan hidup dan ekonomi sumber daya air untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap orang dengan mengoptimalkan nilai manfaat dan ekonomi air dengan tetap memperhatikan upaya pelestariannya.
- c. Melakukan evaluasi dan menyusun kembali *grand design* manajemen keairan nasional yang mencakup empat (4) hal strategis, yaitu;
 - 1) Mengembangkan sistem kelembagaan pengelolaan sumber daya air melalui semangat kerjasama dan koordinasi yang efektif dalam satu visi bersama “memperkuat ketahanan air untuk kesejahteraan bersama”. Perlu kiranya dikaji secara khusus mengenai pembentukan kementerian khusus yang mengelola keairan nasional. Kementerian ini mengemban tugas sistem manajemen keairan nasional yang kini tersebar di berbagai kementerian.
 - 2) Menyelaraskan berbagai peraturan mengenai sistem pengelolaan air nasional, khususnya pada tingkat pelaksanaannya.
 - 3) Revitalisasi infrastruktur air alami termasuk didalamnya; melakukan pembenahan sistem konservasi sumber daya air baku, pengelolaan DAS secara efektif dan berkelanjutan, pemeliharaan dan memfungsikan berbagai danau dan embung-embung, pengembangan bendungan-bendungan, pengawasan terhadap berbagai



aktivitas yang mencemari lingkungan dan sumber daya air alami, di seluruh wilayah Indonesia.

- 4) Penyehatan PDAM yang ada serta membangun PDAM baru di berbagai daerah yang belum memilikinya melalui *prinsip local based innovation* dan sistem pengusahaan yang

accountable, sehingga mampu menyediakan kebutuhan air yang sehat, bersih dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mendukung Pembangunan Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional

Focus Group Discussion (FGD)

- Selasa, 4 September 2012
- Pembicara :
 1. Direktur Bina Pentatagunaan Sumber Daya Air, Dirjen Sumber Daya Air (PSDA), Kementerian Pekerjaan Umum RI Dr. Ir. Arie Setiadi Moerwanto, M.Sc
 2. Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Abetnego Tarigan
 3. Peneliti Senior Lembaga Penelitian Universitas Trisakti Dr. Ir. Endrawati Fatimah
 4. Tenaga Profesional Bidang SKA Lemhannas RI Laksda TNI (Purn) Bambang Daryanto, SH, S.Pi.
- Penanggap :
 1. Tenaga Pengkaji Bidang Sosbud Lemhannas RI Prof. Dr. Sudaryono, SU
 2. Tenaga Pengkaji Bidang Geografi Lemhannas RI Mayjen TNI Endang Hairudin, ST, MM
 3. Tenaga Ahli Pengajar Bidang Pad Nas Lemhannas RI Mayjen TNI Drs. Christian Zebua, MM
 4. Tenaga Profesional Bidang Ketahanan Nasional Lemhannas RI Mayjen TNI (Purn) Lumban Sianipar, S.IP,
 5. Tenaga Profesional Bidang Hukum & HAM Lemhannas RI Irjen Pol (Purn) Drs. Zainal Abidin Ishak, SH,

Roundtable Discussion (RTD)

- Selasa, 16 Oktober 2012
- Pembicara :
 1. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Negara PPN/ Kepala Bappenas RI Dr. Ir. Dedy Supriadi Priatna, MSc.,
 2. General Manager Air Kita Foundation Mr. Didier Perez.
 3. Pejabat Fungsional SDA Kementerian Pekerjaan Umum RI Ir. S. Budi Santoso, Dipl. HE.
 4. Direktur PDAM Tirta Musi Palembang, Sumatera Selatan Dr. Ir. H. Syaiful, DEA.
- Penanggap :
 1. Peneliti dan dosen Program Studi Teknik Lingkungan Departemen Teknik Sipil-FTUI Ir. Firdaus Ali M.Sc.
 2. Sekretaris Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kementerian PU Ir. Tamin M. Zakaria Amin, MSc, MBA.
 3. Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A.

Tim Penyusun : Direktorat Pengkajian Bidang Sosial dan Budaya



<http://www.demokrat.or.id/wp-content/uploads/2011/07/SBY-Asean.jpg>

ASEAN Leadership guna Mewujudkan ASEAN Community dalam Rangka Ketahanan Regional

ASEAN telah menetapkan suatu *road map* to ASEAN Community 2015 yang tertuang dalam cetak biru (*blueprint*) ketiga pilar ASEAN Community yaitu ASEAN Economic Community 176 *action lines*, ASEAN Political-Security Community 155 *action lines*, dan ASEAN Socio-Cultural Community 348 *action lines*. Sehingga secara keseluruhan terdapat 679 *action lines* yang sudah disepakati dan mengikat seluruh negara anggota ASEAN untuk dijadikan acuan dalam membangun ASEAN Community 2015. Untuk mendukung keberhasilan implementasi Piagam ASEAN (ASEAN Charter) tersebut diperlukan figur kepemimpinan ASEAN yang mampu mengakomodir berbagai kepentingan negara-negara anggota ASEAN.

Perkembangan ASEAN terkini yang perlu menjadi perhatian adalah kondisi eksternal dari

ASEAN yaitu kehadiran negara-negara besar seperti China, Rusia dan USA yang kesemuanya memiliki keinginan untuk mendominasi dan memimpin. Secara khusus, dewasa ini terjadi persaingan yang ketat antara AS dan China. Kedua negara tersebut berusaha menancapkan pengaruhnya di percaturan politik internasional, tidak terkecuali di kawasan Asia Tenggara yang berkembang sangat dinamis. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri karena AS dan China terus berkompetisi untuk menancapkan pengaruh di Asia Tenggara, sedangkan ASEAN masih belum satu suara dalam merespon isu tersebut.

Sehubungan dengan itu Indonesia perlu melakukan pendalaman materi secara komprehensif mengenai ASEAN *leadership* guna mewujudkan ASEAN Community dalam rangka



ketahanan regional dengan berpijak pada kepentingan nasional Indonesia.

Tantangan yang dihadapi internal Indonesia dalam mewujudkan ASEAN *Leadership* guna mewujudkan ASEAN *Community* 2015 memerlukan prasyarat kondisi yang harus dipenuhi yaitu; (1) Politik domestik telah berjalan sesuai dengan nilai dan norma universal; (2) Kondisi keamanan yang kondusif, damai, stabil, mandiri; (3) Terbangunnya masyarakat yang terbuka bagi pergaulan dunia.

Untuk dapat mengefektifkan secara komprehensif konsolidasi internal Indonesia dalam menghadapi ASEAN *Community* 2015 terdapat beberapa prasyarat yang perlu mendapatkan perhatian. Pertama, perlu disusun *Grand Design* Nasional Pelaksanaan *Blue Print Road Map to ASEAN Community* 2015. *Grand Design* tersebut berisi persiapan dan implementasi *ground works* dan infrastruktur ASEAN yang memiliki standar yang harus dipenuhi oleh seluruh anggota ASEAN termasuk Indonesia. Dalam proses penyusunannya harus melibatkan partisipasi dan bekerja sama dengan berbagai *stakeholders*, seperti akademisi, media dan organisasi masyarakat sipil. Kedua, perlu pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing kementerian/lembaga, pemda dan pemangku kepentingan lain dalam pelaksanaan *Blue Print Road Map to ASEAN Community* 2015 dan perlu diintegrasikan ke dalam peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah.

Kenyataannya, saat ini Pemerintah belum mempersiapkan secara komprehensif dan sistematis materi terkait bagaimana melaksanakan *Blue Print Road Map to ASEAN Community* 2015 dalam suatu *Grand Design* Nasional pelaksanaan Piagam ASEAN dan cetak birunya. Pemerintah belum juga secara komprehensif dan terintegrasi menyiapkan strategi komunikasi untuk mensosialisasikan substansi dan tanggung jawab masing-masing pihak kepada seluruh pemangku kepentingan di Indonesia. Tanpa ada *Grand Design* Nasional, maka efektivitas koordinasi, perencanaan, sinkronisasi dan sinergitas semua pemangku kepentingan akan mengalami kendala dalam mempersiapkan Indonesia memasuki ASEAN *Community* 2015.

Dalam Perspektif Sentralitas Kepemimpinan ASEAN di Kawasan Asia Tenggara, hal ini erat

kaitannya dengan keberadaan ASEAN dan Evolusi *Regional Architecture*. Perkembangan kontemporer menunjukkan, bahwa evolusi *regional architecture* ASEAN kini sudah berkembang ke dalam suatu forum *East Asia Summit* (EAS) dengan jumlah negara partisipan 18 negara, termasuk Rusia dan Amerika Serikat di dalamnya.

ASEAN tampaknya berusaha mempertahankan sentralitas dan kepemimpinannya, selagi membangun integrasi yang lebih dalam di antara negara-negara anggota ASEAN.

Ada dua skenario yang mungkin akan terjadi: **Pertama**, ASEAN sukses mengukir sejarah baru, integrasi tanpa bantuan negara besar. **Kedua**, ASEAN justru akan kehilangan sentralitas dan kepemimpinan karena dijadikan ajang perebutan pengaruh negara-negara besar.

Berpijak pada berbagai uraian di atas, berikut rekomendasi kebijakan dan strategi yang diperlukan guna mencapai kepentingan nasional Indonesia, yaitu:

Kebijakan 1 :

Penguatan Koordinasi Pusat-Daerah Dalam Kerangka Pembentukan ASEAN *Community* 2015.

Strategi :

1. Optimalisasi Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
2. Tersedianya *Grand Design* Nasional Pelaksanaan *Blueprint* ASEAN *Community* (APSC, AEC, ASCC).
3. Pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lain dalam pelaksanaan *Blueprint* ASEAN *Community* (APSC, AEC, ASCC).
4. Meningkatkan soliditas, sinergitas dan koordinasi antar *stakeholders* dalam rangka mewujudkan *unity in diversity* dalam ASEAN *Community*.
5. Pembangunan data base potensi lokal berstandar internasional.

Kebijakan 2 :

Pembangunan Indeks Kepemimpinan ASEAN.

Strategi :

1. Pelatihan kepemimpinan yang dilakukan oleh sebuah institusi ASEAN yang melibatkan peserta dari kalangan pemerintah dan pejabatnya (*Track I*), intelektual dan akademisi (*Track II*), dan



Indonesia perlu melakukan pendalaman materi secara komprehensif mengenai ASEAN leadership guna mewujudkan ASEAN Community dalam rangka ketahanan regional dengan berpijak pada kepentingan nasional Indonesia.

organisasi masyarakat sipil (*Track III*).

2. Kurikulum, bahan dan metode pelatihan terintegrasi untuk digunakan oleh lembaga nasional para anggota ASEAN.
3. Membangun standar regional untuk integrasi regional.

Kebijakan 3 :

Peningkatan Kesadaran ASEAN dan Rasa Satu Komunitas.

Strategi :

1. Mengkaji dan mengembangkan Rencana Komunikasi Kawasan dan Nasional di setiap negara ASEAN dalam mendukung upaya pembangunan identitas dan kesadaran ASEAN.
2. Memproduksi materi cetak, penyiaran dan multimedia mengenai ASEAN secara terkoordinasi.
3. Memperkuat kemampuan nasional dalam pelestarian dan promosi warisan budaya yang berwujud *audio-visual*.
4. Menyebarkan budaya ASEAN, tradisi dan nilai sosial, khususnya di kalangan generasi muda melalui media.
5. Menggerakkan media massa dan lembaga budaya lain untuk menyebarkan dan memanfaatkan bersama informasi tentang budaya, perkembangan, prestasi, manfaat, dan tujuan ASEAN kepada rakyat.
6. Membina bakat dan meningkatkan interaksi di antara rakyat ASEAN yang terkait bidang warisan budaya ASEAN sekaligus memperkuat identitas kawasan dan menumbuhkan kesadaran rakyat ASEAN.

ASEAN Leadership guna Mewujudkan ASEAN Community dalam rangka Ketahanan Regional

Focus Group Discussion (FGD)

- Senin, 9 Juli 2012
- Pembicara :
 1. Ketua Program Doktor Universitas Padjajaran Prof. Yanyan M. Yani.
 2. Wakil Dekan Fisip UI Dr. Eddy Prasetyono.
 3. Direktur Polkam ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Jose M. Tavares.

Roundtable Discussion (RTD)

- Jumat, 10 Agustus 2012
- Pembicara :
 1. Sekjen ASEAN Dr. Surin Pitsuwan
 2. Dirjen Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI I Gusti Agung Weseka Puja
 3. Wakil Ketua Dekan FISIP UI Eddy Prasetyono, PhD
 4. Executive Director of ASEAN Foundation Dr. Makarim Wibisono
- Penanggap :
 1. Wakil Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Moeldoko
 2. Tenaga Profesional Bidang Hubungan Internasional Lemhannas RI Ir. Timotius D. Harsono.
 3. Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Hukum & HAM Lemhannas RI Irjen Pol Drs. Alpiner Sinaga
 4. Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Sismennas Lemhannas RI Laksda TNI Bambang Budianto, SE
 5. Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Diplomasi Lemhannas RI Marsda TNI Bambang Purwadi Priono, S.IP

Tim Penyusun : Direktorat Pengkajian Bidang Internasional

“Grand Design Pelaksanaan TKI Ke Luar Negeri guna Menjaga Harkat dan Martabat Bangsa dalam Rangka Ketahanan Nasional”



<http://perempuanduniaketiga.files.wordpress.com/2011/11/tki-sukses9.jpg>

1. Latar Belakang

TKI yang bekerja di luar negeri sangat penting untuk mengurangi pengangguran yang masih banyak dan belum dapat diserap oleh keterbatasan pekerjaan di Indonesia. Secara ekonomi TKI yang bekerja di luar negeri telah menghasilkan devisa bagi negara dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para TKI dan masyarakat sekitarnya. Selain itu TKI yang bekerja di luar negeri juga menjadi duta bangsa untuk mengenalkan Indonesia di luar negeri. Namun pengiriman TKI ke luar negeri harus tetap menjaga harga diri dan martabat bangsa Indonesia. Oleh karena itu diperlukan

“grand design” pengelolaan TKI yang dituangkan dalam bentuk regulasi dan dilaksanakan secara konsekuen dan berkelanjutan agar manfaat dan keuntungan dapat ditingkatkan sekaligus diminimalkan masalah dan dampak yang timbul dari pengiriman TKI ke luar negeri.

Pengelolaan TKI yang dilakukan oleh pemerintah saat ini masih menghadapi berbagai persoalan, seperti masih adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga pemerintah dan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan pengiriman TKI ke luar negeri. Saat ini ada 18 instansi pemerintah yang menangani TKI, dan instansi itu bekerja berdasar tupoksi masing-masing dengan payung hukum yang berbeda-beda. Pada ranah regulasi dan operasi dualisme penanganan TKI oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menimbulkan berbagai masalah pada tataran implementasi terutama di daerah. Oleh karena itu diharapkan pemerintah segera menyelesaikan dualisme itu agar pengelolaan TKI lebih baik di masa mendatang.

Berbagai masalah yang berkaitan dengan TKI yang bekerja di luar negeri merupakan akumulasi dari kelemahan dan masalah dari pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang berkaitan dengan TKI, yaitu pemerintah sebagai regulator dan operator, PPTKIS sebagai mitra pemerintah, pemakai jasa TKI di luar negeri, dan para TKI itu sendiri. Berbagai kelemahan dan masalah yang ada pada seluruh pemangku kepentingan TKI bermuara pada munculnya masalah yang akan dialami oleh para TKI, sebaliknya keberhasilan pengelolaan TKI akan menimbulkan keuntungan dan kemudahan bagi para TKI. TKI harus menjadi subjek untuk dibantu dan difasilitasi dan TKI bukan objek bagi orang atau pihak lain untuk memperoleh keuntungan atau uang karena TKI menghasilkan uang atau devisa bagi negara. Penyelesaian masalah TKI juga harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan TKI.



Berbagai upaya untuk mengurai permasalahan TKI sesungguhnya telah dilakukan oleh pemerintah, seperti upaya pemerintah dalam meratifikasi Konvensi Buruh Migran yang telah disetujui oleh Komisi IX DPR RI dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) yang melibatkan 3 (tiga) kementerian (Kementerian Luar Negeri/ Kemenlu, Kementerian Hukum dan Ham/ Kemenkumham, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi/ Kemenakertrans) dan Komisi IX DPR-RI, pada tanggal 9 April 2012. Selain itu pemerintah juga telah membentuk Satgas TKI, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2012. Berbagai upaya dari pemerintah tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah telah bersungguh-sungguh menyelesaikan permasalahan TKI dengan tuntas.

Menyikapi berbagai perkembangan permasalahan TKI tersebut, dalam diskusi antara Muhaimin Iskandar, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Prof. Dr. Budi Susilo Soepandji, Gubernur Lemhannas RI pada tanggal 8 Maret 2012 bertempat di Gedung Kemenakertrans Jl. Kalibata mendapatkan suatu pokok pemikiran bahwa, “secara konsep makro, antar kementerian/ lembaga belum ada sinkronisasi dan masih terdapat tumpang

tindih berbagai pekerjaan ataupun pengkajian. Tumpang tindih tersebut antara lain terlihat dari adanya duplikasi program yang terkait dengan ketenagakerjaan, seperti di Kementerian Perdagangan ada program Bina Tenaga Kerja, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ada program Pengembangan Ekonomi Makro dan lain-lain”.

Melihat kompleks dan rumitnya penuntasan berbagai permasalahan TKI yang pada akhirnya dapat mempengaruhi stabilitas maupun harkat dan martabat bangsa, maka Lemhannas RI melalui Deputi Bidang Pengkajian Strategik, Direktorat Pengkajian Internasional merasa berkewajiban untuk melakukan kajian tentang TKI. Kajian ini nantinya akan menghasilkan naskah dan kebijakan tentang *grand design* pelaksanaan TKI ke luar negeri yang komprehensif, tertata, terukur, dan memadai konsepsi strategik yang harus dilakukan oleh tiap-tiap kementerian/ lembaga, sehingga tidak terjadi tumpang tindih program.

2. Analisis

a. Analisis Gatra Geografi

Letak geografi Indonesia yang berada di antara dua samudera dan dua benua, serta dilintasi selat-selat penting untuk jalur lalu lintas



ekonomi dunia menempatkan posisi Indonesia sangat penting dalam percaturan ekonomi dunia dan menjadi perhatian dunia karena posisi strategis tersebut. Aspek negatif dari kondisi geografis Indonesia ini adalah munculnya kepentingan-kepentingan negara maju untuk memanfaatkan posisi strategis itu untuk tujuan politik, ekonomi, keamanan dan penyebaran agama, baik dengan cara campur tangan, intervensi, atau invasi jika memungkinkan. Dengan memanfaatkan globalisasi sebagai medianya, kepentingan-kepentingan negara maju itu menyusup ke seluruh aspek kehidupan bangsa.

Letak geografi Indonesia yang strategis dan terdiri atas pulau-pulau juga mempunyai kelemahan dalam upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang terpecah-pecah dalam banyak pulau menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang sangat terbuka. Keterbukaan ini

sarana bagi masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Migrasi dilakukan karena wilayah tempat hidupnya semula tidak tersedia pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu mereka mencari pekerjaan ke wilayah yang lain, baik di Indonesia atau ke luar negeri. TKI mencari pekerjaan di luar negeri pada dasarnya adalah karena kesulitan memperoleh pekerjaan di Indonesia, atau walaupun mereka memperoleh pekerjaan di Indonesia penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu negara lain karena tingkat ekonominya sangat baik, maka berani memberikan gaji yang lebih tinggi walaupun sebenarnya para pemakai jasa TKI itu jauh lebih diuntungkan secara finansial daripada TKI itu sendiri. Pada umumnya pemakai jasa TKI mengeluarkan sekitar 300–500 US\$ perbulan diberikan kepada TKI, tetapi mereka memperoleh sekitar 5 hingga 10 kali lipat pendapatan karena

keberhasilan pengelolaan TKI akan menimbulkan keuntungan dan kemudahan bagi para TKI. TKI harus menjadi subjek untuk dibantu dan difasilitasi dan TKI bukan objek bagi orang atau pihak lain untuk memperoleh keuntungan atau uang karena TKI menghasilkan uang atau devisa bagi negara

mengakibatkan adanya banyak pintu masuk dan ke luar Indonesia, baik melalui sarana embarkasi/debarkasi darat, laut, dan udara. Keterbukaan inilah yang menjadi salah satu faktor munculnya TKI ilegal ke luar negeri, karena mereka dapat memanfaatkan peluang pergi ke luar negeri melalui jalur-jalur yang tidak dikontrol oleh pemerintah.

b. Analisis Gatra Demografi

Jumlah penduduk Indonesia yang saat ini lebih dari 220 juta jiwa merupakan modal dasar untuk melaksanakan pembangunan nasional. Namun karena penyebaran penduduk tidak merata, jumlah penduduk miskin masih sangat besar, tingkat pengangguran masih tinggi, dan pendidikan masyarakat yang relatif masih rendah, maka kondisi ini akan menjadi potensi dan daya dukung bagi pergerakan masyarakat menuju ke tempat-tempat yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Migrasi internal Indonesia dan migrasi internasional adalah

dapat bekerja setelah pekerjaannya di rumah (mengurus anak/orang tua, memasak, mencuci/ seterika, membersihkan rumah) dikerjakan oleh TKI.

c. Analisis Gatra Sumber Kekayaan Alam

Kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dan memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah akan memancing negara asing maupun orang atau kelompok di Indonesia untuk memanfaatkan secara tidak sah untuk kepentingan mereka. Hingga saat ini hampir sebagian besar sumber kekayaan alam Indonesia masih dikelola pihak asing. Apabila sumber kekayaan alam yang ada di Indonesia dapat dikelola sendiri oleh bangsa Indonesia, niscaya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia terwujud. Jika kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia sudah terwujud, maka tidak perlu lagi ada TKI yang bekerja di luar negeri karena di dalam negeri Indonesia sendiri sangat membutuhkan tenaga



Secara ekonomi TKI yang bekerja di luar negeri telah menghasilkan devisa bagi negara dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para TKI dan masyarakat sekitarnya. Selain itu TKI yang bekerja di luar negeri juga menjadi duta bangsa untuk mengenalkan Indonesia di luar negeri

kerja untuk mengolah kekayaan alam yang ada di Indonesia. Walaupun para TKI yang bekerja di luar negeri mendapat keuntungan finansial karena mendapat gaji yang relatif tinggi, tetapi keuntungan yang diperoleh oleh para pemakai jasa TKI jauh lebih besar karena dapat bekerja setelah pekerjaan rumah tangganya dikerjakan oleh para TKI. Dengan demikian apabila para TKI bekerja di dalam negeri, maka Indonesialah yang akan mendapat keuntungan TKI adalah sarana produksi yang menghasilkan keuntungan demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

d. Analisis Gatra Ideologi

Pancasila adalah landasan Idiil yang menjadi satu-satunya dasar negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akhir-akhir ini ada usaha dari kelompok kecil dalam masyarakat yang ingin mengubah nilai-nilai dasar Pancasila dan mengembangkan primordialisme sempit berdasarkan agama, etnik, dan golongan, serta pemaksaan ideologi asing kepada masyarakat. Gerakan ini di samping membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara, juga akan mempersulit usaha pemerintah dan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan kerukunan hidup di Indonesia. Keberadaan TKI di luar negeri tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan strategis tempat mereka berada. Lingkungan strategis yang berbeda dengan lingkungan di Indonesia dapat mempengaruhi sistem nilai dan ideologi TKI. Oleh karena itu harus diwaspadai keterpengaruhan TKI dalam bidang ideologi jangan sampai sepulang mereka dari kerja di luar negeri kemudian mengembangkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

e. Analisis Gatra Politik

Desentralisasi di Indonesia dilakukan untuk memperkuat Negara Kesatuan (NKRI), bukan negara federal (federalisme). Kerangka otonomi daerah secara luas di Indonesia diharapkan dapat berjalan secara efektif dalam menggerakkan laju pembangunan di berbagai bidang di daerah, untuk memperkuat NKRI. Dengan implementasi otonomi daerah secara luas dalam kerangka penguatan NKRI, maka diharapkan akan muncul kemandirian yang digerakkan oleh kreativitas dan inovasi daerah dalam mengoptimalkan berbagai potensi sumberdaya yang ada untuk kepentingan kemajuan dan kesejahteraan daerah. Tata hubungan antara pusat-daerah diharapkan juga akan menjadi lebih proporsional, harmonis dan produktif dalam rangka penguatan integrasi (persatuan dan kesatuan) bangsa dan pembangunan nasional. Dengan demikian, tidak akan ada lagi keluhan-keluhan dari daerah atas kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak adil. Demikian pula, tidak akan ada lagi resistensi dan gejolak terkait dengan hubungan pusat-daerah.

Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk pengejawantahan dari proses desentralisasi adalah upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan diselenggarakannya pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, yang adil dan makmur. Dalam hal ini linearitas kebijakan pusat dan daerah menjadi sarana keberhasilan tujuan pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan dalam pengiriman dan perlindungan TKI ke luar negeri seharusnya juga tidak berbeda antara pusat dan daerah. Pemerintah daerah sebaiknya diberikan kewenangan untuk berkontribusi di dalam perumusan kebijakan dan implementasinya mengenai pengiriman dan perlindungan TKI ke luar negeri.

f. Analisis Gatra Ekonomi

Kondisi ekonomi Indonesia yang belum pulih dari krisis dan diperparah oleh kenaikan harga BBM di tingkat dunia akan semakin memperlemah posisi Indonesia dalam percaturan ekonomi dunia. Akibatnya perekonomian Indonesia akan semakin tergantung pada negara lain, terutama melalui mekanisme bantuan, hibah, dan pinjaman. Selain itu tingginya tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang masih rendah, serta



lapangan kerja yang sempit akan memperparah kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan terutama yang bersumber dari pengangguran akan mendorong orang untuk mencari pekerjaan di mana pun juga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selama kemiskinan dan pengangguran itu masih ada di Indonesia, maka selama itu juga akan ada TKI yang ingin bekerja di luar negeri karena bekerja di luar negeri adalah sarana untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu keinginan untuk menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri tidak akan pernah terlaksana selama tidak tersedia pekerjaan di dalam negeri. Sebaliknya pengiriman TKI ke luar negeri justru menjadi sarana untuk mengurangi pengangguran di Indonesia.

kelamin wanita yang mempunyai anak. Ibu-ibu yang karena kondisi ekonomi harus bekerja di luar negeri dalam jangka waktu lama meninggalkan anaknya akan berakibat hilangnya kasih sayang anak yang seharusnya diterima dari ibunya. Anak-anak yang dalam masa pertumbuhannya tidak menikmati kasih sayang ibu secara psikologis akan menimbulkan perilaku asosial yang kemudian terekspresikan dalam bentuk tawuran, narkoba, atau tindak kriminal. Selain itu ibu-ibu yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu lama juga akan berakibat pada hubungannya dengan suami yang ditinggalkannya. Kebutuhan biologis suami yang ditinggalkannya mendorong suami selingkuh atau mencari kepuasan seksual kepada wanita lain

Dengan mempertimbangkan nilai strategis TKI di luar negeri, baik sebagai penghasil devisa, mengurangi pengangguran, dan menjadi duta Indonesia di luar negeri diperlukan komitmen pemerintah untuk bersungguh-sungguh mengelola pengiriman dan perlindungan TKI ke luar negeri

g. Analisis Gatra Sosial Budaya

TKI adalah makhluk sosial yang hidup bersama dengan makhluk lainnya di dalam komunitas atau kelompok sosial tertentu. Di dalam berinteraksi sosial, para TKI akan mengadopsi gaya hidup masyarakat sekitarnya. Didukung oleh adanya kemudahan komunikasi baik melalui telepon seluler maupun internet, pemilikan uang yang cukup dan kebutuhan, para TKI akan mencoba melakukan sesuatu yang mungkin tidak pernah dilakukan semasa di daerahnya, misalnya pergi ke mall, kafe, kelab malam, atau bertemu dengan orang asing yang akhirnya mereka terpengaruh gaya hidup dan perilaku negatif. Hasil uji klinik yang dilakukan oleh BP2TKI Jawa Tengah terhadap TKI yang pulang ke Indonesia menemukan sekitar 400 mantan TKI wanita terindikasi HIV/AIDS. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena di samping akan menularnya HIV/AIDS yang dideritanya, juga dikawatirkan uang yang diperolehnya tidak cukup untuk mengobati penyakit yang dideritanya.

Fakta sosial budaya lain yang harus diwaspadai terhadap pengiriman TKI ke luar negeri adalah pengiriman TKI yang berjenis

atau berakibat rusaknya hubungan perkawinan mereka (bercerai).

h. Analisis Gatra Pertahanan dan Keamanan

Keamanan nasional saat ini dalam kondisi mantap. Namun kondisi keamanan nasional masih menghadapi berbagai masalah, antara lain (1) terorisme, (2) gerakan separatis bersenjata, (3) dan konflik sosial/etnik/agama. Terorisme adalah ancaman serius bagi keamanan nasional karena Indonesia telah menjadi sasaran terorisme internasional. Oleh karena itu penanganan masalah terorisme harus dipikirkan dan dilaksanakan secara serius. Begitu pula masalah separatisme harus juga ditangani dengan bijaksana agar pengalaman pahit di masa lalu dengan lepasnya Timor Timur dari Indonesia tidak terulang lagi. Aceh dan Papua adalah dua daerah yang rentan terhadap gerakan separatisme, dan karena itu kedua daerah itu harus selalu menjadi perhatian penting bagi pemerintah Indonesia.

Konflik sosial/etnik masih sering terjadi, baik yang bermotif ekonomi, sosial, atau agama. Khusus dalam kaitannya dengan pengiriman TKI ke luar negeri harus diwaspadai jangan sampai



para TKI yang bekerja di luar negeri terbuju rayu sehingga bergabung dengan kelompok teroris, separatis, atau jaringan narkoba baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Kesimpulan

a. TKI yang bekerja di luar negeri sangat penting untuk mengurangi pengangguran yang masih banyak dan belum dapat diserap oleh keterbatasan pekerjaan di Indonesia. Secara ekonomi TKI yang bekerja di luar negeri telah menghasilkan devisa bagi negara dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para TKI dan masyarakat sekitarnya. Selain itu TKI yang bekerja di luar negeri juga menjadi duta bangsa untuk mengenalkan Indonesia di luar negeri. Namun pengiriman TKI ke luar negeri harus tetap menjaga harga diri dan martabat bangsa Indonesia. Oleh karena itu diperlukan “grand design” pengelolaan TKI yang dituangkan dalam bentuk regulasi dan dilaksanakan secara konsekuen dan berkelanjutan agar manfaat dan keuntungan dapat ditingkatkan sekaligus meminimalkan masalah dan dampak yang timbul dari pengiriman TKI ke luar negeri.

b. Pengelolaan TKI yang dilakukan oleh pemerintah saat ini belum efektif dan efisien, terutama karena masih adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga pemerintah dan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan pengiriman TKI ke luar negeri. Saat ini ada 18 instansi pemerintah yang menangani TKI. Berbagai instansi pemerintah itu bekerja berdasar tupoksi masing-masing dengan payung hukum yang berbeda-beda. Pada ranah regulasi dan operasi dualisme penanganan TKI oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menimbulkan berbagai masalah pada tataran implementasi terutama di daerah. Oleh karena itu diharapkan pemerintah segera menyelesaikan dualisme itu agar pengelolaan TKI lebih baik di masa mendatang.

c. Berbagai masalah yang berkaitan dengan TKI yang bekerja di luar negeri merupakan akumulasi dari kelemahan dan masalah dari pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang berkaitan dengan TKI, yaitu



- pemerintah sebagai regulator dan operator, PPTKIS sebagai mitra pemerintah, pemakai jasa TKI di luar negeri, dan para TKI itu sendiri. Berbagai kelemahan dan masalah yang ada pada seluruh pemangku kepentingan TKI bermuara pada munculnya masalah yang akan dialami oleh para TKI, sebaliknya keberhasilan pengelolaan TKI akan menimbulkan keuntungan dan kemudahan bagi para TKI. TKI harus menjadi subjek untuk dibantu dan difasilitasi, dan TKI bukan objek bagi orang atau pihak lain untuk memperoleh keuntungan atau uang karena TKI menghasilkan uang atau devisa bagi negara. Penyelesaian masalah TKI juga harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan TKI.
- d. Masalah-masalah yang dihadapi TKI yang bekerja di luar negeri dari tahun ke tahun tidak mengalami penurunan bahkan cenderung meningkat. Secara umum masalah TKI di luar negeri adalah:
 - 1) Dokumen tidak lengkap (2.87%)
 - 2) Gaji tidak dibayar (4.17%)
 - 3) Kecelakaan kerja (1.67%)
 - 4) Komunikasi tidak lancar (1.03%)
 - 5) Majikan bermasalah (20.43%)
 - 6) Majikan meninggal dunia (1.42%)
 - 7) Membawa anak (0.78%)
 - 8) Pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian kerja (1.70%)
 - 9) Pelecehan seksual (5.28%)
 - 10) Penganiayaan (5.55%)
 - 11) PHK sepihak (22.91%)
 - 12) Sakit akibat kerja (17.53), depresi (1.16%)
 - 13) Sakit bawaan (4.80%)
 - 14) Tidak mampu bekerja (0.98%)
 - 15) TKI hamil (1.14%)
 - 16) Tanpa keterangan (tidak diisi keterangan apapun) (2.51%)
 - e. Dari tahun ke tahun terjadi peningkatan tindak kekerasan dan ancaman hukuman (mati) kepada TKI yang bekerja di luar negeri. Oleh karena itu pemerintah diharapkan semakin meningkatkan perlindungan kepada TKI yang bekerja di luar negeri. Perlindungan kepada TKI hendaknya juga diberikan pada waktu TKI pulang ke Indonesia, baik karena telah menyelesaikan kontrak kerja atau berlibur ke Indonesia. Jangan sampai TKI yang dianggap sebagai pahlawan devisa justru mendapat perlakuan tidak baik (apalagi mengalami pemerasan) pada waktu tiba di bandara atau dalam perjalanan menuju kampung halaman. Pemerintah pusat atau daerah harus menjamin keselamatan dan keamanan TKI dari perlakuan yang tidak baik dan pemerasan oleh oknum dan pihak-pihak tertentu hingga sampai di kampung halaman.
 - f. Masih adanya TKI ilegal dan berbagai masalah, tindak kekerasan, dan ancaman hukuman (mati) kepada TKI yang bekerja di luar negeri menunjukkan belum optimalnya manajemen pengiriman TKI ke luar negeri. Oleh karena itu optimalisasi tugas dan fungsi lembaga pemerintah yang menangani pengiriman TKI ke luar negeri dan PPTKIS harus di tingkatkan. Perwakilan pemerintah Indonesia di negara-negara tempat TKI bekerja di luar negeri harus melaksanakan kegiatan untuk menyambut kedatangan dan memberikan orientasi sebelum para TKI melaksanakan tugas. Selama para TKI melaksanakan tugas perwakilan Indonesia harus selalu memantau agar jika ada masalah dapat segera dibantu penyelesaiannya. Begitu pula pada saat para TKI akan mengakhiri kontrak dan kembali ke tanah air perwakilan Indonesia di luar negeri memberi penjelasan agar perjalanan mereka lancar dan sampai tujuan dengan selamat.
 - g. Pemerintah sebaiknya mengurangi pengiriman TKI ke luar negeri yang bekerja di sektor informal, khususnya pembantu rumah tangga, dan meningkatkan pengiriman TKI sektor formal atau setengah formal. TKI sektor informal, khususnya pembantu rumah tangga yang berpendidikan SD atau tidak tamat SD sebaiknya bekerja di dalam negeri. Perbaikan ekonomi Indonesia yang ditandai oleh munculnya kelas menengah Indonesia diharapkan dapat menyerap angkatan kerja informal, khususnya pembantu rumah tangga, sehingga mereka tidak perlu bekerja ke luar negeri. Untuk itu diperlukan regulasi yang mengatur hak dan kewajiban pekerja informal khususnya



pembantu rumah tangga. Dengan regulasi itu pembantu rumah tangga akan dihargai seperti halnya profesi atau pekerjaan lainnya yang mempunyai standar gaji, waktu kerja, dan kontrak kerja yang dilindungi dan dijamin oleh pemerintah.

- h. Pemerintah sebaiknya mengutamakan pengiriman TKI ke luar negeri yang berjenis laki-laki dan mengurangi tenaga kerja wanita karena wanita adalah pengatur internal rumah tangga dan tumpuhan kasih sayang bagi anak-anaknya. Perkembangan anak akan mengalami ketidaksempurnaan bila tidak mendapat kasih sayang ibunya. Remaja yang kehilangan kasih sayang ibunya akan cenderung asosial bahkan tidak sedikit yang mengekspresikan kegalauannya melalui tawuran, narkoba, dan perilaku kriminal lainnya. Di dunia ini selain Indonesia dan Philipina tidak ada lagi negara yang mengirim wanita yang mempunyai anak yang seharusnya merawat anak-anaknya yang masih kecil-kecil di rumah bekerja ke luar negeri secara masif dan dalam jangka waktu yang lama. Apabila kondisi ini tidak segera dibenahi dikhawatirkan akan muncul generasi yang tumbuh tanpa kasih sayang ibunya dan kemudian akan menjadi generasi yang hilang (lost generation).

4. Rekomendasi

Menyikapi berbagai hal sebagaimana diuraikan di atas, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat diambil pemerintah dalam upaya menciptakan Sistem dan Mekanisme Pelaksanaan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri Guna Menjaga Harkat dan Martabat Bangsa Dalam Rangka Ketahanan Nasional, yaitu:

- a. Dualisme pengelolaan TKI ke luar negeri oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) segera diakhiri dengan menempatkan kedua instansi dalam satu atap. Untuk memudahkan koordinasi, evaluasi, dan pengawasan sebaiknya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) diintegrasikan ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi unit kerja setingkat eselon I yang diberi otoritas untuk mengelola pengiriman dan perlindungan TKI ke luar negeri.
- b. Pengiriman TKI ke luar negeri khususnya pembantu rumah tangga dikurangi dan diharapkan 5 tahun ke depan Indonesia tidak lagi mengirim pembantu rumah tangga ke luar negeri. Untuk menampung pembantu rumah tangga agar dapat bekerja di dalam negeri diperlukan undang-undang yang mengatur tenaga kerja informal, khususnya pembantu rumah tangga, agar pembantu rumah tangga diakui sebagai pekerjaan dengan hak dan kewajiban (gaji, masa kerja, THR, libur/cuti, dll) yang diatur dan dilindungi oleh pemerintah melalui undang-undang. Sementara itu segera disiapkan TKI yang berpendidikan minimal Sekolah Menengah Atas yang memiliki keterampilan dalam bidang tertentu dan siap mengisi lowongan pekerjaan di luar negeri. TKI profesional ini sangat diperlukan untuk membangun diaspora Indonesia di seluruh dunia yang diharapkan tetap berkomitmen untuk membangun Indonesia di masa mendatang.
- c. Dengan mempertimbangkan nilai strategis TKI di luar negeri, baik sebagai penghasil devisa, mengurangi penangguran, dan menjadi duta Indonesia di luar negeri diperlukan komitmen pemerintah untuk bersungguh-sungguh mengelola pengiriman dan perlindungan TKI ke luar negeri. Dalam hal ini diperlukan adanya “grand design” yang mencakup regulasi yang komprehensif, lembaga pelaksana yang bersih, transparan, dan akuntabel serta didukung oleh adanya sumber daya manusia yang cerdas, kreatif, dan jujur.
- d. Pengiriman TKI ke luar negeri hanya dilakukan ke negara yang bersedia menandatangani MoU dengan memasukkan ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban TKI dan perlindungan selama TKI bekerja di negara pengguna TKI. Pemerintah Indonesia harus menghentikan pengiriman TKI ke negara lain yang tidak didasari MoU antar pemerintah dan melakukan moratorium pengiriman TKI ke negara tertentu sampai adanya kesediaan



- negara pengguna jasa TKI menandatangani Mou dengan pemerintah Indonesia.
- e. Pemerintah Indonesia harus melakukan usaha maksimal untuk melindungi TKI dari tindakan kekerasan dan ancaman hukuman (mati) dengan membentuk satuan tugas yang bersifat permanen dan mempunyai kewenangan penuh menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh TKI.
 - f. Pemerintah harus memberi perlakuan dan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada para TKI yang pulang ke Indonesia agar mereka terbebas dari perlakuan tidak baik dan pemerasan. Oknum yang melakukan pemerasan terhadap TKI yang pulang ke Indonesia harus ditindak dengan tegas. TKI yang akan pulang ke Indonesia sebaiknya diberi kebebasan untuk melakukan perjalanan seperti halnya warga negara Indonesia lainnya yang akan pulang dari luar negeri, dan dianjurkan mereka memilih penerbangan langsung menuju kota asalnya.
 - g. Secara empirik, pemerintah dapat melakukan berbagai langkah kebijakan yang strategis, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sebagai berikut :
 - 1) Langkah Kebijakan Strategis Jangka Pendek :
 - a) Menyusun Peraturan Pemerintah (PP) sebagai penjabaran dari UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI atau hasil revisi dari UU No. 39 Tahun 2004 tersebut.
 - b) Memetakan dan menuntaskan tugas, fungsi dan wewenang dari setiap kementerian/lembaga dalam menangani persoalan TKI dari hulu sampai hilir, sehingga tidak ada tumpang tindih kebijakan.
 - c) Memetakan kebutuhan tenaga kerja dari tiap-tiap negara penerima TKI, sehingga kualifikasi keterampilan kerja (skill), sikap kerja (attitude) dan pengetahuan (knowledge) para TKI dapat disesuaikan.
 - d) Memetakan dan menghentikan pengiriman TKI ke negara-negara yang tidak mentaati peraturan International Labour Organization (ILO) dan atau yang tidak memiliki aturan hukum yang berpihak terhadap para TKI.
 - e) Menyusun regulasi yang mengatur tentang:
 - (1) Peran dan tanggungjawab pemerintah dan pihak swasta/ PPTKIS,
 - (2) Standarisasi/sertifikasi dari pemerintah terhadap PPTKIS,
 - (3) Pengendalian pasar tenaga kerja melalui regulasi dan standarisasi (sertifikasi TKI dan PPTKIS),



- (4) Penyempurnaan sistem pelatihan dan sertifikasi para calon TKI/TKI tentang pengetahuan, keterampilan kerja dan sikap kerja menuju kepada Kompetensi Profesi, sehingga TKI memiliki daya saing tinggi.
 - (5) Penyelenggaraan Asuransi TKI yang jelas dan memihak pada TKI,
 - (6) Kebijakan yang komprehensif guna menjaga dan meningkatkan nasionalisme para TKI termasuk bagi kelompok high skill (ekspatriat), untuk dapat berperan sebagai agent bahkan menjadi aset bagi bangsa Indonesia di luar negeri.
- f) Membuat program pemberdayaan purna penempatan TKI, secara terpadu dan menyeluruh dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait serta menempatkan pemerintah daerah sebagai penanggungjawab (leading sector)
 - g) Membangun sistem database yang terpadu antar kementerian/lembaga terkait, dengan menjadikan Pemerintah Daerah sebagai data mining dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai pusat pengendali.
 - h) Membentuk Tim Kecil guna memformulasikan berbagai hasil kajian dari kementerian/lembaga (Kemenakertrans, BNP2TKI, Satgas Perlindungan TKI, Kemenlu, Bappenas, Lemhannas, dan lain sebagainya/dsb), sehingga didapatkan formulasi kebijakan yang komprehensif, holistik dan strategik.
 - i) Meniadakan dualisme kewenangan dalam menangani TKI yaitu Kemenakertrans dan BNP2TKI yang mengakibatkan tumpang tindihnya kebijakan dan peraturan sehingga menyulitkan KBRI. Disarankan supaya BNP2TKI di bawah Kemenakertrans.
 - j) Peningkatan kualitas TKI yang dikirim ke luar negeri melalui pembekalan dan pelatihan bahasa Inggris atau bahasa tempat negara penempatan, guna memperlancar komunikasi.
- k) Peningkatan pengamanan kepada TKI yang pulang ke Indonesia, baik pengamanan dalam hal keamanan individual maupun pengamanan terhadap virus/penyakit yang dibawa dari negara tempat bekerja.
 - l) Peningkatan perlindungan terhadap TKI, melalui pemenuhan terhadap hak-haknya, termasuk pemberian asuransi yang selama ini sulit untuk didapatkan oleh para TKI.
- 2) Langkah Kebijakan Strategis Jangka Menengah dan Jangka Panjang
 - a) Mengoptimalkan hubungan bilateral atau multilateral dalam pengelolaan TKI melalui promosi dan diplomasi kultural di negara-negara tujuan TKI.
 - b) Peningkatan *bargaining power* pemerintah dalam berdiplomasi dengan pemerintah di negara-negara tempat tujuan TKI.
 - c) Penguatan kendali wilayah-wilayah perbatasan guna mengantisipasi praktik TKI ilegal.
 - d) Peningkatan kepedulian dan keberpihakan dalam pelayanan dan perlindungan TKI, dengan memandang para TKI sebagai aset dan representasi bangsa.
 - e) Meningkatkan komitmen anggaran dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan para TKI.
 - f) Peningkatan kualitas para TKI merujuk pada standarisasi internasional.



Grand Design Pelaksanaan TKI ke Luar Negeri guna Menjaga Harkat dan Martabat Bangsa dalam rangka Ketahanan Nasional

Focus Group Discussion (FGD)

- Kamis, 7 Juni 2012
- Pembicara :
 1. Guru Besar UGM, Prof. Dr. Irwan Abdullah
 2. Peneliti Utama Manajemen SDM Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Drs. Fajri, MM
 3. Kabid Litbang Pelatihan dan Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Drs. Hengky, M.Sc

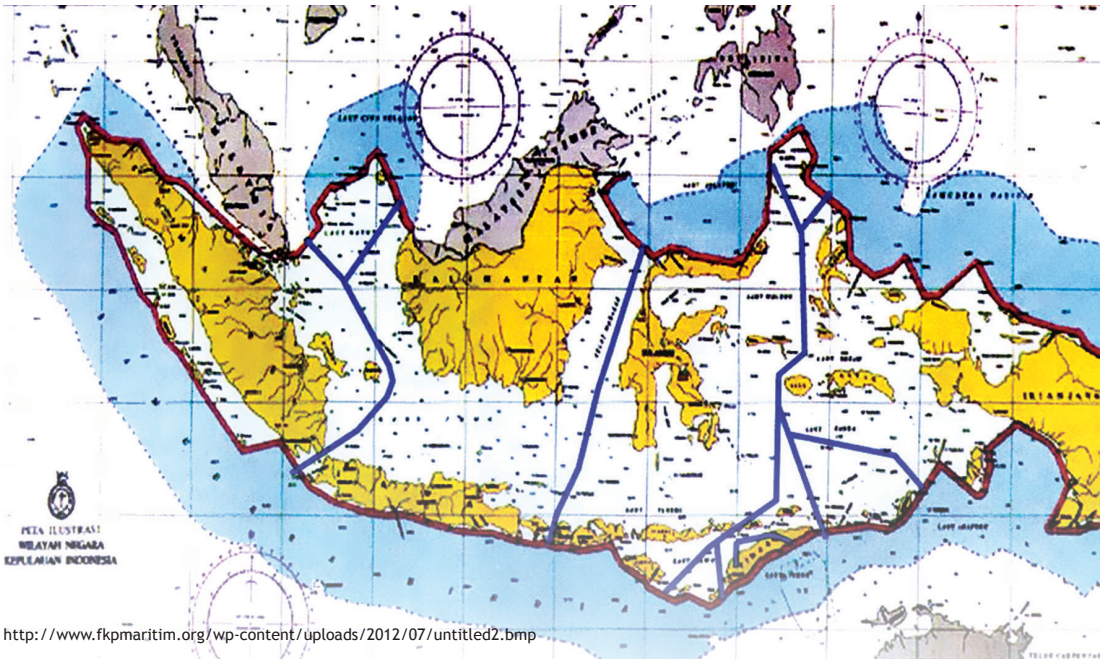
Roundtable Discussion (RTD)

- Senin -Selasa, 6 - 7 Agustus 2012
- Pembicara :
 1. Kepala BNPT2TKI Djumhur Hidayat
 2. Kapuslitbang Kemenakertrans Roostyawati, SH, M.Sc
 3. Dosen Unsud Peneliti tentang TKI Universitas Soedirman Dr. Tyas Retno Wulan
 4. LSM (*Migrant Care*) Wahyu Susilo.

Penanggap :

1. Sekretaris Utama Lemhannas RI
Drs. H. Chandra Manan Mangan, M.Sc
2. Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Ketahanan Nasional Lemhannas RI Mayjen TNI I Gusti Putu Buana, S.AP, M.Sc.
3. Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Demografi Lemhannas RI Dr. Ratna Azahari, M.P.A
4. Tenaga Profesional Bidang Demografi Lemhannas RI Ir. Tjepi Firmantoro Alowie, M.Sc.
5. Tenaga Ahli Pengajar Bidang Hubungan Internasional Lemhannas RI Mayjen TNI Avianto Saptono.
6. Tenaga Profesional Bidang Hubungan Internasional Lemhannas RI Ir. Timotius D. Harsono

**Tim Penyusun : Direktorat Pengkajian
Bidang Internasional**



Penataan Pengamanan Wilayah Maritim guna Memelihara Stabilitas Keamanan dalam Rangka Menjaga Kedaulatan NKRI Tahun 2012

1. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat telah mengamanatkan, bahwa pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pengamanan, termasuk wilayah maritim, harus senantiasa diselenggarakan secara terencana, terkoordinasi dan terpadu dengan menggunakan pendekatan keamanan dan kesejahteraan secara seimbang.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan Negara Kepulauan (*Archipelagic State*) terbesar di dunia, memiliki 17.499 pulau, dengan luas perairan lautnya mencapai 5,8 juta km² dan garis pantai sepanjang ± 81.000 km¹. Sebagai negara kepulauan yang sering disebut zamrud di khatulistiwa, memiliki konfigurasi unik dan sekaligus amat menantang di samping mempunyai posisi silang yang strategis antar

dua benua dan dua Samudera, sehingga dengan posisi geografis demikian menyebabkan laut wilayah Indonesia menjadi alur laut yang sangat penting bagi lalu lintas pelayaran nasional maupun internasional dan kondisi tersebut menempatkan Indonesia pada kedudukan dan peranan yang penting dalam hubungan dengan dunia internasional sebagai *centre of gravity* kawasan Asia Pasifik. Posisi ini memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap pengaruh dari luar karena terbukanya dan tersebarnya wilayah-wilayah Indonesia yang mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan yang dapat menggoyahkan keutuhan NKRI. Dengan posisi geografis Indonesia yang strategis, banyak pihak-pihak tertentu yang melakukan kegiatan di wilayah maritim Indonesia yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan baik secara nasional, maupun internasional yang dapat digolongkan dalam bentuk ancaman sebagai berikut :

¹ Naskah Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Soeparno pada acara Roundtable Discussion (RTD) "Pengamanan Wilayah Maritim dan Permasalahannya", Lemhannas RI 29-30 Mei 2012.



- a. Ancaman kekerasan (*violence threat*), yaitu ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata terorganisasi, antara lain : pembajakan, perampokan, aksi teror, sabotase.
- b. Ancaman terhadap sumber daya laut (*natural resources tribulation*), berupa pencemaran merusak ekosistem laut dan konflik pengelolaan sumber daya laut yang dipolisasi dan diikuti dengan penggelaran kekuatan militer.
- c. Ancaman pelanggaran hukum (*low transgression threat*), yaitu tidak dipatuhinya hukum nasional maupun internasional yang berlaku di perairan antara lain *illegal logging*, *illegal fishing*, penyelundupan.
- d. Ancaman navigasi (*navigation hazard*) yaitu ancaman yang ditimbulkan oleh kondisi geografis maritim dan hidrografi secara kurang memadai sarana bantu navigasi, sehingga dapat membahayakan keselamatan pelayaran.

Sebenarnya sudah ada Badan yang menangani pengamanan laut sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 Tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Namun Badan ini hanya bersifat koordinasi bagi instansi yang menangani permasalahan perairan sebagaimana yang diuraikan pada Pasal 2, 3 dan 4, yang intinya adalah bahwa Bakorkamla merupakan lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sebagai lembaga koordinasi, maka Bakorkamla hanya bertugas sebatas pengkoordinasian menyangkut tugas-tugas penegakan hukum yang tercakup dalam kewenangan instansi-instansi yang tercakup dalam perundang-undangan masing-masing dan tidak memiliki otoritas memaksa, sehingga pelaksanaan pengamanan wilayah maritim memiliki berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Seperti contoh, Bakorkamla sudah merencanakan patroli laut secara gabungan, tetapi sering tidak dapat terlaksana akibat kurangnya dukungan dari institusi terkait, terutama dalam pengoperasian kapal patroli. Saat ini ada dua belas instansi yang menyelenggarakan pengamanan di laut, yaitu:



<http://www.bakorkamla.go.id/images/stories/logobakor.jpg>

Kemenlu, Kemendagri, Kemhan, Kemenkum dan HAM, Kemenkeu, Kemenhub, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung, Mabes TNI, Polri, BIN, dan Mabesal, dengan didukung oleh produk undang-undang yang sebagian isinya hampir bersinggungan atau tumpang tindih, penyelenggaraan operasi keamanan di laut masih bersifat sektoral oleh masing-masing institusi penegak hukum di laut sesuai Kodalnya, sehingga dalam pelaksanaan operasi di laut sering terjadi benturan dalam kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pada wilayah/sektor yang sama, banyaknya institusi yang melakukan operasi penegakan hukum di laut pada waktu dan wilayah yang sama, sehingga tidak efektif dan efisien.

2. Pokok Permasalahan

Permasalahan yang dapat diidentifikasi terkait dengan keterbatasan kesiapan dan kemampuan pengamanan wilayah maritim selama ini lebih disebabkan oleh berbagai hal antara lain, wilayah maritim nasional cukup luas, juga faktor kebijakan, produk hukum yang mendukung, organisasi yang melaksanakan pelaksanaan operasi keamanan di laut, serta kesiapan sarana dan prasarana pengamanan wilayah maritim. Oleh sebab itu, yang menjadi pokok masalah dalam tulisan ini adalah: Apa yang menyebabkan belum maksimalnya

pengamanan wilayah maritim saat ini. Dengan pokok persoalan sebagai berikut:

- Bagaimana kebijakan dan strategi pengamanan wilayah maritim saat ini.
- Bagaimana aturan Perundang-Undangan dari dua belas institusi yang melaksanakan pengelolaan dan pengamanan wilayah maritim.

- Bagaimana pelaksanaan operasional pengamanan di wilayah maritim yang dilaksanakan Bakorkamla dan instansi terkait.
- Sejauh mana dukungan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam pengamanan wilayah maritim.

3. Data Dan Fakta

a. Data

1) Aturan perundangan dalam pengamanan maritim

JENIS TINDAK PIDANA	INSTANSI	TNIAL	POLRI	PPNS BEA CUKAI	PPNS HUBLA	PPNS DKP	PPNS IMIGRASI	PPNS LN	PPNS PKA/ HUTAN	PPNS DEPHUB	PPNS KES	PPNS SDM	BAKOR KAMLA
TINDAK PIDANA DALAM TZMKO		•		•	•								
TZMKO/1939 PSL 14 PEROMPAKAN, DLL		•	•										
UU No. 12/ 1951, HANDAK & SENPI			•										
UU No. 5/ 1983 ZEEI		•											
UU No. 5/ 1990 KSDA		•	•						•				
UU No. 11/ 2011 BCB						•				•			
UU No. 9/ 1992 IMIGRASI			•				•						
UU No. 5/ 1997 PSIKOTROPIKA			•								•		
UU No. 22/ 1997 NARKOTIKA			•								•		
UU No. 32/ 2009 LH			•					•					
UU No. 41/ 1999 KEHUTANAN			•						•				
UU No. 17/ 2006 KEPABEANAN				•									
UU No. 15/ 2003 TERORISME		•	•										
UU No. 31/ 2004, direvisi dgn UU No. 45/ 2009 PERIKANAN		•	•			•							
UU No. 17/ 2008 PELAYARAN		•	•		•								
TINDAK PIDANA WILAYAH NEGARA		•	•										
UU. No. 4/ 2009 PERTAMBANGAN MINERAL & BATUBARA												•	

Sumber: Pengamanan wilayah maritim dan permasalahannya (Waasops Kasal, RTD di Lemhannas, 29 Mei 2012).

2) Data pelanggaran kedaulatan wilayah laut dan penangkapan kapal ikan *illegal* asing.

Jenis Pelanggaran	Tahun			
	2009	2010	2011	2012
1. Pelanggaran Kedaulatan	27	45	27	17
2. Penangkapan kapal ikan asing	167	183	73	159
3. Pelanggaran Hukum Laut (Penyelundupan, <i>Illegal</i> , <i>Logging</i> , <i>Fishing</i> , <i>Minning</i> , DLL)	896	672	605	482

Sumber: Data Paparan RTD Lemhannas RI



3) Sarana dan prasarana pendukung keamanan laut



Dalam upaya mengantisipasi jumlah kapal patroli yg terbatas, pada tahun 2000, telah dikembangkan *Monitoring Surveillance System* di berbagai instansi penegak keamanan di laut - manfaatnya belum signifikan

Sumber: Pengamanan wilayah maritim dan permasalahannya (Waasops Kasal, RTD di Lemhannas, 29 Mei 2012).

b. Fakta

- 1) Pada tanggal 10 Pebruari 2012, Kepala Pelaksana harian Bakorkamla, Laksamana Madya Didik Heru Purnomo menyampaikan pengarahan pada rapat koordinasi terbatas satuan tugas Bakorkamla di Batam, kepulauan Riau dengan pokok arahan sebagai berikut :
 - (a) Secara kualitas tindakan kejahatan dan pelanggaran hukum di laut selama beberapa tahun terakhir meningkat, terutama pencurian ikan.
 - (b) Pengamanan laut yang dilaksanakan belum memadai. Hal ini disebabkan sarana pengamanan laut dan anggaran masih terbatas dibandingkan dengan luas laut yang harus dipatroli, serta koordinasi antar lembaga yang memiliki kewenangan di laut masih lemah.
- 2) Pada tanggal 5 Juni 2012 Kepala pelaksana harian Bakorkamla Laksamana Madya Didik Heru Purnomo di Batam menyatakan, bahwa ada dua belas

institusi terkait dalam pengamanan laut yang tumpang tindih kewenangannya memiliki fungsi masing-masing yang cenderung melakukan secara sektoral. Beliau mengatakan Bakorkamla kerap menerima penolakan dari institusi tertentu saat diajak patroli laut dengan beragam alasan.

- 3) Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron, mengatakan jebolnya keuangan negara tidak hanya diakibatkan tindak pidana korupsi, melainkan juga kejahatan ekonomi yang salah satunya adalah pencurian ikan yang dilakukan para nelayan asing. Tidak cukup sampai di situ, praktik-praktik *illegal fishing* yang dilakukan para nelayan asing telah merusak hutan bakau seperti di kawasan pesisir pantai Selat Makasar. Ini sangat berbahaya, karena bisa menimbulkan abrasi. Tak hanya ikan yang dikuras habis, para nelayan asing juga sering menyedot pasir-pasir laut dengan alat-alat berat. Jadi tidak hanya ikannya yang dicuri, lautnya pun dirusak. Kalau



dibiarkan akan menghancurkan laut dan pastinya semakin banyak kerugian negara. Selama ini pemerintah terlalu mengandalkan kekuatan pengawasan laut dari KKP dan TNI AL, padahal jika dibandingkan dengan luas wilayah laut Indonesia, kapal patroli yang dimiliki pemerintah masih jauh dari cukup untuk bisa mengawasi seluruh lautan Indonesia. (Sumber : Rakyat Merdeka, tgl 2 Mei 2012).

- 4) Pada tanggal 23 April 2012, Ketua Umum Indonesia *National Shipowners' Association* (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, pembentukan badan *Sea and Coast Guard* sesuai amanat Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran tidak mudah untuk dibentuk selama ego sektoral masih muncul dan biaya yang timbul akibat tumpang tindih kewenangan penjagaan laut dan pantai sangat besar.
- 5) Dalam tiga tahun terakhir, mulai tahun 2008 Kementerian Perhubungan memasang radar-radar pemantau atau *Vessel Traffic Identification System* (VTIS) di tiga selat utama Indonesia, yakni Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Selat Sunda ada 2 VTIS, Selat Lombok dipasang 2 VTIS, dan 22 unit khusus dipasang di sepanjang Selat Malaka, mulai dari Sabang sampai Pulau Karimata, Bangka Belitung. Demikian pula TNI AL memasang stasiun radar di sembilan lokasi yang rawan pembajakan di Selat Malaka untuk memonitor kapal dan memperkuat keamanan di jalur sibuk tersebut. Dari dua fakta ini terlihat adanya tumpang tindih implementasi stasiun radar pemantau di sepanjang Selat Malaka dan terjadi keruwetan dan kemubaziran. Hal ini bermuara pada tidak adanya koordinasi yang harmonis antar institusi kelautan nasional di lapangan.

4. Analisa Dan Upaya

Saat ini, pengamanan wilayah maritim belum dapat dilaksanakan secara baik. Dua belas institusi yang menangani pengelolaan pengamanan wilayah maritim cenderung melakukan sendiri-sendiri. Bakorkamla yang

dibentuk untuk mewadahi dan menjawab berbagai persoalan hanya bersifat koordinasi yang tidak memiliki otoritas memaksa, sehingga sering menimbulkan masalah. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pengamanan wilayah maritim dan berbagai kendala, maka perlu analisis mendalam, sehingga upaya yang akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi permasalahannya.

a. Analisa Strategik

1) Aspek Geografi

Mengingat luas wilayah Indonesia bahwa 2/3 darinya merupakan wilayah lautan yang selengkapnya dapat dirinci sebagai berikut.

Luas Wilayah termasuk ZEE	: Sekitar 7,69 juta km ²
Wilayah Daratan	: Sekitar 2.027.257 km ²
Wilayah Lautan	: Sekitar 3.165.993 km ²
Wilayah ZEE	: Sekitar 2.506.750 km ²

Berdasarkan rincian wilayah tersebut dan memperhatikan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menyatakan bahwa Pertahanan Negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Atas dasar tersebut seyogyanya negara Indonesia lebih memprioritaskan pengamanan wilayah maritim. Hal ini menjadi sangat penting dan strategis mengingat bahwa frekuensi ancaman lebih tinggi di wilayah lautan, sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian data dan fakta.

Selain itu, wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Philipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini (PNG). Dengan kondisi geografis yang demikian, mengakibatkan banyaknya pintu-pintu masuk yang saat ini belum secara optimal dapat dilakukan pengawasan untuk mewaspadaai segala bentuk ancaman. Dengan kondisi geografis tersebut, dihadapkan dengan ancaman terhadap kedaulatan, pencurian sumber daya alam di laut dan kegiatan *illegal* lain yang melanggar Undang-Undang,



diperlukan tingkat pengamanan yang terintegrasi mencakup seluruh wilayah maritim Indonesia.

2) Aspek Demografi

Dengan jumlah penduduk sebesar 237,6 juta jiwa hasil sensus penduduk tahun 2010, dan laju pertumbuhan 1,49 persen per tahun membuat Indonesia sebagai negara berpenduduk terbanyak keempat setelah RRC, India dan Amerika Serikat. Penyebaran penduduk yang tidak terencana dengan baik, jelas berpengaruh terhadap kualitas penduduk (SDM) dan lapangan pekerjaan.

Penyebaran penduduk Indonesia yang tidak merata, di mana 58 % berada di Pulau Jawa dengan tingkat kepadatan rata-rata 124 orang/km dengan jumlah penduduk pantai/nelayan sebanyak 7,87 juta jiwa yang rata-rata berpenduduk miskin. Para nelayan Indonesia rata-rata belum mampu memanfaatkan sumber daya hayati laut secara maksimal, karena tingkat pendidikan yang masih rendah dan miskin, sebaliknya para nelayan asing melakukan pencurian di Laut Indonesia, bahkan masyarakat nelayan dimanfaatkan oleh kelompok yang melakukan tindakan *illegal* di wilayah Indonesia. Oleh sebab itu penduduk nelayan harus diajak berpartisipasi untuk ikut dalam menjaga wilayah Laut Indonesia.

3) Aspek Sumber Kekayaan Alam

Secara regional perebutan sumber kekayaan alam pada umumnya terjadi di wilayah perbatasan antar negara, yang bagi negara tertentu diawali dengan pelaksanaan pembangunan, baik fisik maupun nonfisik, yang lambat laun melakukan klaim (*overclaiming*) terhadap wilayah tersebut. Keberanian negara tertentu untuk melakukan *overclaiming* tersebut tentu didasarkan pada pertimbangan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang dimilikinya, yang menurut perkiraan mereka bahwa kemampuan pertahanan negara yang mereka miliki lebih tangguh dibandingkan dengan negara sasarannya. Selain hal tersebut juga dibarengi dengan kemampuan diplomasi di tingkat internasional.

Dengan posisi geografis Indonesia yang strategis, banyak pihak-pihak tertentu yang melakukan kegiatan di wilayah maritim Indonesia yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan baik secara nasional, maupun internasional yang dapat digolongkan dalam bentuk ancaman

Dengan posisi geografi Indonesia yang sangat strategis, di mana Indonesia memiliki sumber kekayaan alam di laut yang besar, apabila dikelola dengan baik akan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa sumber kekayaan alam yang ada tidak terkelola dengan baik dan banyak terjadi pencurian oleh pihak asing antara lain *illegal fishing* di wilayah laut Indonesia terus meningkat dengan total kerugian sekitar US\$2 milyar atau sekitar Rp. 18 triliun per tahun; dari penyelundupan dengan kerugian sekitar US\$1 milyar per tahun; eksploitasi pasir (*illegal mining*) dengan kerugian sekitar lebih dari Rp. 2 triliun per tahun serta *illegal logging* dengan kerugian sekitar Rp. 30 triliun, demikian juga dengan kegiatan *illegal* yang lainnya yang sangat merugikan negara.

4) Aspek Ideologi

Berdasarkan spektrum ancaman di wilayah maritim ditinjau dari segi aspek ideologi adalah menurunnya nilai-nilai kebangsaan, kondisi ini tentu sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan sistem pengamanan wilayah maritim, karena modal utama dari pelaksanaan sistem tersebut adalah semangat kebangsaan dan rasa nasionalisme yang



tinggi, serta kesadaran setiap warga negara untuk melaksanakan hak dan kewajibannya untuk ikut serta dalam usaha keamanan wilayah laut. Oleh sebab itu, perlu melakukan pembinaan atau sosialisasi secara intensif nilai-nilai ideologi Pancasila yang di dalamnya telah meliputi wawasan kebangsaan.

Berkaitan hal tersebut di atas, untuk meningkatkan pengamanan wilayah maritim guna memelihara stabilitas keamanan dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI ditinjau dari segi aspek ideologi adalah kemauan dan kesadaran bersama untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Oleh sebab itu, ideologi Pancasila harus tetap dijadikan sebagai penuntun dalam menghadapi permasalahan atau ancaman terhadap bangsa dan negara, yang didasarkan pada kelima sila ideologi

Kelautan dan Perikanan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, Kepolisian RI mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian serta Kementerian Keuangan pada aturan Kepabean yang melaksanakan secara egosektoral masing-masing pada wilayah yang sama, hal ini, perlu disinkronkan sehingga tidak terjadi lagi saling bertabrakan kewenangan dalam pengamanan wilayah maritim.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, sudah mengamanatkan pembentukan *Sea & Coast Guard* di mana di dalam Undang-Undang tersebut mengamanatkan Pemerintah untuk menyelesaikan PP dalam waktu 3 tahun dari diundangkannya Undang-Undang tersebut pada Mei 2008 lalu. Namun sampai saat ini belum jelas

Saat ini ada dua belas instansi yang menyelenggarakan pengamanan di laut, yaitu: Kemenlu, Kemendagri, Kemhan, Kemenkum dan HAM, Kemenkeu, Kemenhub, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung, Mabes TNI, Polri, BIN, dan Mabesal, dengan didukung oleh produk undang-undang yang sebagian isinya hampir bersinggungan atau tumpang tindih

Pancasila yang telah merefleksikan atau mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, keharmonisan, keserasian dalam membina kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

5) Aspek Politik

Intervensi kepentingan kelompok tertentu atau golongan bahkan kepentingan partai politik, mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan begitu juga dalam pengamanan wilayah maritim.

Pengamanan wilayah maritim saat ini masih terkendala pada aturan perundang-undangan, terdapat 17 (tujuh belas) peraturan keamanan laut yang saling tumpang tindih, misalnya Kementerian Perhubungan berpegang pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, Kementerian

dan belum terealisasi. Di Negara-negara lain seperti Amerika Serikat, China, Singapura, Taiwan, Jepang dan lain-lain juga sudah melaksanakan yang namanya *Sea & Coast Guard* dan kalau di Amerika Serikat namanya *United States Coast Guard*. Dalam hal ini, semua unsur yang mempunyai kewenangan di laut berkumpul di dalam satu kapal sehingga di situ harus ada Angkatan Laut, Polisi Air, Bea Cukai, Imigrasi dan lain-lain. Yang terjadi selama ini, masing-masing institusi mempunyai kewenangan sendiri-sendiri dengan adanya Undang-Undang yang dimiliki oleh masing-masing institusi tersebut. Dengan bertindak sendiri-sendiri, menjadikan biaya tinggi/*high cost* dan juga terkesan terlalu banyak orang yang menguasai laut, tetapi apabila bergabung dalam satu wadah, maka akan lebih efisien dan menjadi kuat,



armada pengawasan juga akan kuat, serta dari segi efisiensi pengamanan juga kuat.

6) Aspek Ekonomi

Kurangnya kemampuan daya tangkal yang dimiliki Indonesia dalam pengamanan wilayah maritim, mengakibatkan negara telah mengalami kerugian bukan hanya dari segi ekonomi, tetapi telah terjadi ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Oleh sebab itu, menjadi urgen untuk segera melakukan penataan pengamanan wilayah maritim, bukan hanya untuk menjaga dan mengatasi ancaman kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, tetapi juga sekaligus untuk menjaga dan mengatasi segala bentuk kegiatan *illegal* terhadap sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang merupakan sumber perekonomian nasional.

Penataan pengamanan wilayah maritim juga sangat tergantung pada sarana dan prasarana terutama pada pengadaan kapal patroli, sementara kemampuan anggaran keuangan negara untuk pengadaan kapal patroli, hingga saat ini masih belum memadai, bahkan untuk memenuhi kebutuhan minimal juga belum terpenuhi. Dengan kondisi yang demikian tentu sangat mempengaruhi pelaksanaan pengamanan wilayah maritim.

Negara sudah berusaha meningkatkan anggaran pengamanan wilayah maritim secara bertahap tetapi akibat masih terbatasnya anggaran, maka sangat sulit untuk dapat meningkatkan pengamanan wilayah maritim untuk dijadikan sebagai daya tangkal terhadap setiap ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Oleh sebab itu, perlu dilakukan langkah-langkah baru (*think outside off the box*), yang selanjutnya ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan, antara lain seperti memadukan dukungan anggaran dari kementerian yang terkait untuk kepentingan pengamanan, pelibatan perbankan nasional dalam

program pembiayaan kapal-kapal patroli dengan cara *long term loan scheme*.

7) Aspek Sosial Budaya

Sikap dan pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa pengamanan wilayah maritim hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, hal ini merupakan suatu persepsi yang sangat keliru.

Nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme merupakan jati diri atau identitas suatu bangsa, oleh karenanya, pembinaan yang secara terus-menerus harus dilaksanakan seiring dengan perkembangan lingkungan strategis, dengan mempertimbangkan karakteristik budaya daerah setempat. Dengan demikian, *nation of character building* dapat terwujud dengan baik sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa untuk mencapai tujuan nasional, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pelaksanaan pengamanan wilayah maritim, ditinjau dari segi aspek budaya adalah perlu mengintensifkan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan dan mengimplementasikan secara berimbang antara hak dan kewajiban setiap warga negara, demikian juga hak dan kewajiban pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan keamanan wilayah. Dengan kondisi yang demikian akan semakin menguatnya *nation and character building*, yang akhirnya dapat mewujudkan stabilitas wilayah maritim.

8) Aspek Pertahanan dan Keamanan

Pembangunan sistem pertahanan negara tidak terlepas dari postur pertahanan negara, karena postur pertahanan negara merupakan penampilan kekuatan pertahanan negara yang tercermin dari keterpaduan kekuatan, kemampuan dan pengeluaran sumber daya nasional yang ditata dalam sistem pertahanan negara.

Pengembangan postur pertahanan negara didasarkan pada pengaruh perkembangan lingkungan strategis dan kemampuan nasional khususnya



terkait dengan anggaran pertahanan negara. Untuk mewujudkan postur pertahanan negara yang kuat dan kokoh (*capability based defence*) diperlukan pembangunan yang terintegrasi, baik dari segi pengembangan alutsista, peningkatan kualitas dan kuantitas personel pengemban fungsi pertahanan negara maupun penataan ruang kawasan pertahanan.

Berdasarkan hal tersebut, maka

Pemerintah dan institusi pelaku keamanan di laut, perlu mengembangkan sistem surveillance yang memadai, serta terintegrasi secara baik antara unsur-unsur pelaksana di lapangan, pusat komando dan pengendalian yang mencakup seluruh wilayah perairan Indonesia dengan melibatkan seluruh institusi terkait

untuk penataan wilayah maritim ditinjau dari segi aspek pertahanan dan keamanan adalah perlu meningkatkan postur pertahanan negara yang didukung dengan anggaran yang memadai. Selain itu, perlu mengorganisir atau membentuk komponen cadangan dan pendukung yang sewaktu-waktu dapat dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama.

Dari hasil analisis melalui 8 (delapan) aspek ketahanan nasional tersebut, bahwa pertahanan negara merupakan bagian dari ketahanan nasional, oleh

karenanya penyelenggaraan pertahanan negara harus terintegrasi dan bersinergi dengan aspek kehidupan nasional lainnya (geografi, demografi, SKA, ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya), baik komponen militer maupun nonmiliter, melalui usaha membangun dan membina kemampuan daya tangkal (*deterrence effect*) bangsa dan negara, untuk menghadapi setiap bentuk ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

b. Upaya

Tumpang tindihnya aturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah yang belum sesuai dengan kondisi saat ini, pelaksanaan operasi keamanan laut yang belum terpadu serta terbatasnya sarana dan prasarana pengamanan wilayah maritim, mengakibatkan belum maksimalnya pengamanan wilayah maritim saat ini.

oleh sebab itu, guna mewujudkan stabilitas keamanan laut dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI, diperlukan upaya-upaya antara lain sebagai berikut :

1) Adanya kebijakan pemerintah

- a) Sebagai negara yang memiliki wilayah laut luas beserta potensi sumber daya alam di dalamnya, seharusnya pemerintah memiliki kebijakan nasional kelautan (*Ocean National Policy*), dikoordinasikan dan dikendalikan oleh sebuah institusi tunggal yang diberi kewenangan penuh untuk pengamanan dan penegakan hukum di laut yurisdiksi nasional, dan legalitas formalnya diakui oleh hukum nasional maupun hukum internasional.
- b) Adanya *political will* dari pemerintah sebagai negara maritim, termasuk konsistensi dalam pengamanan dan penegakan hukum di laut.
- c) Pemerintah perlu segera membentuk satu wadah organisasi sebagai jalan ke luar dari keruwetan keamanan di laut yang memiliki kewenangan penegakan hukum di laut dan keamanan di laut, serta kewenangan komando (*line of command*), agar tidak terjadi tumpang tindih penegakan hukum di laut. Pembentukan badan tersebut memiliki kewenangan luas dalam pengamanan di laut yang diupayakan melalui



http://www.shnews.co/foto_kolom/71Periskop-Armada.jpg

harmonisasi dan sinkronisasi undang-undang yang ada untuk mengurangi resistensi pelaksanaan kewenangan masing-masing institusi yang memiliki kewenangan pengamanan wilayah maritim.

- d) Pemerintah perlu merumuskan “*Grand Strategy*” pembangunan jangka panjang bidang maritim, agar Indonesia dapat mengoptimalkan kekayaan dan biota lautnya, serta mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada kekuatan sumber daya maritim.
 - e) Pemerintah membentuk badan-badan di daerah yang merupakan bagian dari struktur wadah organisasi mengingat permasalahan yang terjadi di laut banyak terjadi di daerah.
- 2) **Mewujudkan penyelenggaraan operasi keamanan di laut yang terpadu**
- a) Mengoptimalkan dan mensinergikan pola gelar kekuatan unsur-unsur dalam melaksanakan pengamanan di wilayah yurisdiksi nasional Indonesia.
 - b) Adanya gelar kekuatan unsur-unsur dalam pengamanan laut di bawah satu komando dan pengendalian, agar tidak terdapat tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
 - c) Pengembangan kegiatan operasional keamanan laut secara terpadu yang efektif, meliputi pemilihan daerah

sasaran dan pemilihan waktu operasi serta konsep operasi yang tepat, didukung dengan intelijen yang akurat.

- d) Perlu mengoptimalkan peran, fungsi dan tugas masing-masing instansi sesuai dengan kewenangan yang ada, sehingga dapat menyamakan pola pikir, pola sikap dan pola tindak aparaturnya penegak hukum di laut yang terkendali.
- e) Menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang terintegrasi antar seluruh pemangku kepentingan, sehingga tidak ada lagi operasi keamanan laut yang berjalan sendiri-sendiri.
- f) Menetapkan pokok-pokok kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam melaksanakan pengamanan laut yang dilaksanakan berdasarkan skala prioritas.

Melaksanakan tugas diplomasi melalui peningkatan kerjasama internasional di bidang keamanan di laut dalam bentuk patroli terkoordinasi, latihan bersama, pertukaran informasi, pendidikan/kursus dan seminar/simposium.

3) Tersedianya produk hukum

- a) Pemerintah dan DPR serta seluruh *stakeholders* keamanan di laut perlu meninjau kembali produk hukum di bidang maritim yang masih tumpang



tindih, berkaitan dengan fungsi, tugas dan kewenangan di laut yang sampai saat ini masih bersifat sektoral masing-masing instansi dan belum mendapatkan solusi yang tepat.

- b) Pemerintah dan DPR perlu membuat pengaturan yang tegas, jelas dan menyeluruh tentang penegakan hukum di laut sebagai pedoman dan tuntunan pelaksana di lapangan penugasan, agar langkah tindak dan prosedur yang digunakan seragam dan tidak menimbulkan kerancuan.

Pemerintah dan DPR perlu merumuskan dan menyusun peraturan dan perundangan yang jelas tentang batas negara dan status wilayah dengan negara tetangga (*grey area*), agar dalam penyelenggaraan operasi keamanan di laut tidak terjadi persengketaan karena penerapan prinsip yang berbeda terhadap penetapan batas-batas landas kontinen diantara negara-negara bertetangga akibat wilayah yang tumpang tindih.

4) Meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana

- a) Pemerintah perlu melengkapi sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan, pengamanan dan penegakan hukum di laut, baik teknologi, maupun sumber daya manusianya, karena tidak dapat dipungkiri bahwa luas wilayah laut Indonesia memerlukan sarana dan prasarana yang memadai.
- b) Pemerintah dan institusi pelaku keamanan di laut, perlu mengembangkan sistem *surveillance* yang memadai, serta terintegrasi secara baik antara unsur-unsur pelaksana di lapangan, pusat komando dan pengendalian yang mencakup seluruh wilayah perairan Indonesia dengan melibatkan seluruh institusi terkait.
- c) Pemerintah dan *stakeholders* memanfaatkan industri maritim nasional yang termasuk di dalamnya industri galangan kapal dan jasa perbaikan (*docking*), industri mesin kapal dan perlengkapannya, guna meningkatkan

kemampuan nasional dalam memanfaatkan dan mengamankan potensi laut.

5. Kesimpulan

- a. Penyelenggaraan pengamanan wilayah maritim, harus senantiasa diselenggarakan secara terencana, terkoordinasi dan terpadu dengan menggunakan pendekatan keamanan dan kesejahteraan secara seimbang.
- b. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia (*the biggest archipelagic state in the world*), terletak pada posisi silang, memiliki konfigurasi unik dan memiliki luas laut 5,8 juta km², kondisi ini memiliki tingkat kerawanan yang tinggi dari berbagai ancaman, baik ancaman terhadap kedaulatan, pencurian sumber daya alam di laut, dan kegiatan *illegal* lain yang melanggar aturan perundang-undangan.
- c. Pengamanan wilayah maritim belum dapat dilaksanakan secara baik. Dua belas institusi yang menangani pengelolaan pengamanan wilayah maritim cenderung melakukan sendiri-sendiri. Bakorkamla yang dibentuk untuk mewadahi dan menjawab berbagai persoalan hanya bersifat koordinasi yang tidak memiliki otoritas memaksa, sehingga sering tidak bisa menyelesaikan masalah secara tuntas.
- d. Belum maksimalnya pengamanan wilayah maritim Indonesia selama ini, akibat tumpang tindihnya aturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah yang belum sesuai dengan kondisi saat ini, pelaksanaan operasi keamanan laut yang belum terpadu serta terbatasnya sarana dan prasarana pengamanan wilayah maritim.

6. Rekomendasi

Guna lebih menjamin keamanan wilayah maritim, perlu dirumuskan suatu langkah yang lebih komprehensif dan nyata, antara lain:

- a. Melaksanakan validasi organisasi Bakorkamla menjadi Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai *Single Agency Multifunction* yang mempunyai otoritas dan kemampuan operasional dalam mengamankan laut.



- b. Melaksanakan revisi terhadap produk Undang-Undang dan Peraturan dari dua belas institusi berbeda penyelenggara pengamanan di laut yang sebagian isinya hampir bersinggungan atau tumpang tindih.
- c. Menyatukan pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana pengamanan laut terutama pembelian kapal-kapal patroli yang saat ini dilakukan oleh masing-masing institusi.

Penataan Pengamanan Wilayah Maritim guna Memelihara Stabilitas Keamanan dalam rangka Menjaga Keutuhan NKRI

Focus Group Discussion (FGD)

- Selasa, 1 Mei 2012
- Pembicara :
 1. Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Kementerian kelautan & Perikanan
RI Syahrin Abdurrahman, SE
 2. Kepala PKSPL IPB Prof. Dr. Ir. H. Tridoyo Kusumastanto, MS.
 3. Tenaga Profesional Bidang Diplomas Lemhannas RI Laksda TNI (Purn) Robert Mangindaan.
 4. Tenaga Ahli Pengajar Bidang Wasantara Lemhannas RI Laksda TNI Ir. Leonardi .

Roundtable Discussion (RTD)

- Selasa, 29 Mei 2012
- Pembicara :
 1. Kepala Staf TNI-AL Laksamana TNI Soeparno.
 2. Kalakhar Bakorkamla Laksda TNI Y. Didik Heru Purnomo
 3. Guru Besar F. Hukum Universitas Padjajaran Prof. Dr. Hj. Etty R. Agoes, SH, LLM
 4. Wakil Dekan Fisip UI/Manajer Riset UI Dr. Edy Prasetyono

• Penanggap :

1. Wakil Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Moeldoko
2. Direktur Utama PT. Pellindo II R. J Lino
3. Tenaga Ahli Bidang SKA Lemhannas RI Marsda TNI M. Amien Syahbudiono, M.Sc
4. Tenaga Ahli Bidang SKA Lemhannas RI Mayjen TNI Endang Hairudin, ST, MM
5. Tenaga Profesional Bidang Keamanan Dalam Negeri Lemhannas RI Komjen Polisi (Purn) Drs. Togar M.Sianipar
6. Tenaga Profesional Bidang Pertahanan Lemhannas RI Mayjen TNI (Purn) Semion Remon, S.IP,M. Si, M.Sc

**Tim Penyusun : Direktorat Pengkajian
Bidang Pertahanan dan
Keamanan**



Meningkatkan Bela Negara Masyarakat Perbatasan guna Mendukung Pembangunan Nasional dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI

PENDAHULUAN

1. Umum

Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan telah mengorbankan baik jiwa, raga, harta dan tenaga yang tak terhitung, meskipun hanya dengan persenjataan yang sangat sederhana, namun karena dilandasi oleh jiwa dan semangat perjuangan, maka bangsa Indonesia berhasil memperoleh kemerdekaan Indonesia yang diproklamkan pada 17 Agustus 1945. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah yang sangat luas dan berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Timor Leste dan Papua New Guinea. Namun sampai dengan saat ini, daerah perbatasan darat Indonesia masih identik sebagai daerah yang terisolir, terpencil dan terbelakang, sehingga sering menimbulkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan

Upaya bela negara bukan saja menjadi tugas dan tanggung jawab tentara (TNI) saja, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia termasuk masyarakat perbatasan

yang merugikan negara serta berdampak pada kelangsungan pembangunan di daerah perbatasan.

Upaya bela negara bukan saja menjadi tugas dan tanggung jawab tentara (TNI) saja, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia termasuk masyarakat perbatasan. Guna menjaga kedaulatan dan



keutuhan wilayah, negara telah menyusun sistem pertahanan dengan sistem pertahanan semesta (SISHANTA) yang diselenggarakan berdasarkan falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia guna menjamin tegaknya kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Pemahaman masyarakat tentang bela negara masih sangat beragam, meskipun bela negara merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam implementasi sistem pertahanan negara yang bertumpu pada kekuatan TNI dan rakyat.

Kebijakan pembangunan daerah perbatasan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2004-2025, bahwa salah satu arah kebijakan pembangunan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini dipertegas lagi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009, namun RPJM tersebut pelaksanaannya kurang optimal, sehingga pemerintah membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang BNPP, dengan arah dan tujuannya adalah mantap tegaknya kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat perbatasan melalui pendekatan keamanan dan kesejahteraan yang seimbang.

2. Permasalahan

Kondisi wilayah perbatasan darat Indonesia sampai saat ini masih identik dengan daerah yang terisolir, terpencil dan terbelakang serta sering menimbulkan peluang kegiatan *illegal* antara lain: pencurian kekayaan alam, perdagangan manusia, perdagangan narkoba, penyelundupan yang kesemuanya dapat merugikan negara. Di sisi lain, kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah karena dampak belum meratanya pembangunan di daerah perbatasan dan hal ini mempengaruhi tingkat pemahaman bela negara untuk menghadapi ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

3. Maksud Dan Tujuan

Kajian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi permasalahan dan upaya peningkatan bela negara masyarakat perbatasan sebagai warga negara dalam sistem pertahanan negara sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis guna menjaga keutuhan wilayah NKRI. Sedangkan tujuannya adalah, memberikan

masukan atau bahan pertimbangan kepada pemerintah guna mengambil langkah-langkah kebijakan atau strategis untuk meningkatkan bela negara masyarakat perbatasan guna mendukung pembangunan nasional dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kajian ini dibatasi pada kondisi bela negara dan kehidupan masyarakat perbatasan dihadapkan kepada aspek Asta Gatra dalam upaya peningkatan bela negara masyarakat perbatasan guna mendukung pembangunan nasional dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.

5. Metode Dan Pendekatan

Pembahasan kajian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif secara komprehensif-integral yang disertai dengan diskusi. Adapun lokasi pengumpulan data telah ditentukan secara *purposive sampling* yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan tehnik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara, kuesioner (daftar pertanyaan), *Focus Group Discussion (FGD)* dan *Roundtable Discussion (RTD)* yang melibatkan berbagai ahli, baik dari personel Lemhannas RI maupun dari luar Lemhannas RI, seperti *civil society*, akademisi, pengamat serta pakar sesuai pendekatan kompetensi keilmuan dengan pokok bahasan. Pendekatan yang dilakukan dalam kajian ini adalah pendekatan normatif dan empiris yang dilakukan dengan analisis secara deduktif dan induktif serta interpretasi.

LANDASAN PEMIKIRAN

6. Umum

Upaya meningkatkan peran bela negara masyarakat perbatasan dalam sistem pertahanan dan keamanan negara, didasarkan pada landasan pemikiran melalui Paradigma Nasional yang meliputi Pancasila, UUD NRI 1945, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

7. Paradigma Nasional

Paradigma Nasional yang menjadi kerangka berpikir bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan nasional adalah :

a. Pancasila Sebagai Landasan Idiil

Pancasila adalah sebagai falsafah, ideologi dan dasar negara harus dipahami, dihayati dan diamalkan

sebagai dasar motivasi dalam segala sikap dan tingkah laku kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD NRI 1945. Pancasila harus di pegang teguh menjadi landasan berpikir dan bertindak bagi

seluruh bangsa Indonesia, diantaranya masyarakat perbatasan dalam pembelaan negara, guna mendukung pembangunan nasional yang hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat perbatasan.

b. UUD NRI 1945 Sebagai Landasan Konstitusional

UUD NRI 1945 sebagai landasan konstitusional dan merupakan hukum tertulis di Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, upaya bela negara melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta telah terwadahi di dalam UUD NRI 1945, yaitu pada alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945, batang tubuh UUD NRI 1945 pasal 27 ayat (3) dan pasal 30 ayat (2).

c. Wawasan Nusantara Sebagai Landasan Visional

Wawasan Nusantara memberikan arah terhadap visi bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 tentang cita cita bangsa, yaitu *Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta berkehidupan kebangsaan yang bebas*. Masyarakat perbatasan yang berhadapan langsung dengan negara tetangga untuk memiliki Wawasan Nusantara agar mampu menghadapi setiap gangguan keamanan yang dapat menghambat lajunya pembangunan nasional dan mengancam keutuhan wilayah NKRI.



d. Ketahanan Nasional Sebagai Landasan Konsepsional

Ketahanan Nasional sebagai landasan konsepsional dalam meningkatkan bela negara adalah merupakan konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh, terpadu berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Konsep ketahanan nasional sangat terkait dengan upaya meningkatkan bela negara pada masyarakat perbatasan yang merupakan gambaran dari kehidupan nasional yang ulet dan tangguh sebagai modal dasar dalam pemeliharaan ketahanan nasional.

8. Peraturan Perundang-Undangan

a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, yaitu sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lain, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala



Upaya meningkatkan peran bela negara masyarakat perbatasan dalam sistem pertahanan dan keamanan negara, didasarkan pada landasan pemikiran melalui Paradigma Nasional yang meliputi Pancasila, UUD NRI 1945, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional dan Peraturan Perundang-undangan lainnya

bentuk ancaman, termasuk ancaman di daerah perbatasan.

- b. **Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).**

Tugas pokok TNI, yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Salah satu wujud pelaksanaan tugas pokok tersebut, adalah menjaga keamanan daerah perbatasan darat dengan negara lain, yaitu dengan melakukan segala upaya, pekerjaan kegiatan untuk menjamin tegaknya kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan bangsa di daerah perbatasan dengan negara lain dari segala bentuk ancaman dan pelanggaran wilayah negara.

- c. **Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).**

Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman maupun pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, tugas pokok Polri, adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

- d. **Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.**

Dalam pasal 22 ayat 1 disebutkan, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, kerukunan nasional dan keutuhan NKRI, sedangkan pada ayat 2 menyebutkan tugas pemerintah daerah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Dengan demikian, maka pemerintah daerah ikut memiliki peran penting dalam meningkatkan bela negara masyarakat perbatasan, guna mendukung pembangunan nasional dalam rangka menjaga keutuhan wilayah NKRI.

- e. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).**

Tugas BNPP yaitu menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Dengan adanya, koordinasi lintas sektoral dengan kementerian atau lembaga terkait dan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten serta pelibatan masyarakat lokal sangat diperlukan, sehingga pembangunan yang dicapai dapat dirasakan oleh masyarakat perbatasan.

Kondisi kehidupan masyarakat perbatasan masih sangat jauh tertinggal, dikarenakan sebagian besar mata pencaharian masyarakat perbatasan adalah petani tradisional, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, pelayanan kesehatan dan rendahnya tingkat ekonomi masyarakat

f. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.**

Wilayah NKRI, yang selanjutnya disebut dengan wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan, pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan perbatasan yaitu dalam bentuk mengembangkan pembangunan kawasan perbatasan dan menjaga serta mempertahankan kawasan perbatasan yang dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.**

Bahwa pembangunan pertahanan yang mencakup sistem dan strategi pertahanan, postur dan struktur pertahanan, profesionalisme TNI,

pengembangan teknologi pertahanan dalam mendukung ketersediaan Alut Sista, komponen cadangan dan pendukung pertahanan diarahkan pada upaya mewujudkan kemampuan pertahanan yang melampaui kekuatan pertahanan minimal, agar mampu menegakkan kedaulatan negara dan menjaga keselamatan bangsa serta keutuhan wilayah NKRI. Postur dan struktur pertahanan diarahkan untuk dapat menjawab berbagai kemungkinan tantangan, permasalahan aktual, dan pembangunan kapabilitas jangka panjang yang sesuai dengan kondisi geografis dan dinamika masyarakat.

9. **Landasan Teori**

a. **Negara¹.**

Negara adalah sekumpulan masyarakat dengan berbagai keragamannya, yang hidup dalam suatu wilayah yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama.

- 1) Fungsi Negara, yaitu melaksanakan ketertiban, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, fungsi pertahanan serta menegakkan keadilan.
- 2) Unsur Negara, Suatu negara dinyatakan sah berdiri sebagai suatu negara yang berdaulat, jika memenuhi minimal 4 unsur, yaitu: rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat dan pengakuan dari negara lain.

b. **Nasionalisme².**

Menurut Anthony D. Smith, bahwa nasionalisme adalah suatu ideologi yang meletakkan bangsa di pusat masalahnya dan berupaya mempertinggi keberadaannya atau mempertinggi derajat bangsa. Definisi kerja nasionalisme, adalah suatu gerakan ideologis untuk mencapai dan mempertahankan identitas, kesatuan dan otonomi bagi suatu populasi, yang

¹ Soerya Surabaya, go. Id/AuP/e-DU KONTEN/edukasi. Net/PKN/Bela Negara

² <http://regional.kompasiana.com/2010/10/24/Nasionalisme-1>, 24 Oktober 2010



sejumlah anggotanya bertekad untuk membentuk suatu bangsa yang aktual atau bangsa yang potensial.

c. Pertahanan Negara³.

Pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang diselenggarakan guna mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa dan negara dari segala bentuk tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Konsep pertahanan negara ini dibuat karena adanya kepentingan nasional Indonesia, yaitu tetap tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta terjaminnya kelancaran dan keamanan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

d. Pemberdayaan Masyarakat⁴.

Pada intinya pemberdayaan adalah sebagai upaya berencana yang dirancang untuk merubah atau melakukan pem-

baruan pada suatu komunitas atau masyarakat dari kondisi dari ketidakberdayaan menjadi berdaya dengan menitik beratkan pada pembinaan potensi dan kemandirian masyarakat. Bela negara pada masyarakat perbatasan, selain memenuhi kepentingan pemerintah dan/atau negara juga memenuhi kepentingan masyarakat itu sendiri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

KONDISI AWAL DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

10. Umum

Kondisi daerah perbatasan saat ini masih jauh tertinggal dari segala aspek kehidupan dibandingkan daerah-daerah lainnya. Hasil survei diperoleh data dan fakta yang menggambarkan kondisi nyata bela negara masyarakat perbatasan dan pengaruh perkembangan Lingstra baik global, regional, maupun nasional untuk dijadikan bahan analisa dan solusi peningkatan bela negara masyarakat perbatasan.

11. Data

a. Penduduk Perbatasan Darat setiap Kabupaten bulan Februari 2011⁵.

No	Provinsi	Kabupaten	Jumlah penduduk
1	2	3	4
1	Kalimantan Barat	Sambas Bengkayang Sanggau Sintang Kapuas Hulu	33770 14543 44081 47050 55424
2	Kalimantan Timur	Malinau Nunukan	5727 110006
3	Papua	Jayapura Keerom Pegunungan Bintang Boven Digoel Merauke	219287 39225 34957 93041 15526
4	Nusa Tenggara Timur	Kupang Timor Tengah Utara Belu	7006 33677 68292

³ Buku Putih Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 2008

⁴ <http://www.sarjanaku.com/2011/09/pemberdayaan-masyarakat-pengertian-proses-tujuan>.

⁵ Badan Pusat Statistik Indonesia Th 2012

- b. Alokasi anggaran pembangunan daerah perbatasan tahun 2012 berdasarkan Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut⁶:

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1.	Kalimantan Barat (673.292.851.000)	Sambas	208.519.895.000
		Bengkayang	51237.406.000
		Sanggau	44.797.082.000
		Kapuas Hulu	92.372.982.000
		Sintang	75.664.632.000
2.	Kalimantan Timur (303.007.968.000)	Nunukan	117.560.669.000
		Malinau	87.366.021.000
		Kutai Barat	9.438.412.000
3.	Papua (920.748.581.000)	Marauke	341.919.126.000
		Jayapura	96.250.856.000
		Pegunungan Bintang	21.041.900.000
		Boven Digoel	35.041.658.000
		Kerom	162.078.824.000
4.	Nusa Tenggara Timur (786.630.759.000)	Kupang	140.971.372.000
		Timor Tengah Utara	175.407.679.000
		Alor	241.005.643.000
		Belu	115.733.793.000
		Rote Ndao	28.483.369.000

c. Kondisi daerah perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat

Kondisi bela negara dan kehidupan masyarakat di Desa Entikong dan Palapasang sebagai berikut :

- 1) Secara umum kondisi bela negara masyarakat perbatasan sudah cukup baik, namun bila ditinjau dari rasa nasionalisme masyarakat perbatasan masih kurang.
- 2) Kondisi kehidupan masyarakat perbatasan masih sangat jauh tertinggal, dikarenakan sebagian besar mata pencaharian masyarakat perbatasan adalah petani tradisional, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, pelayanan kesehatan dan rendahnya tingkat ekonomi masyarakat.

12. Fakta

Beberapa permasalahan di daerah perbatasan darat Indonesia dengan negara-negara tetangga yang belum terselesaikan, antara lain :

a. Perbatasan darat Indonesia-Malaysia

- 1) Kondisi geografi. Di daerah perbatasan ini masih terdapat 10 *Outstanding Boundary Problems* (OBP) dan adanya jalan-jalan tikus yang digunakan keluar

masuk masyarakat Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat ke Malaysia, hal ini dapat menyebabkan kawasan perbatasan menjadi rawan dari kegiatan ilegal.

- 2) Kondisi keamanan. Daerah perbatasan berpotensi sebagai tempat terjadinya kejahatan transnasional yang terorganisir, baik yang bernuansa ekonomi maupun keamanan, seperti penyelundupan barang, *illegal logging*, *illegal mining* dan *human trafficking* serta pelanggaran perbatasan, perusakan patok batas negara, pelintas batas secara *illegal* di daerah perbatasan masih cukup tinggi.
- 3) Kondisi perekonomian. Masyarakat Long Bawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur, kehidupannya sangat bergantung pada negara tetangga Malaysia. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat Long Bawan mendatangkan dari Serawak Malaysia, karena lokasinya lebih dekat, mudah terjangkau dan harga relatif lebih murah bila dibandingkan mendatangkan dari Indonesia.⁷

⁶Pengelolaan Batas Wilayah Negara di Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan RI 2012

⁷Berita Harian Kompas. Tanggal 31 Mei 2012



Kondisi geografi yang strategis, telah menempatkan Indonesia pada kedudukan dan peranan yang penting dalam hubungan internasional, karena wilayah Indonesia yang sangat terbuka dari segala arah, sehingga memudahkan keluar masuknya tindak kriminalitas lintas negara yang dapat mengakibatkan kerugian negara

b. Perbatasan darat Indonesia dengan negara Timor Leste.

- 1) Kondisi geografi. Perbatasan Indonesia-Timor Leste sepanjang 280 km, di Kabupaten Belu 149,9 Km dari Motaain sampai ke Mota Masin dan wilayah *enclave* Ambenu sepanjang 130,1 Km.⁸
- 2) Kondisi keamanan. Di sepanjang perbatasan tersebut masih terdapat beberapa permasalahan serius, seperti: 3 (tiga) segment perbatasan masih belum disepakati yaitu di Dilomil, Bijael Sunan dan Noel Besi, permasalahan ini akibat dari masih terdapatnya perbedaan pendekatan dari kedua negara dalam penentuan batas.⁹
- 3) Kondisi infrastruktur. Infrastruktur penunjang perdagangan masih sangat terbatas, perjanjian perdagangan

lintas batas antara pemerintah Indonesia dan RDTL belum dapat diimplementasikan karena pihak Timor Leste belum menerbitkan kartu Pass Lintas Batas bagi penduduknya dan belum memadainya sarana dan prasarana penunjang perdagangan seperti pasar dan transportasi serta masih kurangnya jumlah dan rendahnya kualitas SDM sebagai penggerak di bidang ekonomi.¹⁰

c. Perbatasan darat Indonesia-PNG

- 1) Kondisi geografi. Pada umumnya kondisi geografi merupakan pegunungan, sungainya lebar, medannya berbukit dan terpotong-potong dengan ditutupi hutan tropis yang sangat lebat, sehingga akses dari/ke daerah lainnya relatif tertutup.
- 2) Kondisi infrastruktur. Aktivitas lintas batas kedua negara khususnya antara kota Jayapura-Vanimo dalam perdagangan lintas batas terus berkembang, mobilitas aliran barang, jasa dan manusia antara kedua negara terus meningkat. Perkembangan ini ditunjang adanya jalan trans perbatasan yang memperlancar aksesibilitas antara Kota Jayapura hingga kawasan perbatasan Indonesia-PNG.
- 3) Kondisi keamanan. Dari segi keamanan daerah perbatasan masih dijadikan sebagai tempat pelarian orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum baik di wilayah Indonesia maupun PNG dan pelintasan batas secara illegal yang masuk ke wilayah PNG dan tidak mau kembali karena alasan politik antara lain kelompok pengacau keamanan dan kegiatan penyelundupan barang-barang ke wilayah Indonesia.
- 4) Kondisi sosial budaya. Adanya kesamaan adat, suku, bahasa, agama, hak ulayat dan kekerabatan merupakan suatu fakta yang tidak bisa dipungkiri dan diposisikan sebagai asset bagi hubungan harmonis kedua Negara.

13. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

a. Pengaruh Perkembangan Lingkungan Global

1) Pasar Bebas

Diberlakukannya perdagangan bebas di beberapa kawasan dunia, akan

⁸ [http://ntprov.go.id/provnt/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=45_Daerah Perbatasan RI – RDTL, 20 April 2010, diakses 30 November 2011](http://ntprov.go.id/provnt/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=45_Daerah%20Perbatasan%20RI%20-%20RDTL_20%20April%202010)

⁹ <http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/18759/pemerintah-harus-tegas-soal-batas-ri-timor-leste>, diakses 13 Desember 2011

¹⁰ http://ntprov.go.id/provnt/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=45, diakses 30 November 2011



membuka peluang bagi suatu negara untuk memperdagangkan hasil produksinya ke negara lain termasuk Indonesia. Kondisi ini membuka peluang bagi negara-negara yang mampu menghasilkan produk secara efisien, untuk merebut pangsa pasar di negara lain, termasuk Indonesia.

2) Masalah Energi

Penggunaan bahan bakar minyak bumi, batubara dan gas alam untuk kepentingan industri saat ini dapat menimbulkan krisis energi dimasa mendatang. Dengan demikian, negara-negara di dunia akan bersaing untuk mendapatkan energi guna memenuhi kebutuhan industrinya. Tingginya, harga minyak dunia, sangat berpengaruh terhadap perekonomian dunia termasuk Indonesia yang akhirnya akan berpengaruh terhadap pembangunan Indonesia.

3) Terorisme

Perang terhadap terorisme yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya, telah berhasil menangkap dan membunuh para pemimpin dan pelaku teror, seperti terbunuhnya pemimpin Al Qaida (Osama Bin Laden) di Pakistan pada tanggal 1 Mei Tahun 2011 oleh serangan tentara Amerika Serikat. Namun kegiatan terorisme tidak berhenti untuk melakukan aksinya melawan Amerika Serikat dan sekutunya.¹¹

b. Pengaruh Perkembangan Lingkungan Regional

1) Kawasan Asia Pasifik

- a) Ketergantungan Australia pada AS, sehingga kebijakan Australia dipengaruhi oleh AS, termasuk kebijakan terhadap Indonesia.
- b) Australia merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan akhir bagi para pencari suaka politik dan imigran gelap dari berbagai negara, sehingga menjadikan wilayah Indonesia

sebagai tempat persinggahan/ sasaran alternatif para imigran gelap.

- c) Australia terus melakukan pembangunan kekuatan militer dengan pembelian senjata berteknologi tinggi, yang direncanakan hingga tahun 2030 dan melakukan kerjasama sistem pertahanan Rudal dengan AS dan Jepang. Penempatan pasukan Marinir Amerika Serikat (USMC) di Darwin, Australia telah menimbulkan kecurigaan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia.
 - d) Isu ikatan *Melanesian Brotherhood* terus memberikan dukungan secara politik terhadap gerakan separatis di Papua. Campuran pihak asing secara tidak langsung, akan memengaruhi penyelesaian permasalahan di dalam negeri, sehingga perlu diwaspadai dan diantisipasi, agar tidak menimbulkan instabilitas dalam negeri maupun kawasan.
- ### 2) Kawasan Asia Tenggara
- a) Pada umumnya negara-negara di kawasan Asia Tenggara menghadapi permasalahan internal, seperti terorisme, isu konflik komunal antar suku dan agama, meskipun negara-negara di kawasan Asia Tenggara masih terikat dalam kerangka ASEAN.
 - b) Kejahatan lintas negara (*Transnational crimes*) ke depan masih merupakan ancaman nyata, mengingat lemahnya pengawasan di perbatasan antar negara, karena belum diselesaikannya beberapa sengketa perbatasan dan adanya konflik internal di tiap-tiap negara.
 - c) Negara-negara ASEAN seakan berlomba meningkatkan Anggaran Pertahanannya dan memiliki kecenderungan untuk membeli

¹¹ Loudewijk F. Paulus, "Terorisme", <http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=8&mnorutisi=2>.
Rikard Bagun, "Indonesia di Peta Terorisme Global", <<http://www.polarhome.com>>, 17 November 2002



senjata-senjata yang berkarakter offensif yang dapat mengarah ke kompetisi dan perlombaan senjata antar negara yang dapat mengancam stabilitas kawasan.

- d) Pembangunan kekuatan militer (Malaysia, Singapura, Vietnam) di kawasan memicu terjadinya perlombaan kekuatan berpotensi menimbulkan ketegangan.
- e) Ketergantungan produk dari beberapa negara ASEAN yang tidak mampu bersaing dengan membanjirnya produk dari negara lain dipasar dalam negeri dan akhirnya merugikan industri dalam negeri.
- f) Sengketa perbatasan di kawasan ASEAN dapat menimbulkan konflik bersenjata yang mempengaruhi stabilitas keamanan di kawasan.

C. Pengaruh Perkembangan Lingkungan Nasional

1) Aspek Geografi

- a) Kondisi geografi yang strategis, telah menempatkan Indonesia pada kedudukan dan peranan yang penting dalam hubungan internasional, karena wilayah Indonesia yang sangat terbuka dari segala arah, sehingga memudahkan keluar masuknya tindak kriminalitas lintas negara yang dapat mengakibatkan kerugian negara.
- b) Wilayah perbatasan darat, masih menyimpan beberapa permasalahan. Khususnya perbatasan dengan Malaysia, sehingga berpotensi konflik bersenjata antar dua negara.

2) Aspek Demografi

- a) Keberhasilan program keluarga berencana pada era orde baru dalam menekan laju pertumbuhan penduduk Indonesia, tidak berlanjut pada era reformasi. Kondisi seperti ini menyebabkan tingkat pertumbuhan penduduk

Indonesia pada sepuluh tahun terakhir cukup tinggi dan akan berdampak munculnya masalah sosial di berbagai wilayah tanah air.

- b) Penyebaran yang tidak merata (proposional), karena sebagian besar penduduk mendiami wilayah pulau Jawa dan Madura. Sementara itu, daerah lain yang jauh lebih luas, penduduknya tidak seimbang dengan luas wilayah.

3) Aspek Sumber Kekayaan Alam (SKA)

SKA merupakan salah satu sumber pendapatan yang diandalkan negara, sehingga dapat digunakan sebagai modal dasar pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan devisa negara. Kurangnya pengamanan terhadap SKA oleh aparat TNI/POLRI dan masyarakat memberikan peluang munculnya kegiatan-kegiatan ilegal yang merugikan negara, seperti pencurian kekayaan alam dan perusakan lingkungan.

4) Aspek Ideologi

Pancasila sebagai ideologi negara memiliki nilai instrinsik, telah disepakati secara nasional sebagai ideologi, yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia, karena mempunyai peran dan fungsi sebagai perekat (*adhesive function*). Menurut pemahaman masyarakat terhadap Ideologi Pancasila, menyebabkan semakin tumbuh berkembangnya radikalisme di masyarakat, dengan memanfaatkan kesenjangan sosial yang terjadi.¹²

5) Aspek Politik.

- a) Dinamika politik yang berkembang di dalam negeri dirasakan belum stabil, karena infrastruktur politik belum siap, seperti peraturan perundangan yang belum disesuaikan dengan kehidupan demokrasi.

¹² Bahan ceramah Badan Intelijen Nasional 2012



- b) Kebijakan tentang implementasi otonomi daerah berpotensi terjadinya ketegangan politik antara pusat dengan daerah terkait bagi hasil dan terjadi ketimpangan penghasilan antar daerah.
 - c) Lemahnya penegakan hukum, menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
- 6) **Aspek Ekonomi**
- a) Perkembangan ekonomi global terutama masih berlanjutnya krisis ekonomi Eropa dan melonjaknya harga minyak terutama akibat embargo terhadap Iran, berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi nasional dan mendorong kenaikan harga bahan pokok nasional yang berakibat pada laju inflasi.
 - b) Dominasi asing terhadap perekonomian nasional terutama yang menyangkut harkat orang banyak, akan mengancam perekonomian nasional serta belum siapnya infrastruktur ekonomi dan lemahnya daya saing industri dalam negeri, mengakibatkan membanjirnya produk luar negeri yang berpotensi menghambat perkembangan ekonomi nasional.
 - c) Pembangunan ekonomi kerakyatan, sangat efektif dalam mengimbangi dominasi usaha perusahaan-perusahaan besar dan masuknya modal asing.
- 7) **Aspek Sosbud**
- a) Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK) telah meningkatkan kecerdasan masyarakat, sehingga mendorong terjadinya mobilitas penduduk dari pedesaan menuju perkotaan, yang menyebabkan kurangnya tenaga kerja disektor pertanian.
 - b) Masuknya nilai-nilai asing yang disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, mendorong munculnya sikap konsumerisme sebagian besar masyarakat.
 - c) Masih adanya kesenjangan sosial yang sangat tajam di kalangan masyarakat dan tidak



adanya kepastian hukum yang jelas serta masih tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan, berpotensi terjadinya konflik sosial yang tidak mencerminkan nilai-nilai sosial masyarakat.

8) Aspek Pertahanan dan Keamanan

- a) Perkembangan lingkungan strategis bidang pertahanan dan keamanan dipengaruhi oleh faktor internal dalam negeri dan faktor eksternal. Rencana pembelian beberapa Alutsista (pesawat tempur, kapal selam, tank Leopard) di tahun 2012 adalah bagian dari keseriusan pemerintah dalam menyikapi ketertinggalan.
- b) Beberapa kecenderungan masalah pertahanan keamanan yang akan dihadapi Indonesia, dimasa mendatang, diantaranya:
 - (1) Pada tahun 2012 tindakan kejahatan, seperti *illegal logging*, *human and drugs trafficking* masih terjadi yang disebabkan oleh lemahnya pengamanan wilayah negara, terutama di daerah perbatasan darat Indonesia.¹³
 - (2) Resistensi separatis Papua, Maluku secara politik masih memperlihatkan aktifitasnya dan terus berusaha mengangkat isu-isu lokal untuk dijadikan konsumsi internasional.
 - (3) Belum selesainya sebagian besar permasalahan perbatasan Indonesia dengan negara tetangga berpotensi terjadinya pelanggaran wilayah dan menimbulkan konflik antar negara.
 - (4) Luasnya daerah perbatasan darat Indonesia belum

diimbangi dengan kekuatan pengamanan dan pengawasan yang memadai, berpotensi terjadinya berbagai gangguan keamanan di daerah perbatasan.

- (5) Aksi terorisme masih terjadi akibat belum terbongkarnya secara tuntas jaringan teroris internasional di Indonesia, sehingga terorisme masih tetap menjadi ancaman aktual.
- c) Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat pada tahun 2012 mengalami peningkatan akibat kompleksitas berbagai masalah, seperti tingginya angka pengangguran, kesenjangan sosial, ketidakadilan dan provokasi yang mengeksploitasi perbedaan etnis, agama, golongan serta pelaksanaan pemilihan kepala daerah (PILKADA) yang tidak disertai kepatuhan dan kedewasaan serta kematangan elit politik menimbulkan berbagai kerusuhan sosial dan konflik horizontal.

ANALISA DAN UPAYA

14. Umum

Daerah perbatasan menjadi sangat rawan terjadinya konflik kepentingan, mulai dari perorangan sampai dengan kepentingan negara. Guna mengantisipasi kerawanan tersebut, negara Indonesia telah menyiapkan sistem pertahanan nasional yang melibatkan seluruh warga negara dalam upaya pembelaan negara sebagai bentuk rasa kecintaan dan kehormatannya kepada negara.

15. Analisa Strategik

Analisa strategik ini didasarkan atas permasalahan yang terjadi serta data fakta di lapangan dengan dihadapkan kepada pengaruh perkembangan lingkungan dan faktor-faktor yang mempengaruhi terkait dengan peningkatan bela

¹³ Bahan ceramah Anjok HPH bidang SKA, Ali Masyah Musa, *Memberantas Pembalakan Liar, Agustus 2011*



negara masyarakat perbatasan, dengan melalui pendekatan aspek Astagatra ketahanan nasional, sebagai berikut :

a. Aspek Geografi

Kondisi geografis daerah perbatasan darat Indonesia saat ini memiliki wilayah yang sangat luas dengan garis batas yang sangat panjang dan medannya sulit dijangkau karena keterbatasan infrastruktur, sehingga daerah perbatasan menjadi terisolir dan tertinggal dibandingkan wilayah lain. Dengan kondisi wilayahnya yang sangat terbuka dan lemahnya pengawasan serta pengamanan oleh aparat akan semakin besar pula ancaman yang mengintai terhadap kelestarian dan kelangsungan hidup negara. Berbagai bentuk ancaman yang tidak disadari oleh masyarakat perbatasan kemungkinan terjadi, seperti kegiatan ilegal, seperti kekayaan alam, perdagangan ilegal, penyelundupan, pelanggaran wilayah dan sangat mungkin terjadinya tindak infiltrasi oleh militer asing kewilayah Indonesia.

b. Aspek Demografi.

Kualitas sumber daya manusia dan kondisi kesehatan masyarakat perbatasan yang rendah karena keterbatasan sarana prasarana pendidikan dan medis, mengakibatkan produktifitas masyarakat perbatasan masih rendah. Pembangunan di daerah perbatasan untuk meningkatkan kualitas SDM, kesehatan serta kesadaran bela negara, sehingga mampu memberikan sumbangan bagi tersedianya tenaga pengamanan daerah perbatasan bermanfaat untuk mendukung percepatan pembangunan nasional. Kualitas SDM dan kesehatan masyarakat perbatasan akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sikap dan perilaku bela negara, yang pada gilirannya akan mampu memperkuat keutuhan NKRI.

c. Aspek Sumber Kekayaan Alam (SKA).

Kewenangan penuh dalam pengelolaan SKA Indonesia sesungguhnya telah ditetapkan pada pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. SKA yang ada di daerah perbatasan Indonesia cukup

berlimpah dan apabila dikelola secara benar akan memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan dan devisa negara. Meskipun sebagian besar masyarakat perbatasan telah memiliki pengetahuan kesadaran bela negara, namun karena tidak dilandasi oleh sikap dan perilaku yang menunjukkan adanya rasa memiliki dan bertanggungjawab serta kepedulian, maka ancaman terhadap SKA akan terus terjadi. Peningkatan sikap dan perilaku masyarakat perbatasan dalam bela negara, diharapkan masyarakat akan ikut mengawasi dan menjaga SKA yang ada.

d. Aspek Ideologi.

Pembinaan ideologi Pancasila diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berharga bagi tumbuhnya ketangguhan ideologi nasional dalam rangka mewujudkan semangat kebangsaan masyarakat, seperti hidup dengan penuh kerukunan dan kedamaian baik sesama warga, antar suku maupun agama. Tingkat kesejahteraan masyarakat perbatasan yang masih rendah, rentan terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari luar, oleh karenanya pemantapan nilai-nilai ideologi Pancasila perlu dipelihara dan ditingkatkan, sehingga kecintaannya pada negara dan tanah air tumbuh dan berkembang untuk membela kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

e. Aspek Politik.

Sistem perpolitikan di Indonesia, khususnya penyelenggaraan Pilkada lebih banyak bermuatan politik praktis demi kepentingan pribadi atau golongan dari pada berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Kualitas SDM masyarakat perbatasan saat ini masih rendah, sehingga mempengaruhi kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik. Implementasi otonomi daerah seringkali memicu terjadinya perebutan pengelolaan SKA antara pusat dengan daerah maupun antara



daerah dengan daerah, sehingga hal ini dapat menimbulkan ketegangan politik di daerah perbatasan. Lemahnya kesadaran masyarakat perbatasan terhadap bela negara, akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak kejahatan dan kegiatan ilegal. Kondisi sikap dan perilaku masyarakat perbatasan dalam pembelaan negara menjadi sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kegiatan ilegal, tindak kejahatan dan pelanggaran wilayah yang merugikan negara.

f. Aspek Ekonomi.

Kondisi perekonomian masyarakat perbatasan masih jauh tertinggal bila dibandingkan dengan wilayah lain, sebagian besar sumber penghidupan masyarakat perbatasan adalah sebagai petani tradisional dan pedagang serta sebagian kecil sebagai buruh perkebunan. Terbatasnya infrastruktur telah mempengaruhi lajunya pembangunan perekonomian di daerah perbatasan. Pembangunan daerah perbatasan yang telah dilaksanakan pemerintah, belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perbatasan

akan mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat yang dilandasi rasa kepedulian terhadap daerahnya, sehingga masyarakat memiliki kesadaran bela negara dari kemungkinan ancaman yang dapat merugikan negara. Berkembangnya ekonomi rakyat di daerah perbatasan akan memberi sumbangan bagi penguatan fundamental ekonomi nasional dan membuka keterisoliran daerah melalui pembangunan ekonomi di daerah perbatasan, sehingga akan mampu menumbuhkan keseimbangan ekonomi antar wilayah yang pada gilirannya mampu memperkokoh kesatuan ekonomi nasional, yang pada akhirnya akan mendorong pemerataan pembangunan nasional dan memberi kontribusi terhadap ketahanan nasional.

g. Aspek Sosial Budaya.

Pembangunan nasional di daerah perbatasan diperlukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus membangun sosial budaya masyarakat perbatasan, agar memiliki nilai-nilai budaya bangsa untuk membangkitkan semangat nasionalisme masyarakat, agar tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa



dan bernegara. Peningkatan pendidikan mempunyai posisi yang strategis untuk menumbuh-kembangkan kecerdasan masyarakat, guna menanamkan dan menumbuhkan rasa cinta tanah air atau nasionalisme, sehingga dapat melahirkan sikap dan perilaku bela negara masyarakat perbatasan.

Kehidupan sosial masyarakat perbatasan memiliki hubungan kerabat yang sangat erat dengan masyarakat negara tetangga, karena adanya persamaan suku, sehingga bagi masyarakat perbatasan keluar masuk ke wilayah negara tetangga menjadi hal yang biasa dilakukan. Kehidupan sosial seperti ini menjadi kerawanan, karena dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang dampaknya dapat merugikan negara.

h. Aspek Pertahanan dan Keamanan.

Adanya kelompok masyarakat yang ingin memisahkan diri dari NKRI seperti kelompok OPM di Papua, menambah permasalahan di daerah perbatasan. Oleh karenanya, daerah perbatasan menuntut adanya peran serta masyarakat setempat untuk berpartisipasi aktif melakukan pengawasan dan penjagaan terhadap wilayahnya. Fakta di lapangan menunjukkan, bahwa masyarakat perbatasan sudah memiliki pengetahuan maupun semangat kewarganegaraan yang cukup, meskipun belum sepenuhnya menyadari akan pentingnya bela negara terhadap wilayahnya, namun karena kondisi penghidupan masyarakat perbatasan masih sangat terbatas, maka sering dijadikan alasan mengapa masyarakat tidak memiliki kesadaran bela negara. Lemahnya kesadaran bela negara, karena masyarakat kurang kepedulian terhadap keamanan lingkungannya, sehingga masyarakat lebih mengutamakan kebutuhan hidupnya ketimbang masalah bela negara. Sikap dan perilaku yang dijiwai rasa kecintaan pada bangsa dan negara, menjadi sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional guna menjaga keutuhan NKRI.

16. Upaya

Kondisi sikap dan perilaku masyarakat perbatasan perlu ditingkatkan, agar memiliki semangat bela negara terhadap daerahnya dari kemungkinan ancaman yang akan dihadapi. Peningkatan bela negara pada prinsipnya adalah bertujuan untuk menciptakan kondisi daerah perbatasan menjadi aman dan damai serta sejahtera. Guna meningkatkan sikap dan perilaku masyarakat perbatasan yang dijiwai kecintaan kepada tanah air, maka di perlukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Peningkatan kesadaran bela negara masyarakat melalui sektor pendidikan, antara lain :
 - 1) Mengaktifkan kembali kegiatan kepramukaan atau kepanduan sebagai extra kurikuler disekolah-sekolah mulai SD, SMP dan SMU.
 - 2) Membentuk organisasi kepemudaan untuk menanamkan anak-anak usia sekolah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
 - 3) Menyelenggarakan peringatan hari-hari nasional di sekolah-sekolah untuk menanamkan kecintaan kepada bangsa dan negara.
 - 4) Memberikan pelatihan kepada anak-anak sekolah dalam penanggulangan bencana alam.
 - 5) Mengajarkan kepada anak-anak sekolah tentang pelestarian lingkungan hidup.
- b. Peningkatan nasionalisme masyarakat perbatasan sebagai warga negara, yaitu :
 - 1) Mengajak masyarakat untuk mengibarkan bendera kebangsaan di rumah tempat tinggalnya masing-masing pada setiap hari bersejarah atau hari nasional.
 - 2) Mengajarkan masyarakat dapat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
 - 3) Mengajarkan masyarakat tentang Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupannya sehari-hari.
 - 4) Mengajak masyarakat untuk menggunakan barang-barang produk dalam negeri.



- 5) Memberikan penyuluhan hukum, agar masyarakat memahami dan mentaati peraturan serta hukum yang berlaku di negara Indonesia.
- c. Peningkatan implementasi bela negara masyarakat perbatasan, melalui :
 - 1) Membangun Pos-pos Kamling dan menggiatkan Kamling di setiap lingkungan pemukiman penduduk.
 - 2) Mengajarkan masyarakat untuk menjaga lingkungannya dari kerusakan alam seperti kegiatan penghijauan dan reklamasi.
 - 3) Mengajak masyarakat mematuhi ketentuan yang berlaku apabila hendak pergi ke negara tetangga untuk melengkapi diri dengan dokumen resmi.
 - 4) Mengajarkan masyarakat untuk wajib lapor apabila menemukan kegiatan-kegiatan ilegal di daerahnya.

PENUTUP

17. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

- a. Bela Negara masyarakat perbatasan merupakan sikap dan perilaku masyarakat sebagai warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada tanah air, guna menjaga tegaknya kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Sikap dan perilaku masyarakat perbatasan dalam pembelaan negara sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi daerah perbatasan lebih kondusif, sehingga pembangunan nasional dapat berhasil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
- b. Wilayah Negara Indonesia sangat luas dengan sumber kekayaan alamnya berlimpah, letaknya berbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga negara Indonesia menjadi sangat strategis dan memiliki arti penting bagi negara-negara tetangga.
- c. Maraknya kegiatan ilegal yang terjadi di daerah perbatasan darat, selain mempengaruhi aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya serta Hankam, kegiatan

ilegal akan mengganggu laju jalannya pembangunan nasional di daerah.

- d. Keberhasilan pembangunan nasional juga dapat menambah kepercayaan masyarakat kepada negara, sehingga cinta tanah airnya semakin mantap dan tumbuh jiwa patriotisme serta rela berkorban untuk menghadapi segala bentuk ancaman yang akan mengganggu kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

18. Rekomendasi

Untuk meningkatkan bela negara masyarakat perbatasan, diperlukan peningkatan pembangunan nasional di daerah perbatasan, maka disarankan adanya langkah-langkah yang lebih komprehensif dan nyata antara lain :

- a. Pemerintah perlu merevisi kewenangan Badan Nasional Pembangunan Perbatasan (BNPP) yang selama ini hanya bersifat koordinasi menjadi kewenangan yang memiliki otoritas operasional di lapangan, sehingga penyelenggaraan pembangunan di daerah perbatasan dapat berjalan lebih efektif.
- b. Pemerintah perlu melakukan evaluasi pada setiap tahap pelaksanaan pembangunan di daerah perbatasan, sehingga hasilnya dapat dikontrol sesuai program dan anggaran yang telah ditetapkan.
- c. Pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, pendidikan, dan kesehatan di daerah perbatasan serta memberlakukan insentif atau tunjangan bagi tenaga pendidik dan medis.
- d. Pemerintah perlu memperbanyak pos-pos pengamanan TNI/Polri untuk mengawasi daerah perbatasan dari kemungkinan terjadinya tindak pelanggaran tapal batas negara dan kegiatan ilegal lain yang dapat merugikan negara.



Meningkatkan Bela Negara Masyarakat Perbatasan guna Mendukung Pembangunan Nasional dalam rangka Menjaga Keutuhan NKRI

Focus Group Discussion (FGD)

- Selasa, 31 Juli 2012
- Pembicara :
 1. Sekretaris Utama BNPP Drs. Sutrisno, M.Si
 2. Dirjen Pothan Kemhan Dr. Pos M. Hutabarat
 3. Tenaga Profesional Bidang Ketahanan Nasional Lemhannas RI Mayjen TNI (Purn) Mulya Setyawan, S.IP, M.Sc

Roundtable Discussion (RTD)

- Selasa, 6 November 2012
- Pembicara :
 1. Aster Panglima TNI Mayjen TNI DR. S. Widjonarko
 2. Dirjen Kesbangpol Kemdagri A. Tanribali Lamo
 3. Dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia Makmur Keliat, Ph.D.
 4. Peneliti - LIPI DR. Jaleswari Pramodhawardani.

• Penanggap :

1. Sekretaris Utama Lemhannas RI Drs. H. Chandra Manan Mangan, M.Sc
2. Tenaga Ahli Pengajar Bid Geo Politik & Wasantara Lemhannas RI Laksda TNI Ir. Leonardi
3. Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Diplomasi Lemhannas RI Marsda TNI B. Purwadi Priono, S.IP.
4. Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Ideologi Lemhannas RI Marsda TNI L. Tony Susanto
5. Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Hankam Lemhannas RI Irjen Pol Drs Lindung Paido Simanjuntak

**Tim Penyusun : Direktorat Pengkajian
Bidang Pertahanan dan
Keamanan**





BIRO HUMAS SETTAMA LEMHANNAS RI
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta 10110
Telp/Fax. 021-3451926, Website: www.lemhannas.go.id

ISSN 2252-8555



9 772252 855561